



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR ..9. TAHUN 2023

TENTANG
STRATEGI SANITASI KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI SANITASI
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
2. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh.
5. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah Kabupaten/Kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
6. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut dengan Pokja PKP merupakan kelompok kerja pemerintah kota Payakumbuh yang memfasilitasi koordinasi , kebijakan, program dan anggaran tingkat kota untuk bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan system layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga serta pengelolaan limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
11. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

12. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan target pencapaian 100% setiap tahun.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau menentukan tujuan pembangunan.
19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

4.

24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 - 2027

Pasal 2

Dokumen SSK disusun untuk memberi arahan yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Penyusunan Dokumen SSK bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 4

Dokumen SSK berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang sanitasi Daerah; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

Pasal 5

- (1) Dokumen SSK disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat profil sanitasi saat ini;
 - c. bab III memuat kerangka pengembangan sanitasi;
 - d. bab IV memuat strategi pengembangan sanitasi;
 - e. bab V memuat program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi; dan
 - f. bab VI memuat monitoring dan evaluasi capaian SSK.

- (2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN STRATEGI SANITASI KOTA Pasal 6

Pelaksanaan SSK dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, APBD serta dapat melalui integrasi rencana aksi Daerah air minum dan penyehatan lingkungan dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan SSK dengan dana diluar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Pendekatan pelaksanaan SSK terbuka bagi sumber pendanaan di luar APBD, APBD Provinsi dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SSK harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2027, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI STRATEGI SANITASI KOTA Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada setiap triwulan dalam satu tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sanitasi dan persampahan melakukan pemantauan dan evaluasi.

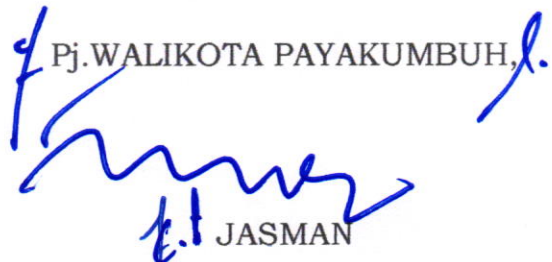
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sanitasi dan persampahan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sanitasi dan persampahan melalui Pokja PKP menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Ketua Pokja PKP.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sanitasi dan persampahan menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Pokja PKP.
- (8) Ketua Pokja PKP melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,

t. JASMAN






Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal, 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR ..9

No.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	Kabid IPU		6-10-2023
2	Kab cam		6-10-23
3	Kelmaslu		6-10-23
4	Kelmaslu		10-10-23
5	Kelmaslu		10-10-23
6			

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG STRATEGI SANITASI KOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2023 -2027**

PPSP

Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**STRATEGI SANITASI KOTA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 - 2027**



Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) Kota Payakumbuh



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanawata'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2027 dapat diselesaikan.

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2027 ini disusun sebagai rangkaian Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang diperlukan sebagai upaya penanganan sanitasi yang lebih terencana, terukur, terintegrasi dan sistematis. Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh ini disusun oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh.

Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh merupakan lanjutan dari Strategi Sanitasi sebelumnya yang telah habis masa perencanaannya sehingga diharapkan terjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi guna mangakomodasi pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dengan tersusunnya Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembangunan sanitasi dan dapat didukung oleh semua pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh.

Dengan mengharapakan ridho Allah Subhanawata'ala, saya sebagai pemegang kebijakan pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh berkomitmen menjalankan rencana strategis yang telah disusun dalam Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh dengan mengintegrasikan hasil Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh ke dalam proses pemrograman dan penganggaran di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Oktober 2023

Pj WALIKOTA PAYAKUMBUH



Drs. JASMAN, MM



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	Bab I-1
1.1. LATAR BELAKANG	Bab I-1
1.2. METODOLOGI	Bab I-4
1.3. DASAR HUKUM	Bab I-6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	Bab I-8
BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI.....	Bab II-1
2.1. GAMBARAN WILAYAH	Bab II-1
2.1.1. ASPEK GEROGRAFIS	Bab II-1
2.1.2. ASPEK GEOLOGI	Bab II-11
2.1.3. ASPEK POTENSI SUMBER DAYA	Bab II-13
2.1.4. WILAYAH RAWAN BENCANA	Bab II-17
2.1.5. DEMOGRAFI.....	Bab II-18
2.1.6. RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA PAYAKUMBUH.....	Bab II-27
2.2. PROFIL SANITASI SAAT INI	Bab II-30
2.2.1. AIR LIMBAH DOMESTIK	Bab II-32
2.2.1.1. SISTEM DAN INFRASTRUKTUR	Bab II-32
2.2.1.1.1. CAPAIAN AKSES LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK SAAT INI .	Bab II-33
2.2.1.1.2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Bab II-38
2.2.1.2. ANALISIS GAP AKSES AIR LIMBAH BERDASARKAN TARGET RPJMN 2020-2024	Bab II-42
2.2.1.3. ANALISIS UTILITAS INFRASTRUKTUR EKSISTING	Bab II-44
2.2.1.4. ANALISIS RANTAI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Bab II-45
2.2.1.5. KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN/PERATURAN	Bab II-46
2.2.2. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bab II-53
2.2.2.1. TIMBULAN SAMPAH	Bab II-53
2.2.2.2. SISTEM DAN INFRASTRUKTUR	Bab II-54
2.2.2.2.1. CAPAIAN AKSES LAYANAN PERSAMPAHAN SAAT INI	Bab II-54
2.2.2.2.2. KONDISI INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANAN PERSAMPAHAN.....	Bab II-56
2.2.2.3. ANALISIS GAP PENCAPAIAN AKSES PERSAMPAHAN PERKOTAAN	Bab II-64



2.2.2.4. KELEMBAGAAN	Bab II-64
2.2.2.5. PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA	Bab II-73
2.2.3. DRAINASE LINGKUNGAN	Bab II-75
2.3. TARGET AKSES KAB/KOTA YANG IGIN DICAPAI.....	Bab II-95
2.4. AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN	Bab II-95
2.4.1. AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Bab II-95
2.4.1.1. AREA BERISIKO AIR LIMBAH DOMESTIK	Bab II-97
2.4.1.2. PERMASALAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Bab II-101
2.4.2. AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN PERSAMPAHAN RT	Bab II-102
2.4.2.1. AREA BERISIKO PERSAMPAHAN RUMAH TANGGA	Bab II-103
2.4.2.2. PERMASALAHAN PERSAMPAHAN RUMAH TANGGA	Bab II-106
2.4.3. AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN DRAINASE LINGKUNGAN	Bab II-107
2.4.3.1. AREA BERISIKO DRAINASE LINGKUNGAN	Bab II-107
2.4.3.2. PERMASALAHAN DRAINASE LINGKUNGAN	Bab II-111
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	Bab III-1
3.1. VISI MISI SANITASI	Bab III-1
3.2. RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI	Bab III-2
3.2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI	Bab III-2
3.2.2. TAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI	Bab III-6
3.2.3. SKENARIO PENCAPAIAN SASARAN	Bab III-10
3.3. KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH	Bab III-11
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	Bab IV-1
4.1. STRATEGI AIR LIMBAH DOMESTIK	Bab IV-2
4.2. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bab IV-5
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI.....	Bab V-1
5.1. UMUM.....	Bab V-1
5.2. INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI UNTUK 5 TAHUN	Bab V-4
5.3. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH	Bab V - 7
5.4. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH	Bab V - 10
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	Bab VI-1
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA	
LAMPIRAN 2 Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah	
LAMPIRAN 3 Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK	
LAMPIRAN 4 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh.....	Bab II – 1
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2021	Bab II – 2
Tabel 2.3	Distribusi Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	Bab II – 8
Tabel 2.4	Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	Bab II – 10
Tabel 2.5	Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (Ha).....	Bab II – 10
Tabel 2.6	Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Kota Payakumbuh Tahun 2021	Bab II – 11
Tabel 2.7	Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021.....	Bab II – 14
Tabel 2.8	Hasil Perhitungan Nilai Shift Share Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	Bab II – 15
Tabel 2.9	Klasifikasi Sektor PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021 Berdasarkan Typologi Klassen	Bab II – 16
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021	Bab II – 20
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017-2021	Bab II – 22
Tabel 2.12	Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2017– 2021	Bab II – 23
Tabel 2.13	Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021	Bab II – 24
Tabel 2.14	Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2017-2021	Bab II – 25
Tabel 2.15	Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	Bab II – 25
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Per Kecamatan.....	Bab II – 26
Tabel 2.17	Ladder SDGs dan Definisi Akses Sanitasi di Indonesia	Bab II – 35
Tabel 2.18	Rekapitulasi Capaian Akses Air Limbah Domestik	Bab II – 37
Tabel 2.19	Capaian Akses Air Limbah Domestik Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan	Bab II – 38
Tabel 2.20	Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Bab II – 39
Tabel 2.21	Sub-sistem Pengangkutan SPALD-Setempat	Bab II – 40
Tabel 2.22	Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat.....	Bab II – 40



Tabel 2.23	Gap Capaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024.....	Bab II – 43
Tabel 2.24	Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting.....	Bab II – 44
Tabel 2.25	Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Bab II – 47
Tabel 2.26	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah.....	Bab II – 48
Tabel 2.27	Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah.....	Bab II – 49
Tabel 2.28	Pemetaan Pemangku Kepentingan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Luar Pemerintah Daerah	Bab II – 50
Tabel 2.29	Kontribusi, Keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah.....	Bab II – 50
Tabel 2.30	Alat Bantu Pemetaan Regulasi-Air Limbah Domestik Kota Payakumbuh	Bab II – 51
Tabel 2.31	Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (air limbah)	Bab II – 52
Tabel 2.32	Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air Limbah Domestik....	Bab II – 53
Tabel 2.33	Timbulan Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2022	Bab II – 54
Tabel 2.34	Timbulan Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2022	Bab II – 54
Tabel 2.35	Sub Sistem Pengumpulan Sampah.....	Bab II – 57
Tabel 2.36	Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Sampah	Bab II – 57
Tabel 2.37	Sub Sistem Pengolahan Persampah Kota Payakumbuh.....	Bab II – 59
Tabel 2.38	Sub Sistem Pemrosesan Akhir Sampah - TPAS Regional Payakumbuh	Bab II – 60
Tabel 2.39	Pengurangan Sampah Kota Payakumbuh	Bab II – 60
Tabel 2.40	Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024.....	Bab II – 64
Tabel 2.41	Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan	Bab II – 67
Tabel 2.42	Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan.....	Bab II – 67
Tabel 2.43	Data Lembaga pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Bab II – 69
Tabel 2.44	Data KSM Pengelola Sampah Kota Payakumbuh.....	Bab II – 70
Tabel 2.45	Pemetaan Pemangku Kepentingan Pengelolaan Persampahan di Luar Pemerintah Daerah.....	Bab II – 72
Tabel 2.46	Kontribusi, Keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan	



	di Luar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah.....	Bab II – 72
Tabel 2.47	Pemetaan Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Bab II – 73
Tabel 2.48	Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (persampahan).....	Bab II – 75
Tabel 2.49	Media Komunikasi dan Kerjasama terkait persampahan.....	Bab II – 76
Tabel 2.50	Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Kota Payakumbuh.....	Bab II – 78
Tabel 2.51	Target Capaian Akses Sanitasi Kota Payakumbuh.....	Bab II – 95
Tabel 2.52	Pembobotan Exposure dan Impact.....	Bab II – 96
Tabel 2.53	Area Berisiko Air Limbah Domestik.....	Bab II – 98
Tabel 2.54	Permasalahan Air Limbah Domestik	Bab II – 101
Tabel 2.55	Area Berisiko Persampahan.....	Bab II – 103
Tabel 2.56	Permasalahan Penanganan Persampahan	Bab II – 106
Tabel 2.57	Area Berisiko Drainase Lingkungan.....	Bab II – 108
Tabel 2.58	Permasalahan Drainase.....	Bab II – 111
Tabel 3.1	Visi dan Misi Sanitasi Kota Payakumbuh	Bab III – 1
Tabel 3.2	Distribusi Target Air Limbah Domestik Nasional	Bab III – 3
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik	Bab III – 5
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan	Bab III – 6
Tabel 3.5	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Payakumbuh	Bab III – 8
Tabel 3.6	Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan Kota Payakumbuh...	Bab III – 10
Tabel 3.7	Skenario Pencapaian Sasaran Sanitasi untuk Jangka Menengah ...	Bab III – 10
Tabel 3.8	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Payakumbuh untuk Sanitasi	Bab III – 12
Tabel 3.9	Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	Bab III – 13
Tabel 3.10	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi 5 Tahun Terakhir	Bab III – 15
Tabel 3.11	Perkiraan Besaran Pendanaan APBD untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun Hingga Tahun 2027	Bab III – 16
Tabel 3.12	Perkiraan Kemampuan APBD dalam Mendanai Program/ Kegiatan SSK	Bab III – 17
Tabel 5.1	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun.....	Bab V – 4
Tabel 5.2	Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun	Bab V – 5



Tabel 5.3	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan	Bab V – 6
Tabel 5.4	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan Dengan Sumber Pendanaan APBD Kota.....	Bab V – 7
Tabel 5.5	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi.....	Bab V – 8
Tabel 5.6	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan Dengan Sumber Pendanaan APBN.....	Bab V – 9
Tabel 5.7	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan Dengan Sumber Pendanaan Swasta/CSR/LSM/ZISWAF.....	Bab V – 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh.....	Bab II – 3
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kota Payakumbuh	Bab II – 4
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kota Payakumbuh	Bab II – 7
Gambar 2.4	Diagram Curah Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	Bab II – 8
Gambar 2.5	Peta Rawan Bencana Kota Payakumbuh	Bab II – 19
Gambar 2.6	Peta Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Payakumbuh .	Bab II – 21
Gambar 2.7	Diagram Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021	Bab II – 23
Gambar 2.8	Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021.....	Bab II – 24
Gambar 2.9	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Payakumbuh	Bab II – 28
Gambar 2.10	Peta Rencana Pola Ruang Kota Payakumbuh	Bab II – 29
Gambar 2.11	Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah (Ilustrasi).....	Bab II – 31
Gambar 2.12	Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Sub Sektor Air Limbah Domestik	Bab II – 34
Gambar 2.13	IPLT Sungai Durian Kota Payakumbuh.....	Bab II – 39
Gambar 2.14	Truk Tinja Kota Payakumbuh	Bab II – 40
Gambar 2.15	Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik	Bab II – 41

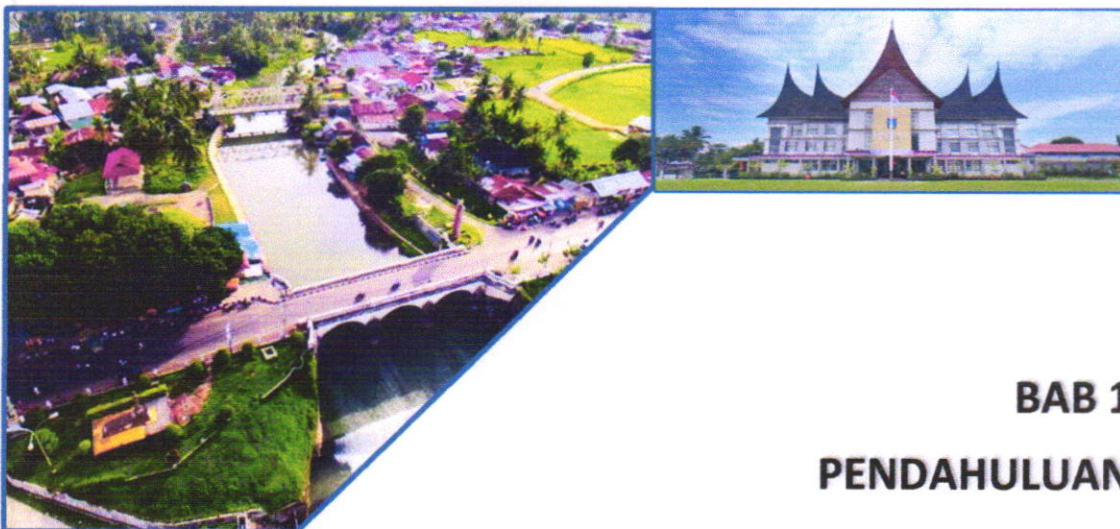


PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB 1

PENDAHULUAN





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang terus berkembang dan pertumbuhan populasi penduduk dengan berbagai aktivitasnya yang terus meningkat dengan pesat menyebabkan pemenuhan akan sarana dan prasarana dasar mengalami ketertinggalan serta menimbulkan dampak-dampak yang belum terantisipasi dengan baik. Hal tersebut dapat dirasakan dari kualitas kesehatan masyarakat yang masih banyak memerlukan perhatian yang disebabkan oleh pengaruh penurunan kondisi kesehatan lingkungan, dimana penurunan kesehatan lingkungan ini banyak terkait dengan belum terpenuhinya sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, lebih buruk lagi adalah akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap pemenuhan sanitasi sebagai dampak dari kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial. Permasalahan tersebut umum terjadi pada berbagai kota di Indonesia dimana diindikasikan dari keberadaan kawasan-kawasan kumuh, sehingga di tingkat nasional pun pelayanan sanitasi menjadi salah satu isu penting dan isu strategis. Untuk menjawab isu dan permasalahan sanitasi di atas maka perlu disusun suatu strategi sanitasi yang menggambarkan rencana pengelolaan sanitasi di daerah dalam jangka menengah.

Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh adalah suatu dokumen perencanaan yang berisikan kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh yang disusun saat ini



merupakan pemutakhiran dari dokumen Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 yang telah habis masa berlakunya dan perlu dilakukan pembaruan data.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, pemerintah akan lebih fokus meningkatkan akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Strategi ini akan berkontribusi secara signifikan bagi upaya Indonesia untuk meningkatkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) hingga 2024. Tahun 2030 melalui *milestone Sustainable Development Goals* (SDGs) setiap negara diharapkan telah mampu mewujudkan 100% akses sanitasi untuk penduduknya. Dimana, 15% digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu layanan dan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi yang rendah. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020 – 2024 target untuk capaian layanan air limbah domestik untuk akses layak sebesar 90%, termasuk di dalamnya 15% akses aman dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0%. Sedangkan untuk penanganan sampah sebesar 80% dan pengurangan sampah sebesar 20%.

Untuk Target Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat, terhadap akses air limbah domestik layak sebesar 85%, akses aman sebesar 9% dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0% dan target untuk penanganan sampah sebesar 80% dan pengurangan sampah sebesar 20%. Selanjutnya target tahun 2027 Pemerintah Kota Payakumbuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap akses air limbah layak sebesar 100% dan akses aman sebesar 26,84% dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0% dan target untuk penanganan sampah sebesar 80% dan pengurangan sampah sebesar 20%.

Kondisi capaian layanan air limbah domestik Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2022, capaian akses air limbah domestik sebesar 90,67% ,termasuk akses aman sebesar 13,38% dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0.0%. Penanganan sampah daerah perkotaan sebesar 76.8% dan pengurangan sampah sebesar 9,4% dan sampah yang tidak dikelola secara teknis sebesar 13,8%.

Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah yang komprehensif dan bersifat strategis. Strategi Sanitasi Kota (SSK) dibutuhkan sebagai pengikat Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan sanitasi lainnya

7.



untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kota. Setelah disepakati, SSK akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan. Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh ini dilaksanakan oleh Pokja PKP Kota Payakumbuh yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 653.5/260/WK-Pyk/2021 tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh.

Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh berisikan visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh serta strategi-strategi pencapaiannya. Tiap-tiap strategi kemudian diterjemahkan menjadi strategi sanitasi kota yang meliputi :

- Aspek Teknis, mencakup potret atau kondisi eksisting serta strategi dan usulan program/kegiatan pengembangan sanitasi yang terdiri dari layanan sub sektor air limbah domestik dan layanan sub sektor persampahan.
- Aspek Pendukung; mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Keuangan (c) Pelaku Bisnis (d) Pemberdayaan Masyarakat, aspek gender dan kemiskinan, dan (f) Monitoring dan Evaluasi

Strategi Sanitasi Kota ini sangat penting untuk dijadikan pedoman semua pihak dalam mengelola sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif guna memperbaiki perencanaan dan pembangunan sanitasi dalam rangka mencapai target-target pencapaian layanan sektor sanitasi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yang merupakan revisi dari RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025, dipergunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan strategi sanitasi kota. Oleh karena itu, strategi sanitasi kota ini merupakan penjabaran operasional dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

7.



Renstra Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD juga dipergunakan sebagai bahan penyusunan strategi sanitasi kota. Renstra Perangkat Daerah dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan strategi sanitasi kota ini, maka implementasi Strategi Sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan OPD yang terkait dengan sanitasi.

Strategi sanitasi kota mengarah pada operasional teknis khususnya sektor yang terkait sanitasi dalam RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, terlaksana pula implementasi dari Dokumen Strategi Sanitasi Kota.

Ruang lingkup lokasi Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh ini adalah terdapat pada 5 (lima) kecamatan di Kota Payakumbuh dimana dalam penentuan wilayah kajian dari penyusunan SSK adalah mencakup seluruh kelurahan yang terdapat di wilayah administratif Kota Payakumbuh yang berjumlah 47 (empat puluh tujuh) kelurahan.

Maksud penyusunan atau pemutahiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh dalam jangka menengah (5 tahunan).

Tujuan dari penyusunan dokumen penyusunan atau Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota ini adalah :

1. Kerangka kerja pemutakhiran strategi sanitasi kota ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh selama 5 tahun kedepan
2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.
3. Dipergunakan sebagai dasar pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh dan merupakan tindak lanjut dari Dokumen Strategi Sanitasi yang telah disusun priode sebelumnya.
4. Sebagai Dokumen yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan sector sanitasi untuk 5 (lima) tahun kedepan.
5. Dokumen Startegi Sanitasi Kota merupakan penjabaran tetang pembangunan sanitasi yang termuat dalam Dokumen RPD serta di implementasikan di RKPD tahunan dan sesuai juga dengan RTRW.

4.



1.2. Metodologi Penyusunan

Dokumen Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2027 ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Payakumbuh secara partisipatif dan terintegrasi melalui diskusi, pembekalan, maupun pelatihan-pelatihan yang didukung oleh Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat. Metode dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap dan menyeluruh. Metode penyusunan Strategi Sanitasi Kota ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam dokumen ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui survey. Survey yang dilakukan adalah studi *Environment Health Risk Assessment* (EHRA). Melalui studi EHRA ini didapat gambaran sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari seluruh OPD yang terkait dengan sanitasi baik data teknis maupun dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kota Payakumbuh.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data untuk strategi sanitasi kota ini, digunakan instrumen SSK. Input dari instrumen SSK ini antara lain adalah target layanan yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah yang nantinya akan dituangkan dalam visi dan misi kota dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi. Dalam perumusan target ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Input berikutnya adalah data umum berupa data administrasi wilayah dan kependudukan. Input serta data infrastruktur dan keberfungsian infrastruktur.

3. Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

Pada tahap ini dinilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. Kemudian merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota

4.



jangka menengah (5 tahunan) dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Rantai Layanan Sanitasi.

1.3. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, pusat, provinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi Permukiman di Kota Payakumbuh didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :

1. Undang-Undang

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- a. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air
- b. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- c. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
- d. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- e. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- f. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal



- g. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- h. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia
 - a. Perpres No. 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
 - b. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - SDGs
 - c. Perpres No. 97 Tahun 2017 Tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - d. Perpres No.18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024
- 4. Peraturan Menteri
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
 - b. Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 (Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik).
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024.
- 5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

6.



- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional
 - c. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030.
 - d. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
 - f. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
 - g. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.
 - h. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6. Dasar Hukum Dalam Advokasi
- a. Amanat RPJPN 2005-2025 “Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat”
 - b. Target RPJMN 2019-2020 “Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman yang diprioritaskan pada sanitasi layak dan aman”
 - c. SE Mendagri Nomor 660/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah
 - d. SE Menkes Nomor 185/2015 Tentang Pendanaan Untuk Upaya Pelayanan Kesehatan Preventif di Provinsi dan Kabupaten/Kota

4



1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Payakumbuh dalam dokumen ini terdiri dari 6 (enam) Bab. Bab 1, 2 dan 3 dari Dokumen SSK ini merupakan Arah Pembangunan Sanitasi Kota atau sering juga disebut sebagai Kerangka Kerja Sanitasi yang memberikan arahan jangka panjang (20 tahunan), dan jangka menengah (5 tahunan) untuk pembangunan sanitasi kota secara komprehensif, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengadvokasi para pengambil keputusan di tingkat kota, provinsi dan pusat. Sedangkan bab 4, 5 dan 6 memberikan gambaran rinci tentang substansi upaya-upaya strategi yang akan dilakukan.

Adapun muatan dari masing-masing bab dokumen Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh adalah :

Bab I Pendahuluan ;

Pendahuluan terdiri dari Latar belakang, Metodologi penyusunan, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II Profil Sanitasi Saat Ini ;

Bab ini memberikan penjelasan tentang Gambaran Wilayah, Profil Sanitasi Saat Ini, Target akses kota yang ingin dicapai dan permasalahan sanitasi serta area berisiko sanitasi

Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi ;

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Sanitasi, rencana pengembangan sanitasi, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah

Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi ;

Bab ini memaparkan tentang program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi sub sektor air limbah domestik dan sub sektor persampahan rumah tangga.

Bab V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi ;

Bab ini menjelaskan tentang Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non-pemerintah

Bab VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK ;

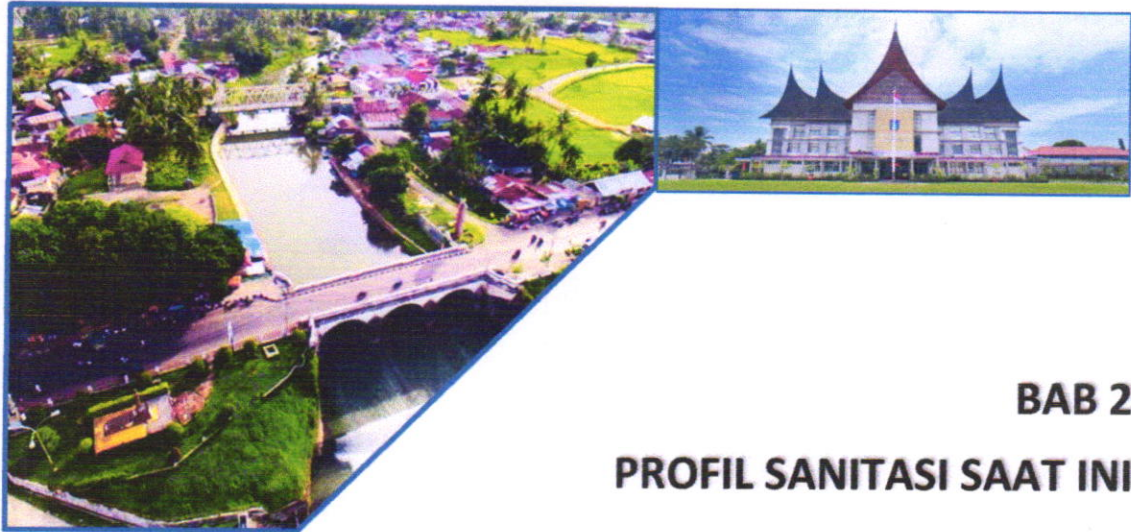
Bab ini menjelaskan tentang strategi Monev yang akan dilakukan sebagai Implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan.



BAB 2

PROFIL SANITASI SAAT INI





BAB 2

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

2.1.1. Aspek Geografis

Secara geografis, Kota Payakumbuh terletak pada 00⁰10' sampai dengan 00⁰17' LS dan 100⁰35' sampai dengan 100⁰45' BT pada ketinggian 514 m dari permukaan laut. Kota Payakumbuh merupakan kota kecil dengan luas wilayah ± 80,43 Km² atau ± 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat dan berjarak ±120km dari Kota Padang sebagai pusat ibukota Provinsi Sumatera Barat. Didominasi oleh dataran dengan kemiringan <2,00% seluas 6.601,7 Ha atau 82,08% dari total luas Kota Payakumbuh, selebihnya merupakan dataran dengan kemiringan >2,00% seluas 1.441,3 Ha atau 17,92% dari luas wilayah Kota Payakumbuh yang berlokasi di wilayah selatan dan barat daya Kota Payakumbuh.

Tabel 2.1
Klasifikasi Kemiringan Lahan di Kota Payakumbuh

No	Kemiringan Lahan	Lereng (%)	Kelas	(Luas)	
				Ha	%
1	Datar	0-2	A	6.601,7	82,08
2	Agak Landai	2-8	B	304,0	3,78
3	Landai	8-15	C	588,8	7,32
4	Agak Curam	15-30	D	112,6	1,40
5	Curam	30-45	E	298,4	3,71
6	Sangat Curam	45-60	F	137,5	1,71
Luas				8.043,0	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010–2030

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Selatan, maka terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sehingga



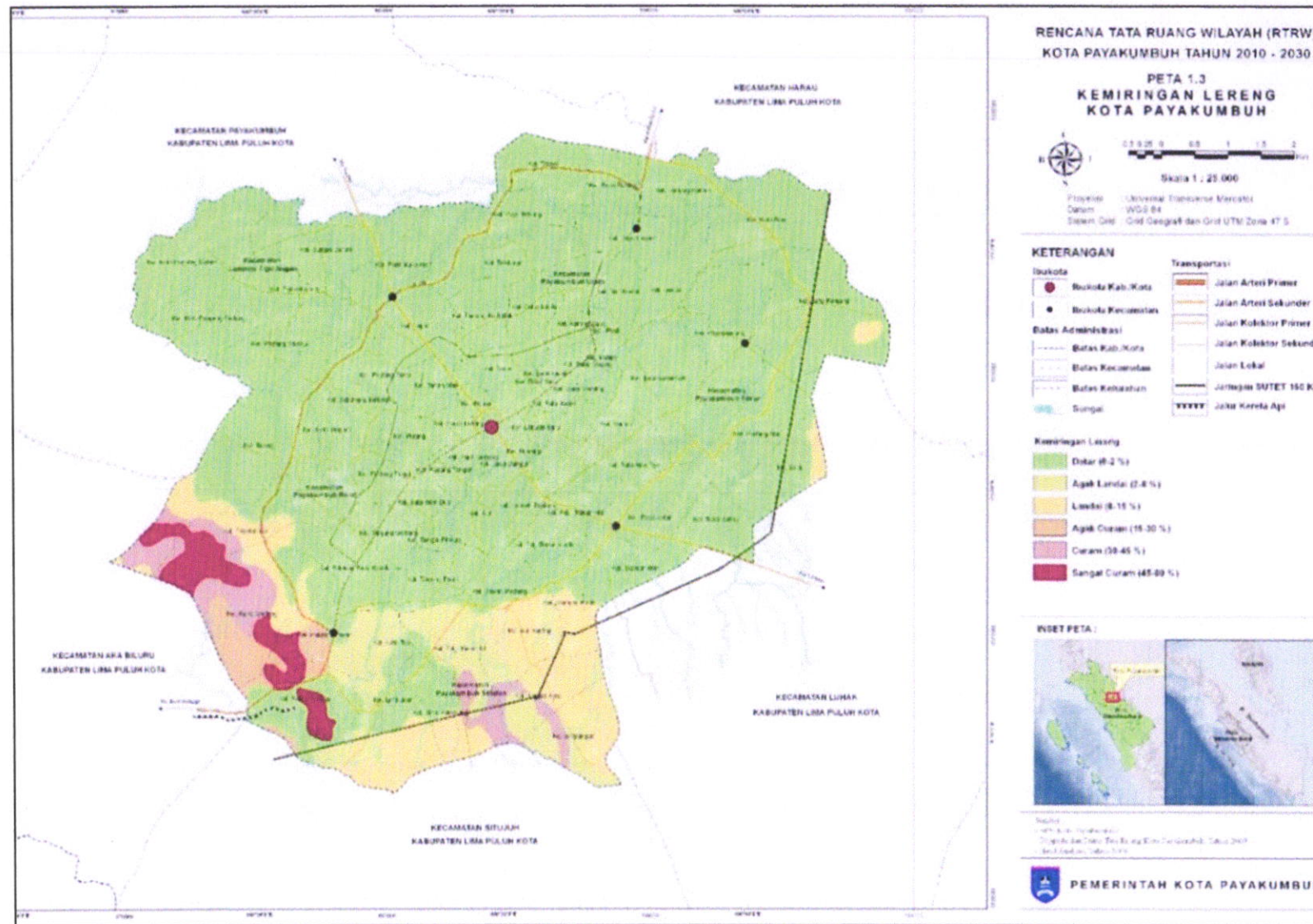
Kota Payakumbuh memiliki 5 (lima) kecamatan yang sebelumnya memiliki 3 (tiga) kecamatan. Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Luhak Nan Bungsu yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara administratif berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuah
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau

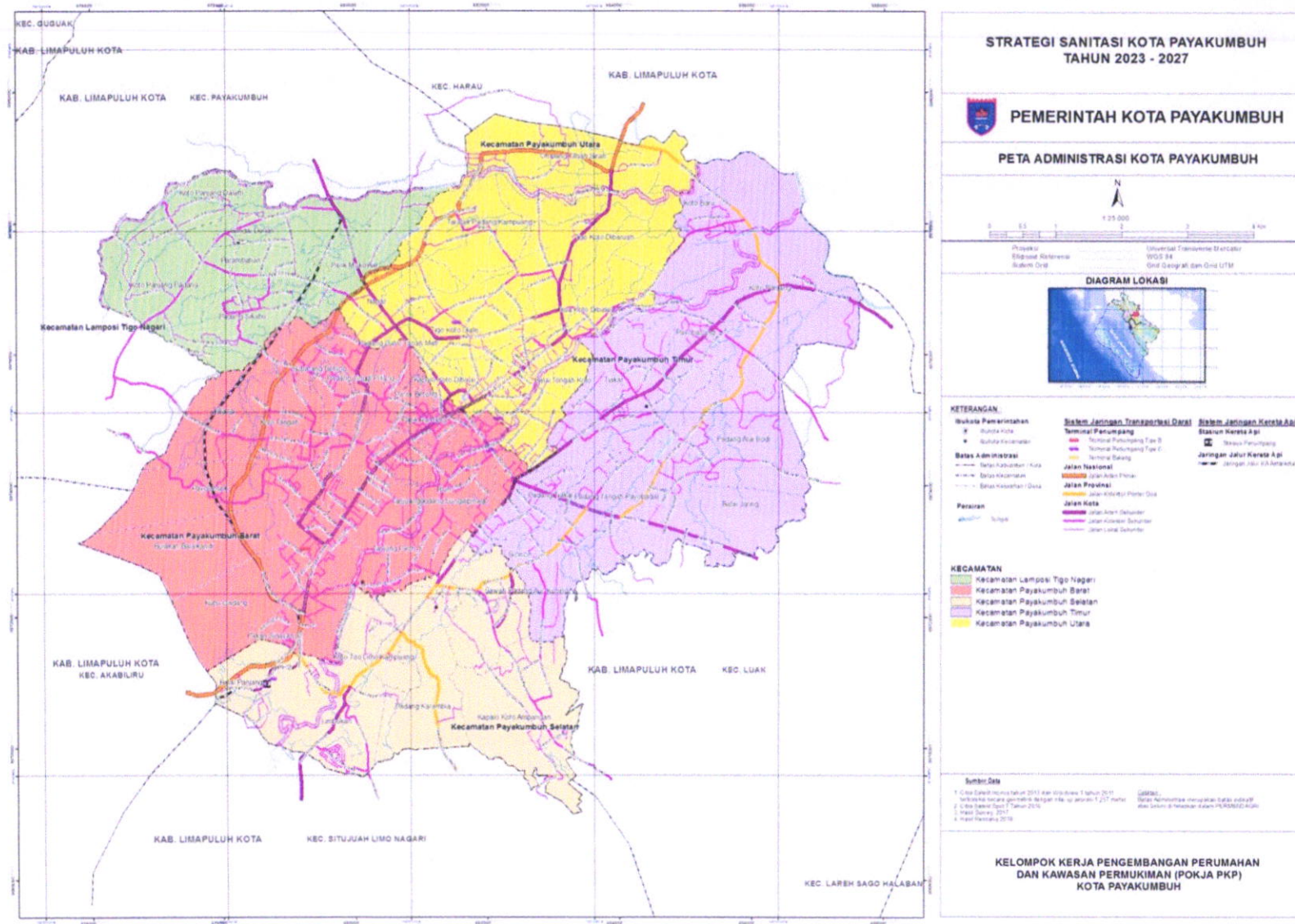
Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah		
				Kelurahan	RW	RT
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,064	17	58	168
2	Payakumbuh Utara	Pdg. Kaduduak	14,528	9	35	122
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,730	9	33	91
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang	14,683	6	16	50
5	Lamposi Tigo Nagori	Sei Durian	9,425	6	14	50
Total			80,43	47	156	481

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka, 2022



Gambar 2.1 Peta Kemiringan Lereng Kota Payakumbuh



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kota Payakumbuh





Posisi Kota Payakumbuh yang dikelilingi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota, membuat beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota juga melalui wilayah Kota Payakumbuh. Terdapat 8 (delapan) sungai yang mengalir di wilayah Kota Payakumbuh yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku, kegiatan pertanian dan objek wisata, diantaranya :

1. Sungai Batang Agam

Sungai Batang Agam mengalir melalui Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara sepanjang 15,60 km dan lebar 25 meter. Sungai ini juga dijadikan sumber air baku oleh PDAM semenjak tahun 2019. Terhitung tahun 2020, sungai batang agam juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata oleh Pemerintah Kota dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di sepanjang sungai batang agam tersebut dimana pada tahun ini fasilitas pendukung telah selesai dibangun di Kawasan Tanjung Gadang Sungai Pinago dan Tanjung Pauh. Sumber air sungai batang agam ini berasal dari air permukaan dengan rata-rata debit air sebesar 4,52 m³/detik.

2. Sungai Batang Lampasi

Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara dengan rata-rata debit air sebesar 3,53 m³/detik. Air sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

3. Sungai Batang Sinamar

Sungai Batang Sinamar mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu pada Kelurahan Ompang Tanah Sirah sepanjang 4,5 km dan lebar 15 meter. Pemanfaatan air dari sungai ini belum dapat dioptimalkan untuk keperluan irigasi karena elevasi pada hulu sungai sangat rendah dan hanya melewati Kota Payakumbuh sepanjang ±3 (tiga) Km, Sungai Batang Sinamar juga merupakan batas alami dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

4. Sungai Batang Pulau

Sungai Batang Pulau telah dimanfaatkan sebagai sumber air untuk mengalir lahan masyarakat. Sungai ini memiliki panjang 11,40 km dan lebar 5 meter yang melewati Sungai Batang Lampasi memiliki panjang 11,60 km dan lebar 20 meter mengalir melewati Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Air dari sungai ini dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan dan peternakan oleh masyarakat.

4.



5. Sungai Talang

Sungai Talang mengalir melewati Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan dengan panjang 5 km dan lebar 5 meter. Dalam Rencana Detail Tata Ruang, direncanakan jaringan drainase primer terdapat pada sungai Talang yang merupakan sistem jaringan drainase perkotaan.

6. Sungai Baih

Sungai Baih juga termasuk sungai yang masuk pada rencana pengembangan jaringan drainase primer di Kota Payakumbuh. Sungai ini memiliki panjang 5 km dan lebar 6 meter yang mengalir melewati kecamatan Payakumbuh Timur.

7. Sungai Batang Sikali

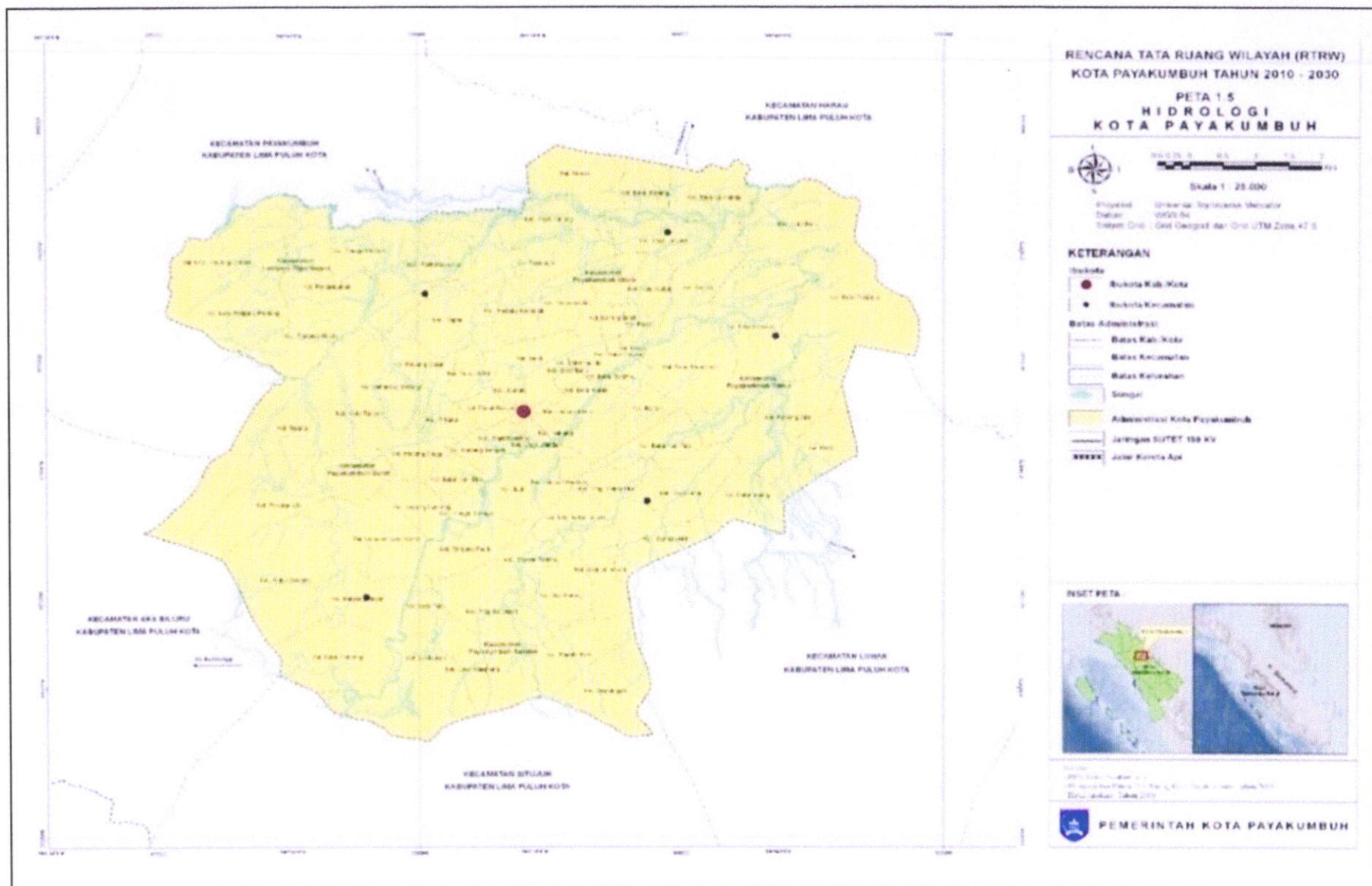
Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka dimana rata-rata debit air sungai ini 0,51 m³/detik dan panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur.

8. Sungai Tembok Jua

Sungai Tembok Jua juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 6,30 km dan lebar 4 km yang melewati Payakumbuh Utara. Sungai Batang Sikali dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian mereka. Sungai ini memiliki panjang 10 km dan lebar 6 meter yang melewati Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Payakumbuh Timur.

Untuk menjaga agar sungai ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat mengalir dengan baik, maka Pemerintah Kota Payakumbuh selalu merencanakan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sungai ini dan kawasan pendukungnya.

6.



Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kota Payakumbuh

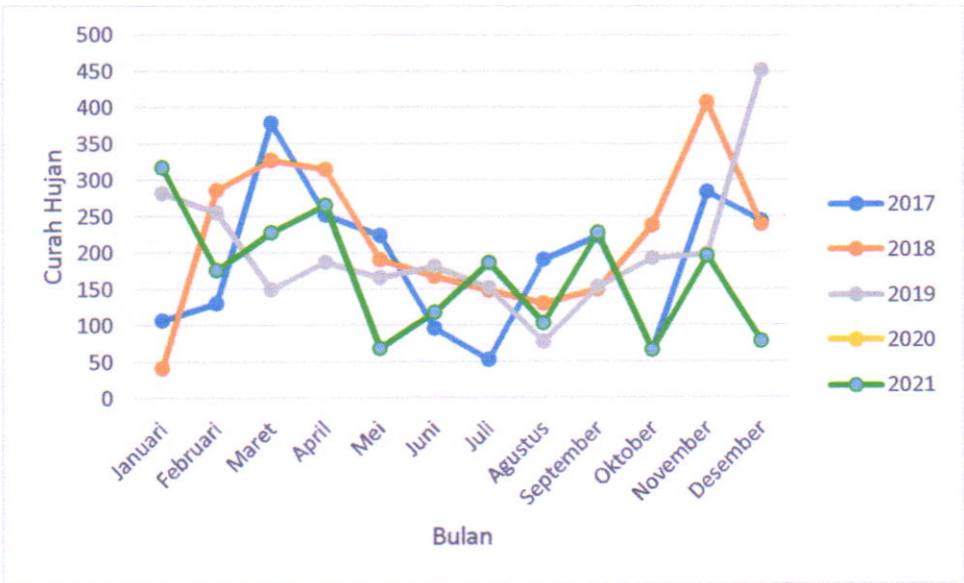


Selain dengan dukungan dari aliran sungai yang melewati Kota Payakumbuh, sektor pertanian di Kota Payakumbuh juga akan diuntungkan dengan rata-rata curah hujan yang baik dalam setiap bulan dengan intensitas curah hujan diatas 50 mm/hari yang dapat dilihat pada Tabel2.3.

Tabel 2.3
Distribusi Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Bulan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	107,0	10	41,0	10	282,0	19	317,0	19	317,0	19
2.	Februari	131,0	9	285,3	16	255,0	13	175,5	12	175,5	12
3.	Maret	379,0	15	327,2	18	149,0	11	228,0	13	228,0	13
4.	April	252,0	18	314,4	18	187,0	15	265,5	16	265,5	16
5.	Mei	224,0	15	190,0	13	165,5	10	68,5	12	68,5	12
6.	Juni	96,0	11	167,0	14	181,0	15	118,0	13	118,0	13
7.	Juli	53,0	7	148,0	12	151,5	11	186,5	13	186,5	13
8.	Agustus	191,0	14	130,0	10	77,0	4	103,0	11	103,0	11
9.	September	223,0	16	149,0	15	152,5	9	228,0	14	228,0	14
10.	Oktober	66,0	7	237,0	20	192,0	16	66,0	11	66,0	11
11.	November	284,0	22	407,0	22	198,5	13	196,0	15	196,0	15
12.	Desember	244,0	17	239,0	13	451,5	22	78,0	11	78,0	11

Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022



Sumber: Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Gambar 2.4
Diagram Curah Hujan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021



Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menggunakan ambang batas untuk menentukan intensitas curah hujan ke dalam 6 kategori :

- a. 0 mm/hari (abu-abu) : berawan
- b. 0,5 – 20 mm/hari (hijau) : hujan ringan
- c. 20 – 50 mm/hari (kuning) : hujan sedang
- d. 50 – 100 mm/hari (orange) : hujan lebat
- e. 100 – 150 mm/hari (merah) : hujan sangat lebat
- f. >150 mm/hari (ungu) : hujan ekstrem

Jika dilihat dari ambang batas di atas, kondisi yang dapat dinyatakan hujan apabila intensitas curah hujan $\geq 0,5$ mm/hari. Dari tampilan data di atas, dapat kita ketahui, Kota Payakumbuh mendapatkan hujan dengan intensitas dari hujan sedang sampai dengan hujan ekstrem dengan distribusi hujan yang ada setiap bulannya. Dengan adanya curah hujan yang cukup bahkan cukup tinggi pada bulan tertentu dimana curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih dan didukung oleh temperatur yang berkisar diantara 20°C - 32°C dan kelembaban udara pada rentang 82%-86% akan sangat mendukung untuk kegiatan pertanian di Kota Payakumbuh serta pertumbuhan vegetasi lainnya. Selain itu untuk mendukung kegiatan pertanian dan ketersediaan air baku, Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pendanaan APBN dan sumber dana lainnya telah memiliki 2 embung, diantaranya :

1. Mata Air Bulakan/ Embung Bulakan

Mata Air Bulakan berada di wilayah Kelurahan Limbukan. Selain sebagai sumber air baku, mata air ini juga digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan. Embung Bulakan dibangun pada tahun 2018 dengan dana APBN. Embung Bulakan memiliki debit air sebesar 500 liter/detik.

2. Embung Lurah Rawang

Pembangunan embung ini dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara pada tahun 2018. Pembangunan embung ini ditujukan untuk penyediaan sumber air baku yang dipergunakan untuk air minum, irigasi lahan pertanian masyarakat dan peternakan. Debit air pada embung ini sebesar 7 liter/detik.

Pemanfaatan ruang wilayah di Kota Payakumbuh lebih didominasi untuk areal pertanian seperti lahan persawahan dan kebun/ ladang. Pemanfaatan ruang wilayah merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan

4.



alam. Berikut dapat dilihat pada tabel 2.4, perihal pemanfaatan ruang wilayah berupa pemanfaatan lahan di Kota Payakumbuh beserta sebarannya pada tabel 2.5.

Tabel 2.4
Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)
1.	Sawah	2.751	34,20	2.749	34,18	2.749	34,18	2.751	34,20	2.733,1	34,20
2.	Tanah utk Bangunan & Sekitarnya	2.970	36,92	2.968	36,90	2.970	36,92	2.543	31,62	2.543	31,62
3.	Kebun/ Ladang	1.380	17,16	1.450	18,03	1.450	18,03	1.320	16,41	1.320	16,41
4.	Kolam	14	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Hutan	358	4,45	283	3,52	283	3,52	283	3,52	283	3,52
6.	Padang Rumput	4	0,05	4	0,05	4	0,05	4	0,05	4	0,05
7.	Lainnya	566	7,04	589	7,32	587	7,30	1.142	14,20	1.142	14,20
Jumlah		8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00	8.043	100,00

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Adanya perubahan data luas penggunaan lahan menurut jenisnya di Kota Payakumbuh sesuai dengan hasil kajian revisi RTRW Perda No 5 Tahun 2020 dan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Payakumbuh No 1 tahun 2021. Dari Perda LP2B tersebut luas sawah Kota Payakumbuh menjadi 2.733,16 Ha yang terdiri dari : Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebesar 1.745,39 Ha, lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 1.719,22 Ha, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) sebesar 26,17 Ha.

Tabel 2.5
Luas Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021 (Ha)

No	Kecamatan	Luas Daerah	2017		2018		2019		2020		2021	
			Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah	Sawah	Bukan Sawah
1	Payakumbuh Barat	1.966	529	577	527	577	527	577	529	577	414,23	567
2	Payakumbuh Timur	2.273	663	772	663	772	663	772	663	772	847,57	772
3	Payakumbuh Utara	1.453	745	225	745	191	745	191	745	191	713,45	191
4	Payakumbuh Selatan	1.409	378	491	378	491	378	491	378	491	397,04	491
5	Lamposi Tigo Nagori	942	436	293	436	293	436	293	436	293	360,87	293
Jumlah		8.043	2.751	2.358	2.749	2.324	2.749	2.324	2.751	2.324	2.733,16	2.314

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Penggunaan lahan untuk lahan pertanian lebih banyak di Kecamatan Payakumbuh Timur dengan total luas lahan pertanian sebesar 1619,57 Ha atau 71,25% dari luas wilayahnya, dan lebih ditujukan untuk lahan sawah sebesar 37,29% dari luas wilayah, yang hampir sama luasnya dengan lahan bukan sawah sebanyak 33,96%. Sedangkan lahan yang lebih banyak digunakan sebagai lahan persawahan lebih banyak di Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar

4.



713,45 Ha atau 49,10% dari luas wilayahnya. Jika dilihat dari rata-rata penggunaan lahan dari masing-masing wilayah kecamatan, hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh penggunaan lahannya ditujukan untuk lahan pertanian yaitu >50,00% dari luas masing-masing wilayah, seperti terinci dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Persentase Luas Penggunaan Lahan Pertanian Sawah dan Non-Sawah dengan Luas Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (ha)	Sawah (Ha)	Bukan Sawah (Ha)	Persentase Luas Lahan Pertanian Sawah terhadap Luas Daerah (%)	Persentase Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah terhadap Luas Daerah (%)	Persentase Luas Lahan Pertanian terhadap Luas Daerah (%)
1.	Payakumbuh Barat	1.966	414,23	567	21,07	28,84	49,91
2.	Payakumbuh Timur	2.273	847,57	772	37,29	33,96	71,25
3.	Payakumbuh Utara	1.453	713,45	191	49,10	13,15	62,25
4.	Payakumbuh Selatan	1.409	397,04	491	28,18	34,85	63,03
5.	Lamposi Tigo Nagori	942	360,87	293	38,31	31,10	69,41
Total		8.043	2.733,16	2.314	33,98	28,77	62,75

Sumber :Dinas Pertanian, 2021

2.1.2. Aspek Geologi

Material padat pembentuk permukaan Kota Payakumbuh terdiri dari: humus, soil (tanah), aluvial (sungai dari farmasi sedimen), metamorphosis (malihan), vulkanik dan intrusi (terobosan).Pembentukan dan penyebaran material tersebut merupakan hasil dari berbagai proses yang berasal dari dalam bumi (endogen) dan dari luar (exogen). Berbagai proses dalam (endogen) mencakup tektonik dan vulkanisme (kegunungapian). Berbagai proses dari luar terdiri dari : pelapukan, erosi, transportasi dan sedimentasi.

Urutan tata letak material padat penyusun bentang alam Kota Payakumbuh secara stratigrafis adalah sebagai berikut:

- 1) Humus dan Soil (tanah): dengan ketebalan beragam dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter.
- 2) Aluvial sungai (Q al) terdiri dari ; lempung, pasir, kerikil dan bongkah batuan beku dan kwarsit,vdiendapkan disepanjang dataran banjir. Ketebalan bervariasi dapat mencapai puluhan meter.

4



- 3) Sedimen Formasi Brani (Tob) : Konglomerat kasar beraneka ragam dengan sisipan batu pasir. Komponen dari konglomerat kasar terdiri dari : kwarsit, granit, filit dan batu gamping. Tersementasi dengan baik, dan secara lokal ada yang terbersikkan. Ketebalan formasi brani 600 m, berumur oligosen dan hubungan secara manjari-jemari (*Intenfingering*) dengan sedimen Formasi Sangkarewang.
- 4) Malihan, anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCks) : mayoritas terdiri dari serpih dan filit kemerahan sampai coklat tua mengandung sisipan tipis batusabak kelabu, kwarsit, batu lanan, rijang kelabu dan lava andesit sampai basalt. Pada kontak dengan batuan intrusi, PCks bermalih menjadi sekis, genes dan batu tanduk. PCks berhubungan secara manjari-jemari (*Interfingering*) dengan PCKl dan PCKg, dengan tebal keseluruhan mencapai 5000 m, berumur Permo-Karbon.
- 5) Malihan, anggota batu gamping Formasi Kuantan (PCKl) : Batu gamping pejal, berongga, putih kelabu hingga kemerahan. Mengandung sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkensikkan dan kwarsit. Umumnya membentuk topografi kasar, berumur karbon. Di Kota Payakumbuh, material PCks dan PCKl, tersingkap (exposed) di batas barat daya kota, dan menjadi salah satu objek wisata di gua Nagalau Indah.
- 6) Vulkanik : Tufa batuapung (Qpt) ; terdiri dari batuapung putih kekuningan, berdiameter $\frac{1}{2}$ s/d 10 cm didalam massa dasar kaca kelaran bekomposisi riolit. Secara lokal, dibagian bawah Qpt mencapai ratusan meter, berumur kwaiter, dan merupakan mayoritas material penyusun permukaan Kota Payakumbuh.
- 7) Vulkanik : Andesit Gunung Malintang (Qamg) : Breksi andesit sampai basalt, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahan dan lava. Merupakan material dan kegiatan gunung api malintang, diselatan Kota Payakumbuh berumur Kwaiter.
- 8) Vulkanik : Andesit sampai basalt (Ta) : aliran lava yang tak dipisah, breksi, aglomerat dan batuan hipabisal bekomposisi andesit sampai basalt. Berumur miosen (Tersier atas). Tersingkap di barat daya perbukitan batugamping (PCKl) dibatas barat daya Kota Payakumbuh.

Data struktur geologi yang ada di Kota Payakumbuh, hanya satu kedudukan struktur lapisan pada sedimen formasi brani yaitu sudut kemiringan (dip) lapisan 250 dengan arah kemiringan (dip direction) kearah selatan dilereng utara Gunung Malintang . Data perihal kehadiran struktur patahan (sesar) maupun kekar (joint), nihil.

4



Namun, data regional memperlihatkan bahwa Kota Payakumbuh di kelilingi oleh tiga zona patahan besar yaitu :

- a. Zona Patahan Mangani ; 12 km di barat laut Kota Payakumbuh
- b. Zona Patahan Sungai Takung ; 15 km di tenggara di balik gunung malintang
- c. Zona Patahan Sungai Pakis ; 35 km di timur laut Kota Payakumbuh.

Ketiga zona patahan tersebut, diluar wilayah administrasi Kota Payakumbuh, namun hal tersebut diatas perlu diantisipasi sebagai kawasan yang akan terkena dampak sebagai kawasan evakuasi bencana alam, dari wilayah sekitarnya.

2.1.3. Aspek Potensi Sumber Daya

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah dilakukan untuk mengetahui secara konkrit sektor dan sub-sektor yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana daerah untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga pertumbuhan ekonomi optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maksimal dapat diwujudkan. Potensi pengembangan ekonomi kabupaten/ kota dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektoral pada tingkat provinsi. Alat analisa yang digunakan untuk penentuan sektor unggulan perekonomian kota Payakumbuh adalah Indeks Koefisien Lokasi (*Location Quotient*, LQ), *Shift Share* dan *Klassen Typology* (tipologi klassen).

Location Quotient adalah suatu perbandingan besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada tingkat yang lebih luas. Teknik ini mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah pada sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis dan sektor mana yang bukan sektor basis. LQ dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sektor unggulan daerah. Dalam perhitungannya nilai LQ diperoleh dengan membandingkan PDRB Kota Payakumbuh dengan PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan Harga Konstan (Tahun 2010) pada rentang waktu tahun 2017-2021, hasil perhitungan sebagaimana yang tergambar pada tabel 2.7.

4.



Tabel 2.7
Perkembangan Nilai Indeks Koefisien Lokasi (LQ) Menurut Lapangan Usaha di Kota Payakumbuh
Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.30	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28
B	Pertambangan dan Penggalian	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13
C	Industri Pengolahan	0.53	0.56	0.58	0.56	0.56	0.56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.60	0.59	0.58	0.58	0.58	0.59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.39	3.33	3.19	3.17	3.09	3.23
F	Konstruksi	1.44	1.43	1.40	1.35	1.34	1.39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.50	1.49	1.46	1.47	1.44	1.47
H	Transportasi dan Pergudangan	1.12	1.11	1.12	1.21	1.24	1.16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.45	2.43	2.41	2.53	2.56	2.48
J	Informasi dan Komunikasi	1.32	1.32	1.31	1.32	1.31	1.32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.09	2.07	2.04	2.04	1.99	2.05
L	Real Estate	1.45	1.43	1.39	1.39	1.38	1.41
M,N	Jasa Perusahaan	0.62	0.61	0.59	0.59	0.59	0.60
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.24	1.22	1.18	1.18	1.18	1.20
P	Jasa Pendidikan	1.05	1.04	1.04	1.05	1.07	1.05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.11	1.10	1.09	1.09	1.09	1.10
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.97	1.95	1.95	1.95	1.89	1.94
Produk Domestik Regional Bruto		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2022 (data diolah)

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, terlihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada lapangan usaha di Kota Payakumbuh. Berdasarkan nilai rata-rata LQ dalam hal penentuan sektor basis dan sektor unggulan, dimana nilai tersebut harus lebih besar dari satu ($LQ > 1$), maka dapat diketahui dari hasil pengolahan data bahwa sektor basis dan sektor unggulan di Kota Payakumbuh diantaranya adalah sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ yaitu sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3,23); sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (2,48); sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (2,05); sektor Jasa Lainnya (1,94); sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (1,47); sektor Real Estate (1,41); sektor Konstruksi (1,39); sektor Informasi dan Komunikasi (1,32); sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,20); sektor Transportasi dan Pergudangan (1,16); sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (1,10); sektor Jasa Pendidikan (1,05).

Sektor pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor jasa perusahaan merupakan sektor non basis tapi meskipun dianggap kurang potensial tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena bisa jadi dengan adanya bantuan dari sektor basis maka dapat membantu pengembangan sektor non basis menjadi sektor basis baru.



Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh yang dikaitkan dengan perekonomian daerah yang menjadi daerah referensinya, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Analisis *Shift Share* menggunakan variabel pendapatan, yaitu PDRB dengan Harga Konstan (Tahun 2010) pada rentang waktu tahun 2017-2021 untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh.

Tabel 2.8
Hasil Perhitungan Nilai *Shift Share* Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		Provincial Share	Proportional Shift	Differential Shift	Total perubahan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,922.75	3,181.64	(17,571.16)	18,533.23
B	Pertambangan dan Penggalian	2,627.72	234.77	(685.54)	2,176.95
C	Industri Pengolahan	27,601.63	134.23	14,286.99	42,022.85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	315.28	13.45	(39.11)	289.62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,659.65	220.45	(1,082.31)	797.79
F	Konstruksi	63,238.14	9,543.93	(29,890.36)	42,891.71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	113,498.90	21,893.24	(20,346.97)	115,045.16
H	Transportasi dan Pergudangan	65,604.18	(2,659.86)	65,458.47	128,402.79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,980.59	503.81	6,999.24	20,483.64
J	Informasi dan Komunikasi	44,657.59	16,773.47	3,304.38	64,735.43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30,151.60	4,080.36	(7,504.12)	26,727.84
L	Real Estate	13,669.94	2,009.90	(3,449.98)	12,229.86
M,N	Jasa Perusahaan	1,329.43	116.38	(374.04)	1,071.78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	33,609.00	4,585.35	(10,449.13)	27,745.22
P	Jasa Pendidikan	19,463.46	4,622.71	7,684.11	31,770.29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,467.34	2,459.93	(226.02)	9,701.26
R,S,T,U	Jasa lainnya	16,469.59	1,914.93	(3,320.99)	15,063.53

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2022 (data diolah)

Berdasarkan Tabel diatas, sektor yang memiliki *Provincial share* terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan yang terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. pertumbuhan komponen Proportional (P) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021 ternyata ada yang bernilai positif dan ada yang negatif. Nilai P positif berarti produktivitas Kota Payakumbuh pada sektor yang sama tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebaliknya apabila nilai P negatif, berarti produktivitas Kota Kota Payakumbuh pada sektor yang sama tumbuh lebih rendah dibandingkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Sektor- sektor yang memiliki nilai komponen pertumbuhan proportional positif yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan



Perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor bangunan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, sektor Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, sektor Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sektor Jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki nilai negatif adalah sektor Transportasi dan Pergudangan.

Terdapat 5 (lima) sektor dalam perekonomian Kota Payakumbuh dengan nilai *Differential* (D) positif, yaitu sektor industri pengolahan, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, dan sektor Jasa Pendidikan. Kelima sektor tersebut adalah sektor dengan pertumbuhan yang cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan (memiliki keunggulan kompetitif) dalam memacu pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh. Sedangkan 12 (dua belas) sektor lainnya memiliki nilai D yang negatif sehingga sektor - sektor tersebut pertumbuhannya lambat. Sektor-sektor tersebut bisa diamati di dalam Tabel II.8. Dilihat dari total perubahan, semua sektor positif artinya pergeseran sektor-sektor PDRB Kota Payakumbuh terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat kurun waktu tahun 2017-2021 memiliki nilai positif.

Klassen tipologi (*Typologi Klassen*) digunakan untuk mengetahui pengelompokan sektor ekonomi Kota Payakumbuh menurut struktur pertumbuhannya. Dengan menggunakan Matrik Klassen maka dapat dilakukan empat pengelompokan struktur dengan melihat laju pertumbuhan dan nilai kontribusi.

Tabel 2.9
Klasifikasi Sektor PDRB Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2021
Berdasarkan *Typologi Klassen*

<div>Kontribusi</div> <div>Laju Pertumbuhan</div>	Kontribusi Kota Lebih Besar dari Kontribusi Provinsi	Kontribusi Kota Lebih Kecil dari Kontribusi Provinsi
Laju Pertumbuhan Kota Lebih besar daripada Provinsi	Maju dan Tumbuh cepat : <ul style="list-style-type: none">- Transportasi dan Pergudangan- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum- Informasi dan Komunikasi- Jasa Keuangan dan Asuransi- Jasa Pendidikan	Maju dan Tumbuh lambat : <ul style="list-style-type: none">- Industri Pengolahan

4.



Laju Pertumbuhan Kota Lebih kecil daripada Provinsi	Potensial dan berkembang : <ul style="list-style-type: none">- Real Estate- Konstruksi- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor- Pengadaan Air; Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial- Jasa lainnya	Relatif Tertinggal : <ul style="list-style-type: none">- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan- Pertambangan dan Penggalian- Pengadaan Listrik dan Gas- Jasa Perusahaan
--	--	---

Sumber : Hasil Olahan Data, 2022)

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 5 (lima) sektor yang masuk dalam kategori maju dan tumbuh dengan cepat. Kelima sektor itu adalah Sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; sektor Informasi dan Komunikasi; sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan sektor Jasa Pendidikan. Sementara itu sektor Industri Pengolahan termasuk dalam sektor yang maju tapi tertekan (tumbuh lambat). Sedangkan untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; sektor Konstruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Real Estate; sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan sektor Jasa lainnya merupakan sektor yang potensial dan berkembang. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Pengadaan Listrik dan Gas; dan sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor yang relatif tertinggal.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana alam ataupun bencana sosial mengakibatkan penurunan pada daya dukung wilayah, dikarenakan adanya sumber daya yang rusak akibat bencana. Merujuk data topografi lahan di Kota Payakumbuh, dimana didominasi lahan yang berada pada kemiringan <2,00% atau datar dan curah hujan yang cukup tinggi, maka bencana yang cukup rawan terjadi di Kota Payakumbuh dan harus menjadi perhatian adalah bencana angin puting beliung baik itu disertai oleh hujan deras maupun tidak. Selain itu potensi bencana tanah longsor dapat terjadi di beberapa kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan. Sedangkan



ancaman bencana alam gempa bumi, Kota Payakumbuh relatif aman karena payakumbuh tidak terletak pada zona patahan, begitu juga bencana alam banjir, dan letusan gunung api.

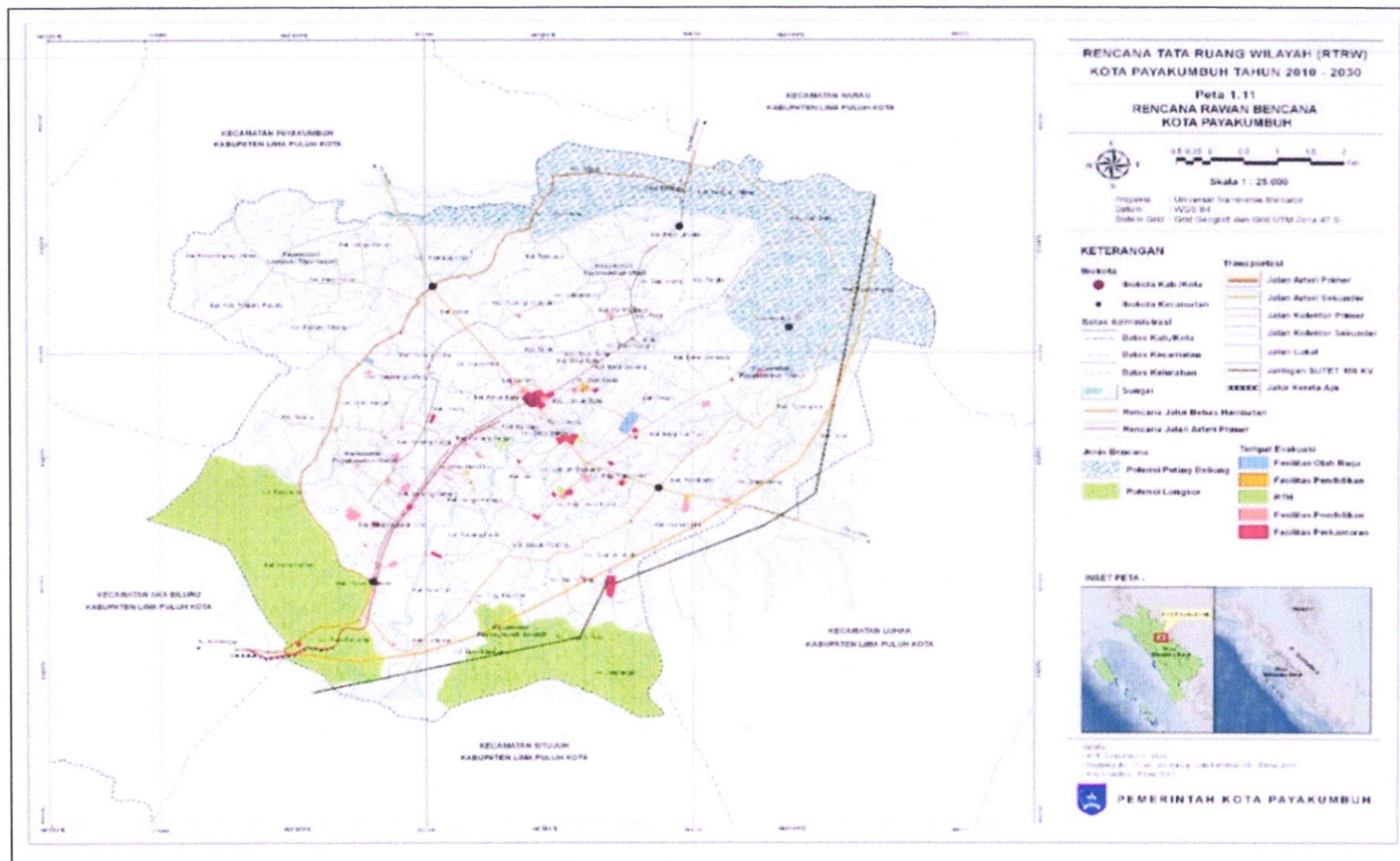
Dengan mengetahui potensi bencana tersebut, peruntukan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan lokasi pembangunan seperti pemukiman, perdagangan, pendidikan dan sebagainya; serta pengawasan dan pengendalian dari izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan untuk meminimalkan penyelewengan pembangunan dan resiko yang muncul apabila bencana terjadi. Gambar 2.5 dibawah menunjukan potensi rawan bencana yang ada di Kota Payakumbuh.

2.1.5. Demografi

Demografi menggambarkan dinamika kependudukan pada suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta perubahan dari jumlah penduduk. Secara demografi, jumlah penduduk Kota Payakumbuh sebanyak 141.184 jiwa yang terdiri dari 71.084 jiwa laki-laki dan 70.100 jiwa perempuan yang didominasi oleh usia kerja (≥ 15 tahun) sebanyak 103.582 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71.73%.

a. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kondisi kependudukan Kota Payakumbuh setiap tahun mengalami peningkatan, dimana tercatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15% pada tahun 2021. Penduduk ini bermukim tersebar pada 5 (lima) kecamatan, sehingga kepadatan penduduk pada setiap kecamatan berbeda-beda. Kondisi ini ditampilkan pada tabel 2.10 berikut.



Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kota Payakumbuh



Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Luas (Km ²)	2017		2018		2019		2020		2021	
			Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km ²)	Jumlah (Jiwa)	Density (jiwa/ km ²)
1.	Payakumbuh Barat	19,064	51.435	2.699	52.449	2.754	53.266	2.709	54.532	2.861	55.133	2.893
2.	Payakumbuh Timur	22,730	28.253	1.234	28.274	1.244	28.477	1.253	29.325	1.290	29.669	1.305
3.	Payakumbuh Utara	14,528	31.359	2.158	31.883	2.194	32.269	2.221	32.242	2,219	32.443	2.233
4.	Payakumbuh Selatan	14,683	10.775	734	11.032	751	11.406	810	11.990	817	12.205	831
5.	Lamposi Tigo Nagori	9,425	9.997	1.061	10.015	1.062	10.155	1.078	11.487	1.218	11.734	1.244
Total		80,43	131.819	1.639	133.703	1.662	135.573	1.686	139.576	1.735	141.184	1.755

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Data diatas menunjukan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 2.893jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Payakumbuh Utara dengan kepadatan sebesar 2.233 jiwa/km². Kondisi ini disebabkan oleh kedua kecamatan ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa atau daerah pusat bisnis serta pusat pemerintahan di Kota Payakumbuh. Selain dari faktor tersebut pilihan/ preferensi masyarakat terhadap lokasi pemukiman juga dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti luas daerah Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak terlalu berbeda, tetapi karena Kecamatan Payakumbuh Selatan lebih didominasi perbukitan, sehingga kecamatan Payakumbuh Utara lebih padat dibanding Kecamatan Payakumbuh Selatan.

4





b. Struktur dan Karakteristik Penduduk

1. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

Klasifikasi penduduk berdasarkan usia berguna untuk memperlihatkan karakteristik penduduk suatu daerah, dan juga untuk menunjukkan tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data pada tabel 2.11, didapatkan *dependency ratio* atau rasio ketergantungan penduduk di Kota Payakumbuh.

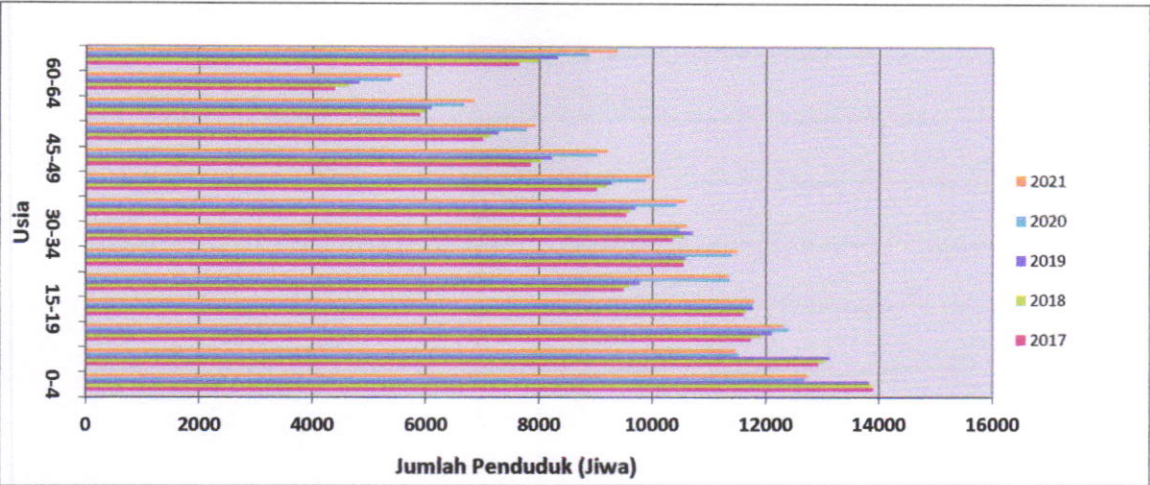
Tabel 2.11
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2017-2021

No	Kelompok Usia	2017	2018	2019	2020	2021
1.	0-4	13 898	13.858	13.825	12.682	12.728
2.	5 -9	12.927	13.041	13.126	11.521	11.467
3.	10 -14	11.730	11.912	12.104	12.392	12.284
4.	15-19	11.598	11.646	11.771	11.761	11.777
5.	20-24	9.481	9.598	9.775	11.357	11.338
6.	25-29	10.549	10.549	10.589	11.406	11.493
7.	30-34	10.350	10.535	10.705	10.459	10.606
8.	35-39	9.529	9.601	9.692	10.417	10.582
9.	40-44	9.016	9.185	9.276	9.879	10.032
10.	45-49	7.846	8.034	8.226	9.019	9.202
11.	50-54	6.997	7.128	7.269	7.758	7.923
12.	55-59	5.886	5.994	6.087	6.664	6.843
13.	60-64	4.382	4.631	4.812	5.385	5.549
14.	65+	7.630	7.991	8.316	8.876	9.360
Jumlah		131.819	133.703	135.573	139.576	141.184

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Selanjutnya jika ditampilkan dalam bentuk histogram, gambaran struktur penduduk Kota Payakumbuh dapat dilihat pada gambar 2.7 yang berkaitan erat dengan analisis tingkat ketergantungan pada struktur penduduk Kota Payakumbuh.

4.



Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

Gambar 2.7
Diagram Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

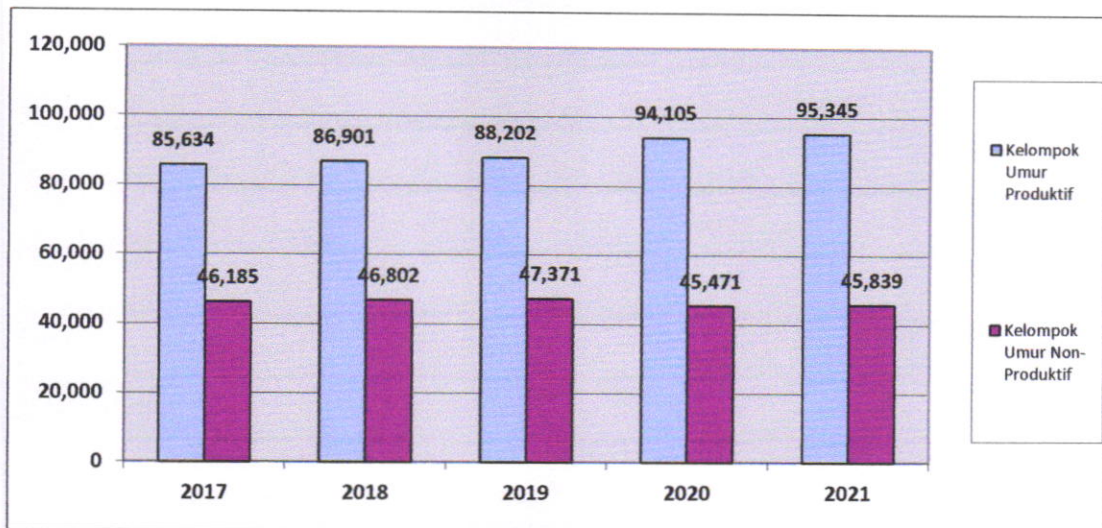
Jika memperhatikan tabel dan diagram jumlah penduduk perkelompok usia diatas, kondisi kependudukan di Kota Payakumbuh bercirikan ekspansif, dimana tingginya tingkat kelahiran dan rendahnya tingkat kematian, yang berarti kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup baik dari tahun ke tahun. Selain itu jumlah penduduk produktif (15 - 64 tahun) lebih banyak dari jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), dimana perbandingan ini akan menghasilkan rasion beban tanggungan penduduk yang ditampilkan pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Perhitungan Rasio Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2017– 2021

No	Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelompok Umur Non-Produktif	46.185	46.802	47.371	45.471	45.839
2	Kelompok Umur Produktif	85.634	86.901	88.202	94.105	95.345
3	Rasio Beban Tanggungan (:100)	54	54	54	48	48

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022 (data diolah)

Rasio yang dihasilkan pada tabel di atas menunjukkan ada penurunan rasio tanggungan antara usia non produktif dengan usia produktif dimana pada tahun 2021 rasionya 48 : 100, dimana setiap 100 jiwa usia produktif akan menanggung 48 jiwa non produktif.



Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022 (data diolah)

Gambar 2.8

Rasio Beban Tanggungan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Untuk Kota Payakumbuh, tahun 2021 rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan sebanyak adalah 101 yang komposisinya ini dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13

Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Payakumbuh Barat	25.562	25.873	26.116	26.383	26.515	26.751	27.330	27.204	27.567	27.566
2.	Payakumbuh Timur	14.041	14.212	14.065	14.209	14.175	14.302	14.825	14.500	15.001	14.668
3.	Payakumbuh Utara	15.585	15.744	15.861	16.022	16.063	16.206	16.247	15.995	16.403	16.040
4.	Payakumbuh Selatan	5.355	5.420	5.488	5.544	5.678	5.728	6.044	5.946	6.175	6.030
5.	Lamposi Tigo Nagori	4.968	5.029	4.982	5.033	5.055	5.100	5.804	5.681	5.938	5.796
Total		65.511	66.308	66.512	67.191	67.486	68.087	70.250	69.326	71.084	70.100

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022 (data diolah)

3. Struktur Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Payakumbuh pada tahun 2021 adalah 74.303 jiwa, dimana 69.498 jiwa merupakan penduduk yang sudah bekerja atau 93,53% dari angkatan



kerja. Berdasarkan tabel 2.14, sektor perdagangan masih merupakan sektor favorit yang terlihat dari meningkatnya serapan tenaga kerja pada sektor ini. Untuk tahun 2021 sektor perdagangan menyerap 64,57% dari jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut, yang melebihi setengah dari angkatan kerja aktif. Untuk sektor lainnya juga terdapat peningkatan dalam serapan tenaga kerja, yang diiringi dengan penurunan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Untuk data tahun 2021 diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	7.641	8.881	6.290	6.259	7.100
2.	Industri Pengolahan	8.598	7.687	13.682	13.891	14.419
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	26.091	27.633	43.210	44.994	47.979
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	14.082	11.143	-	-	-
5.	Lainnya	8.200	9.201	-	-	-
Jumlah yang Bekerja		64.612	64.545	63.182	65.144	69.498
Jumlah Pengangguran/ yang Mencari Kerja		2.307	2.538	2.710	4.664	4.805
Total		66.919	67.083	65.892	69.808	74.303

Sumber :Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022

4. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat partisipasi pendidikan di Kota Payakumbuh pada tabel 16 terlihat bahwa secara umum meningkat setiap jenjang pendidikan setiap tahun, ini terjadi karena peningkatan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan. Data ini juga berguna bagi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menghitung jumlah guru, sekolah dan sarana pendidikan lainnya yang berguna untuk meningkatkan SDM yang berdaya saing.

Tabel 2.15
Tingkat Partisipasi Pendidikan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2021

No	Tingkat Pendidikan	Usia (Tahun)	2017	2018	2019	2020	2021
1.	TK	5-6	5.326	5.371	5.347	5.389	2.805
2.	SD	7-12	14.675	14.853	15.097	14.528	17.185
3.	SLTP	13-15	7.026	7.118	7.205	7.166	11.591
4.	SLTA	16-18	7.058	7.105	7.150	7.171	14.435
Total			34.085	34.447	34.799	35.183	46.016

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka 2018-2022 (data diolah)

4.



Tabel 2.16
Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan		Luas Area Terbangun (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan di Area Terbangun (Jiwa/Ha)
	Perkotaan	Perdesaan		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	
Payakumbuh Barat	17		1.201,05	55.133		13.789		45,90
Payakumbuh Selatan	4	2	682,71	9.208	2.997	2.303	750	17,88
Payakumbuh Timur	9		1.432,00	29.669		7.421		20,72
Payakumbuh Utara	9		915,25	32.443		8.113		35,45
Lamposi Tigo Nagori	6		593,80	11.734		2.936		19,76
Jumlah	45	2	4.824,81	138.187	2.997	34.562	750	29,26

Sumber : Payakumbuh Dalam Angka Tahun 2022



2.1.6. Rencana Struktur Ruang Kota Payakumbuh

A. Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat pelayanan di wilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi:

- 1) Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional
- 2) Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota
- 3) Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan wilayah kota

Untuk menunjang pelayanan kota dan wilayah sekitarnya maka pusat pelayanan yang dikembangkan di Kota Payakumbuh berpola konsentrik dengan pusat pelayanan kota adalah Kawasan Pasar Payakumbuh (Pusat Kota Payakumbuh).

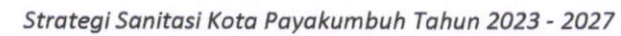
B. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

Konsep pelayanan struktur kawasan Perkotaan Kota Payakumbuh ialah dengan pola konsentrik dimana CBD (*Central Bisnis Distric*) Kota Payakumbuh merupakan pusat utama kegiatan di sekitarnya tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga dalam lingkup regional disekitarnya. Keterbatasan jumlah lahan pada pusat kota Payakumbuh menyebabkan kebutuhan dalam penyediaan lahan dalam menampung perkembangan kota yang terus meningkat. Konsep pelayanan perkotaan tersebut diwujudkan kedalam rencana struktur tata ruang kawasan dan rencana penggunaan lahan. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Untuk mengurangi beban pelayanan dan aktifitas pusat kota, maka dikembangkan 5 sub pusat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan lokal yang berwujud pasar-pasar satelit. Untuk pengembangan dan distribusi kegiatan perkotaan maka dikembangkan jalan lingkaran utara dan jalan lingkaran selatan.

Sub pusat Wilayah Pelayanan Kota Payakumbuh tersebut adalah :

- 1) Sub Pusat Pelayanan Pusat Kota Payakumbuh (SPPK I) terdapat di Kawasan Pusat Kota .
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota Payakumbuh (SPPK II) terdapat di Kawasan Payobadar.
- 3) Sub Pusat Pelayanan Timur Kota Payakumbuh (SPPK III) dengan pusat pelayanan terdapat di Payobasung
- 4) Sub Pusat Pelayanan Utara Kota Payakumbuh (SPPK IV) dengan pusat terletak di Polinyam
- 5) Sub Pusat Pelayanan Barat Kota Payakumbuh (SPPK V) dengan pusat terletak di Parit Muko Aia.
- 6) Sub Pusat Pelayanan Selatan Kota Payakumbuh (SPPK VI) dengan pusat terletak di Pakan Sinayan Koto Nan Ampek.

4.





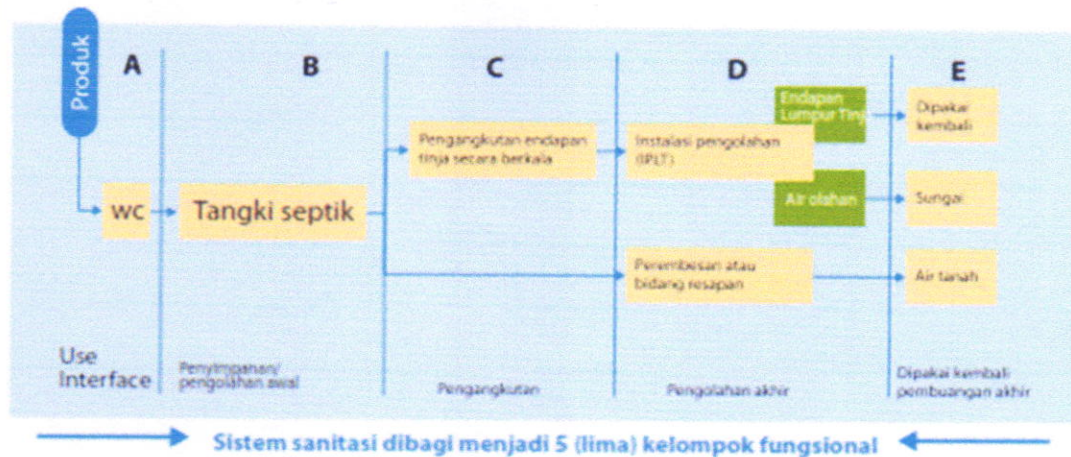
2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

Pemetaan kondisi sanitasi Kota Payakumbuh dilakukan melalui pengumpulan dan analisa data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui pelaksanaan studi *Environmental Healt Risk Assesment* (EHRA). Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Pokja PKP. Hasil pengumpulan data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisa dan dituangkan dalam bentuk gambar, tabel serta peta di dalam dokumen SSK.

Dalam rangka analisa data menghasilkan profil sanitasi, pokja PKP telah mengisi instrumen menggunakan perangkat lunak MS Excel dan diberi nama Instrumen SSK. Instrumen ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses analisa terutama terkait dengan *Output* Profil sanitasi. Instrumen ini dikembangkan menggunakan prinsip Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yaitu melakukan pemetaan sanitasi dari sumber/awal ditimbulkan sampai dengan kembali ke lingkungan.

Sanitasi adalah suatu proses multi langkah, dimana sebagian jenis limbah dikelola dari titik timbul (sumber) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Proses multi-langkah ini disebut sebagai sistem sanitasi. Sebagaimana material yang masih berharga jual, selanjutnya disebagai sebagai produk, sebab memang layak diolah dalam proses multi langkah tersebut dan menghasilkan nilai tambah. Meskipun pada awalnya, hasil proses ini harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

Dalam suatu sistem sanitasi, berbagai jenis produk mengalir melalui sistem yang terdiri dari berbagai tahapan, setiap tahap ini selanjutnya disebut sebagai kelompok fungsional, karena punya teknologinya sendiri-sendiri dengan pengelolaan yang spesifik. Kelompok fungsional ini dapat berupa pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara, ataupun pengolahan. Pada Gambar berikut memberikan contoh salah satu opsi sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat.



Gambar 2.11 Diagram Sistem Sanitasi Sektor Air Limbah (Ilustrasi)

Di setiap kelompok fungsional juga terjadi proses yang menghasilkan produk lanjutan, yang merupakan masukan (Input) untuk kelompok fungsi berikutnya. Sebagai contoh tangki septik yang berada di kelompok fungsional B akan menghasilkan air olahan tangki septik dan lumpur tinja. Lumpur tinja tersebut diangkut dengan truk tinja (kelompok fungsional C) menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di kelompok fungsional D. Sementara itu air olahan tangki septik dirembeskan melalui bidang resapan di kelompok fungsional D. Lumpur tinja yang diolah di IPLT menghasilkan produk berupa lumpur terolah (sudah aman dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali) dan dari olahan (juga sudah aman dibuang ke lingkungan/sungai) dikelompok fungsional E.

Setiap kelompok fungsional setidaknya membutuhkan satu pilihan teknologi. Proses dalam sebuah kelompok fungsional dapat berupa fisik-kimia-biologi dari limbah (misalnya proses yang terjadi di tangki septik atau IPLT), atau tidak terjadi perubahan apapun karena fungsinya hanya mengangkut (misalnya pengangkutan lumpur tinja di kelompok fungsional C). Opsi teknologi untuk air limbah, persampahan dan drainase tersier akan menjadi gambaran profil sanitasi di Kota Payakumbuh.

Peran pokja terhadap instrumen tidak hanya sebatas pada memasukkan data dan menyepakati sumber data yang digunakan, namun lebih dari itu yang perlu disepakati oleh Pokja adalah implementasi dari hasil yang dikeluarkan oleh instrumen. Strategi pembangunan sanitasi yang ditentukan selanjutnya akan tergantung dari informasi yang dihasilkan dari proses ini dengan mempertimbangkan perkembangan atas kebijakan-kebijakan baru yang ada terkait sanitasi, terutama kebijakan di tingkat pusat dan provinsi.



Adapun profil sistem sanitasi yang menjadi bahasan pada pemutakhiran stratesi sanitasi kabupaten/kota periode tahun 2023 – 2027 menitik beratkan pada sub sektor air limbah domestik dan subsektor persampahan rumah tangga yang di jelaskan pada sub bab berikut;

2.2.1. Air Limbah Domestik

Sistem air limbah domestik adalah sistem menyalurkan limbah domestik dari sisa pembangunan kamar mandi terutama dari WC/jamban/klost/tangki septik atau sesuatu yang berhubungan dengan sistem penyalurannya. Secara umum yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sistem air limbah domestik ini adalah tempat pembuangan kotoran (BAB = Buang Air Besar).

Praktik risiko turunnya status kesehatan masyarakat. Selain mencemari tanah, praktik semacam itu dapat pula mencemari air tanah sebagai sumber air minum. Maksud dari tidak memadainya sarana air limbah bukan hanya tempat pembuangan tinja ditempat yang tidak selayaknya seperti di selokan, sungai kebun dan lubang galian tetap juga sarana seperti jamban yang tidak nyaman dan tidak mempunyai saluran pembuangan serta berjarak terlalu dekat dengan sumber air.

2.2.1.1. Sistem dan Infrastruktur

Sistem dan infrastruktur air limbah didefinisikan sebagai sebuah sistem sanitasi yang digunakan oleh rumah tangga atau sekelompok rumah tangga. Dalam sistem dan infrastruktur sekelompok rumah tangga, pengelolaannya melibatkan masyarakat melalui dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Mengacu kepada definisi ini, sistem sanitasi yang dibangun Pemerintah maupun Pemerintah Daerah masuk kedalam kelompok sistem air limbah domestik skala permukiman. Sistem ini pada praktik di lapangan lebih dikenal dengan istilah sanitasi komunal/ terpusat.

Sistem dan infrastruktur air limbah berisikan informasi terkait sistem pengelolaan air limbah eksisting yang ada di Kota Payakumbuh serta jenis dan jumlah infrastruktur yang telah dibangun dan disajikan dalam bentuk DSS (Diagram Sistem Sanitasi) dan tabulasi.



- Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang memuat informasi mengenai infrastruktur pengelolaan air limbah (tangki septik individual, MCK++, IPALD, IPLT, dll) yang ada di Kota Payakumbuh. Kondisi yang digambarkan dalam DSS adalah kondisi pengelolaan air limbah saat ini, baik yang ideal maupun yang tidak ideal.
- Peta cakupan akses dan sistem layanan air limbah

Data dan informasi terkait cakupan akses per indikator dari sistem layanan air limbah domestik per kecamatan berdasarkan klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan (mengacu pada RTRW) diambil dari data-data dalam instrumen SSK.

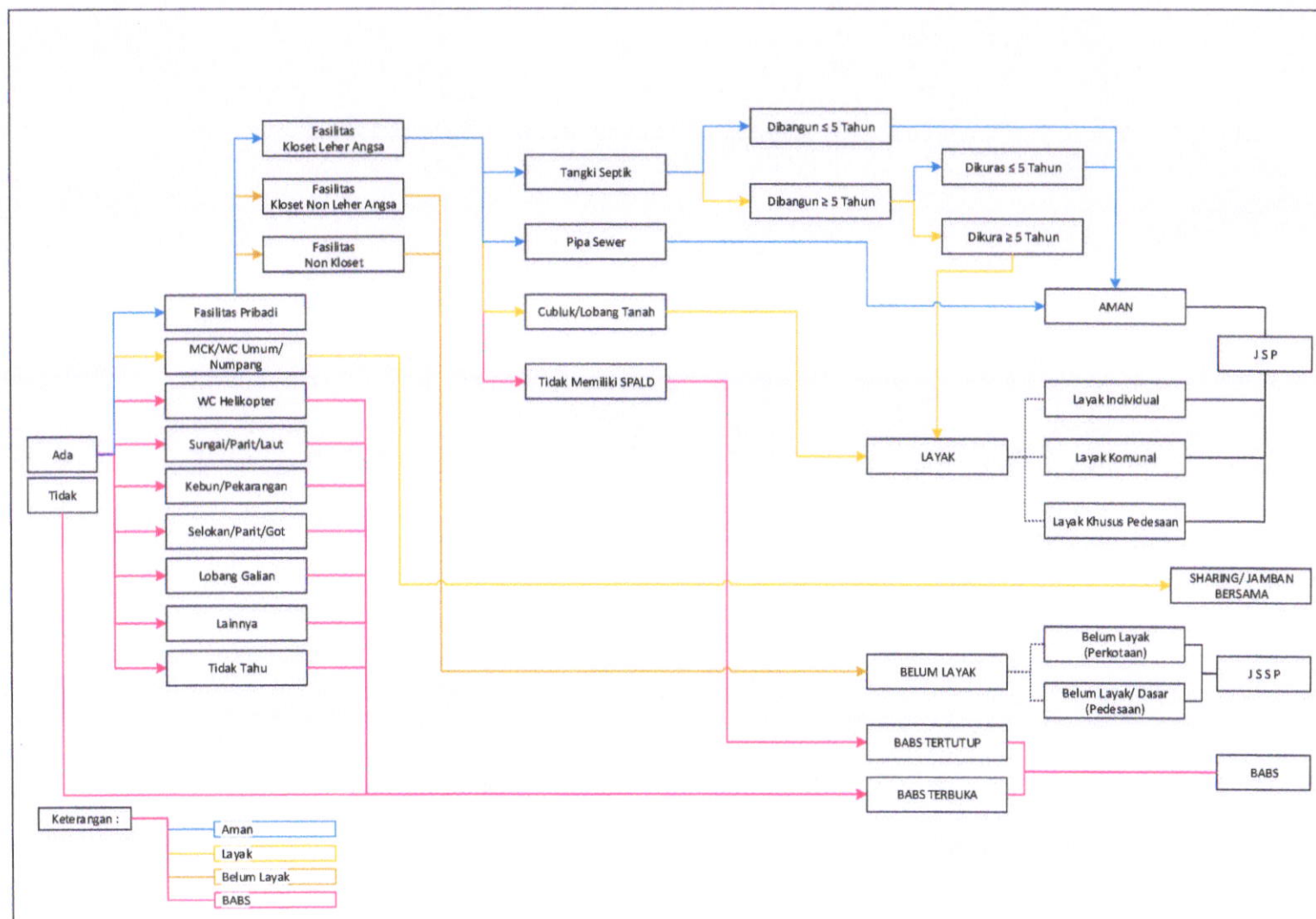
2.2.1.1.1. Capaian Akses Layanan Air Limbah Domestik Saat ini

Capaian akses layanan air limbah domestik saat ini di susun berdsarkan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), DSS pengelolaan air limbah domestik disusun untuk mengidentifikasi sistem sanitasi eksisting, permasalahan yang dihadapi dan potensi pengembangannya. Pokja PKP melakukan analisis dengan menggunakan DSS sebagai alat bantu. Pada dasarnya, melalui diagram ini Pokja akan mendapatkan gambaran lengkap tentang aliran limbah, dari sejak dihasilkan sampai dengan dibuang ke lingkungan di wilayahnya. DSS terdiri dari beberapa kolom yang merepresentasikan kelompok fungsi, dimana setiap kelompok fungsi menghasilkan Output yang akan menjadi input bagi kelompok fungsinya (instrumen SSK), yang didasarkan oleh tingkatan (*Ladder*) SDGs terdapat beberapa tingkatan yang perlu diukur dalam rangka pencapaian target SDGs.

DSS memuat informasi mengenai data infrastruktur pengelolaan air limbah (tangki septik individual, MCK++, IPALD-S/ IPALD-T, IPLT, dll) yang ada di Kota Payakumbuh. Adapun hasil DSS Kota Payakumbuh yang di kompilasi dari dari berbagai sumber data (Data Primer, Data Sekunder, Persepsi OPD) yaitu :



Gambar 2.12 Diagram Sistem Sanitasi (DSS) Sub Sektor Air Limbah Domestik





Tabel 2.17
Ladder SDGs dan Definisi Akses Sanitasi di Indonesia

Ladder SDGs	Adaptasi Indonesia	Definisi yang Digunakan di Indonesia	Ladder Adaptasi Indonesia dalam Metadata SDGs
SAFELY MANAGE	AKSES AMAN	Akses Aman Terpusat ; a. Pembangunan fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri . b. Bangunan atas : jenis kloset menggunakan leher angsa c. Bangunan bawah : Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	Akses Sanitasi Amam Sistem Terpusat
		Akses Aman Setempat : a. Pengguna fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri b. Bangunan atas : jenis kloset menggunakan leher angsa c. Bangunan bawah : tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir*	Akses Sanitasi Aman Sistem Setempat
BASIC	AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI	Perkotaan dan Perdesaan : a. Pengguna fasilitas sanitasi : Rumah tangga sendiri b. Bangunan atas : jenis kloset menggunakan leher angsa c. Bangunan Bawah : Tangki septik tidak disedot/ disedot kurang dari 1x dalam 5 tahun*	Akses Sanitasi Layak
		Fasilitas Sanitasi dengan Lubang tanah di Perdesaan : d. Penggunaan fasilitas sanitasi : Rumah tangga sendiri e. Bangunan atas : Jenis kloset enggunakan leher angsa f. Bangunan bawah : Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan Lubang Tanah	
SHARED	AKSES SANITASI LAYAK BERSAMA	Perkotaan dan Perdesaan a. Penggunaan fasilitas sanitasi : Rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu b. Bangunan atas : Jenis kloset leher angsa c. Bangunan bawah : ▪ Tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir* atau ▪ Sistem pengolahan air limbah (SPAL) d. Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah di perdesaan : Pengguna fasilitas sanitasi : rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu e. Bangunan atas : Jenis kloset menggunakan leher angsa f. Bangunan bawah ; tempat pembuangan akhir tinja menggunakan Lubang Tanah	

4.



Ladder SDGs	Adaptasi Indonesia	Definisi yang Digunakan di Indonesia	Ladder Adaptasi Indonesia dalam Metadata SDGs
UNIMPROVED	AKSES BELUM LAYAK	Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perdesaan : a. Pengguna fasilitas sanitasi : sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu b. Bangunan atas : Jenis kolset menggunakan Leher Angsa c. Bangunan Bawah : Tempat pembuangan akhir tinja menggunakan Lubang Tanah	(tidak dilaporkan dalam SDGs)
		Perkotaan dan Perdesaan : a. Pengguna fasilitas sanitasi : Sendiri atau digunakan bersama b. Bangunan atas : Jenis kolset menggunakan pelengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/ cemplung c. Bangunan bawah : tangki septik, IPAL dan/ atau lubang tanah.	
		Fasilitas Umum : Penggunaan fasilitas sanitasi di MCK umum/ siapapun menggunakan	
	DIRECT DISCHARGE/ BABS TERTUTUP	Pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya	
OPEN DEFECACTION	BUANG AIR BESAR SEMBANGAN (babs) DI TEMPAT TERBUKA	Memiliki fasilitas sanitasi tapi tidak menggunakan atau tidak memiliki fasilitas sendiri	(tidak dilaporkan dalam SDGs)

Keterangan; *) Berdasarkan Permen PUPR No. 4/PRT/M/2017, penyedotan lumpur tinja dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali, namun dalam kuesioner Susenas saat ini masi tercantum 5 (lima) Tahun.

Dari Diagram Akses Sistem Sanitasi (DSS) sub-sektor air limbah domestik di atas didapat gambaran umum yang menunjukkan kondisi akses pelayanan air limbah domestik di Kota Payakumbuh. Gambaran akses dan sistem layanan tersebut memberikan informasi mengenai sebaran penggunaan/pengolahan data sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Payakumbuh. Dari gambaran umum dan data yang didapat (Studi EHRA = Data Primer dan Data Sekunder), dengan mempergunakan tool analisa instrumen SSK menghasilkan *output*

4.



cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik di Kota Payakumbuh dan dapat dilihat pada tabel 2.18. dibawah ini;

Tabel 2.18
Rekapitulasi Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Akses Aman	%	13,38
2	Akses Layak	%	90,67
	- Akses Layak Individu	%	74,86
	- Akses Layak Bersama	%	2,43
	- Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	%	0,00
3	Belum Layak	%	9,33
4	BABS di Tempat Terbuka	%	0,00
	Total : (2+3+4)	%	100,00

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel diatas diperoleh informasi dimana 90,67% rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh memiliki akses layak, yang merupakan hasil penjumlahan dari akses aman sebesar 13,38%, akses layak individu sebesar 74,86% akses layak bersama sebesar 2,43% dan akses layak khusus perdesaan sebesar 0,00%.

Melihat dari rekapitulasi capaian akses sistem pengelolaan air limbah domestik di atas, disimpulkan total akses air limbah domestik di Kota Payakumbuh adalah sebesar 90,67% termasuk 9,33% komponen SPALD yang belum layak dan tidak ada atau 0,00% dari rumah tangga belum memiliki akses jamban (BABS ditempat terbuka).

Berdasarkan permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 capaian akses capaian sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Payakumbuh ini dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi wilayah, yaitu klasifikasi Urban (perkotaan) sejumlah 97,88% dan rural (perdesaan sejumlah 2,12% dari total populasi Kota Payakumbuh. Pembagian klasifikasi wilayah ini berguna untuk penerapan zona sistem dalam pengelolaan air limbah di Kota Payakumbuh nantinya. Adapun tabulasi hasil dari pembagian capaian sistem air limbah di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.19.



Tabel 2.19
Capaian Akses Air Limbah Domestik Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

No.	Komponen	Deskripsi	Jumlah
Wilayah Perkotaan			
A	Akses Aman	%	13,28
B	Akses Layak (Termasuk Akses Aman)		
	Akses Layak Individu	%	72,93
	Akses Layak Bersama	%	2,43
C	Akses Belum Layak*	%	9,25
D	BABS di Tempat Terbuka	%	0,00
Wilayah Perdesaan			
A	Akses Aman	%	0,10
B	Akses Layak (Termasuk Akses Aman)		
	Akses Layak Individu	%	1,93
	Akses Layak Bersama	%	0,00
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	%	0,00
C	Belum Layak	%	0,08
D	BABS di Tempat Terbuka	%	0,00

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel di atas dengan mengacu pada proporsi jumlah penduduk yang ada di perkotaan dan perdesaan yang telah dijelaskan di atas, disimpulkan komponen akses layak pada wilayah perkotaan adalah sebesar 72,93% (termasuk akses aman), dan perdesaan sebesar 2,03% (termasuk aman).

2.2.1.1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sampai dengan saat ini Kota Payakumbuh memiliki 1 (satu) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, dengan luas lahan sebesar 5.537 m2, dengan kapasitas 15 m3/hari, adapun sarana dan prasarana yang ada pada IPLT Sungai Durian ini dapat dilihat pada tabel berikut;

4.



Tabel 2.20
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

No	Deskripsi	Satuan	IPLT
A.	IPLT Sungai Durian		
1	Status aset	• Serah Terima Operasional	
2	Kapasitas IPLT	M3/ Hari	15
3	Tahun pembangunan	Tahun	1997
4	Tahun rehabilitasi	Tahun	2020
B.	Wilayah Cakupan Pelayanan		
		Kota Payakumbuh	
5	Wilayah Layanan terdekat	Km	1
6	Wilayah layanan terjauh	Km	12
C.	Deskripsi IPLT		
7	Sistem yang digunakan	SSC	
8	Kondisi IPLT	Baik	
9	Kualitas efluen	Baik	
10	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Lengkap	
11	Kondisi jalan akses	Betonisasi	

Sumber : Data Dinas PRKP Kota Payakumbuh



Gambar 2.13 IPLT Sungai Durian Kota Payakumbuh Tahun 2022



Armada truk tinja ada 4 (empat) unit mobil tinja. Kapasitas truk tinja ini adalah 4 m3. Armada inilah yang digunakan untuk melayani masyarakat dalam hal penyedotan WC dan dibuang ke IPLT dengan perincian sebagai berikut;

Tabel 2.21
Sub-sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
A.	Milik Pemerintah Daerah		
1	Jumlah truk tinja	Unit	4 (empat)
2	Kondisi		Beroperasional
3	Kapasitas tangki truk tinja	M3	4
4	Volume Lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	12
5	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/ Hari	4
	Rata-rata terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/ Hari	4
B.	Milik Swasta (Belum Ada)		

Sumber: Data Dinas PRKP Kota Payakumbuh



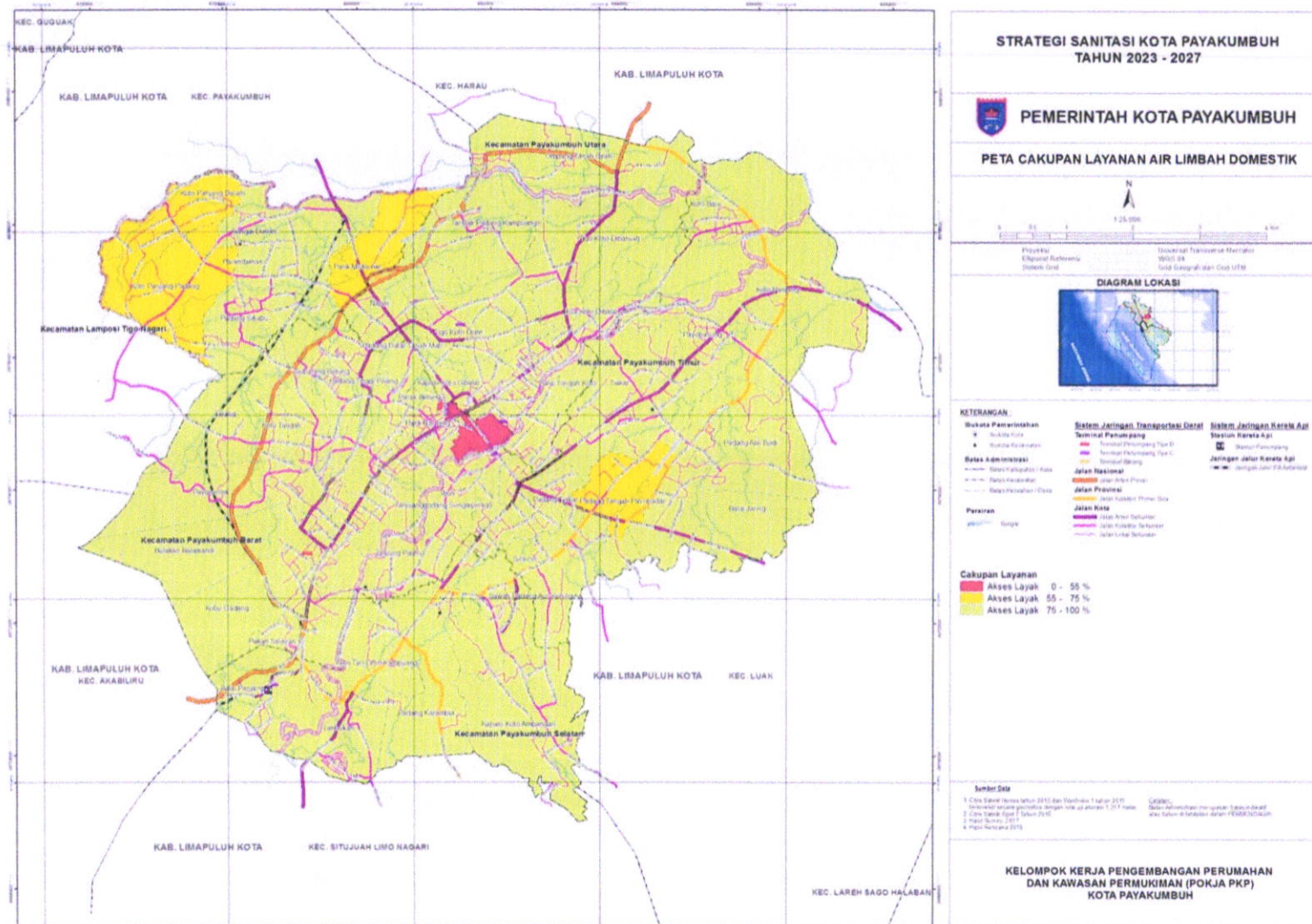
Gambar 2.14 Truk Tinja Kota Payakumbuh Tahun 2022

Tabel 2.22
Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

Nam a IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pem bangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (Baik/Rusak)	Pengelola (Dinas/UP TDI masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/tidak dilakukan)	Status Aset
Tidak Ada										

Sumber: Data Dinas PRKP Kota Payakumbuh

Di Payakumbuh tidak ada sub sistem layanan dan pengolahan SPALD-terpusat



Gambar 2.15 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik



2.2.1.2. Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020 -2024

Analisis gap pencapaian akses air limbah domestik dilakukan berdasarkan hasil analisis Instrumen SSK. Hasil analisis instrumen SSK merupakan input untuk tahapan pengembangan sanitasi jangka waktu 5 (lima) tahun atau jangka menengah dan 2 (dua) tahun atau jangka pendek. Dalam penentuan target tahapan pengembangan air limbah domestik tersebut mengacu kepada target yang sudah ditetapkan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kota seperti RPJMN 2020-2024. Di dalam target RPJMN, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses penduduk terhadap air limbah (wilayah perkotaan) menjadi 100%. Pada sektor air limbah domestik ini, target 100% akses air limbah domestik dijabarkan menjadi 85% akses layak dan 15% akses aman, target nasional tersebut didistribusikan ke provinsi dan selanjutnya dijabarkan ke tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Komponen pengelolaan air limbah domestik berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017 terdiri dari Komponen akses aman, akses layak (Individu, layak bersama, dan layak khusus perdesaan), akses belum layak dan belum punya akses (BABS), dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pembangunan air limbah serta gap yang harus dipenuhi dapat dilihat pada tabel 2.23.



Tabel 2.23
Gap Capaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 Jangka Menengah		Target Jangka Pendek	Capaian Tahun 2022 (%)	GAP Terhadap Target 2027 (%)	GAP Terhadap Target Jangka Pendek (%)
			Provinsi Sumatera Barat (%)	Kota Payakumbuh (%)	Kota Payakumbuh (%)			
1	Akses Aman	15,0	9,0	26,8	22,6	13,38	13,46	9,17
2	Akses Layak	85,0	85,0	100,0	100,0	90,67	9,33	9,33
	- Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0,0	0,0	72,7	75,0	74,86	-2,13	0,16
	- Akses Layak Bersama	0,0	0,0	0,4	2,4	2,43	-2,00	0,00
	- Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Belum Layak	0,0	0,0	0,0	0,0	9,33	-9,33	-9,33
4	BABS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (2+3+4)			100,0	100,0	100,0		

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022



Dari tabulasi gap capaian akses air limbah domestik terhadap target yang didistribusikan oleh Provinsi Sumatera Barat di atas, Kota Payakumbuh melalui Pokja PKP menargetkan untuk akses layak pada jangka pendek akan meningkatkan capaian akses layak menjadi 100,0 dari 90,67 yang telah dicapai pada tahun 2022, dengan gap yang harus dipenuhi dalam 2 tahun kedepan sebesar 9,33%.

Untuk jangka menengah (tahun 2027) dalam pencapaian target Kota Payakumbuh menargetkan sebesar 100,0 akses layak, jika dilihat dari kondisi eksisting yang ada berarti terdapat gap 9,33% yang nantinya akan dipenuhi Kabupaten dalam pencapaian target tersebut.

2.2.1.3. Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

Analisis utilisasi infrastruktur eksisting air limbah domestik bertujuan untuk menentukan kondisi eksisting dari infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kota Payakumbuh. Analisis ini merupakan imput dari primer dan sekunder seperti; ketersediaan layanan, data umum wilayah, cakupan akses (SPALD-S dan SPALD-T), serta data layanan penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja telah tersedia di berbagai dinas (OPD). Data tersebut sebagian telah dimasukkan ke dalam instrumen Rantai Layanan Air Limbah Domestik dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam analisis Kebutuhan Infrastruktur dan pendanaan. Adapun hasil dari tabulasi data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.24
Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

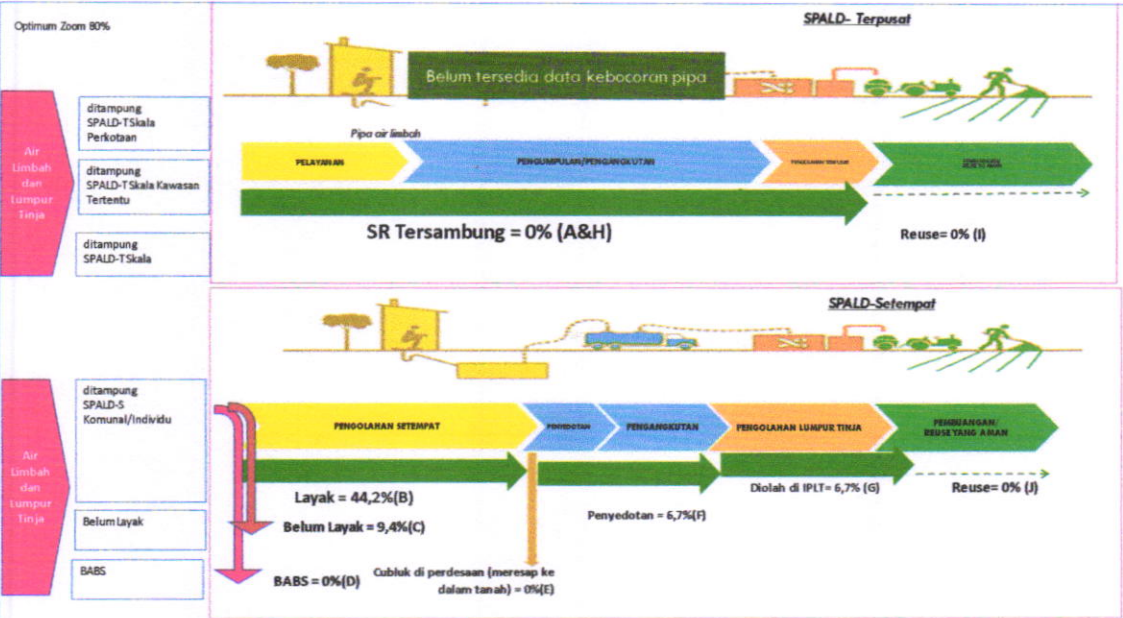
Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan (<i>utilization capacity</i>) IPLT	66,67
Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) truk	50,00
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (<i>desain</i>)	88,89
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	10,83
Kapasitas IPLT terhadap total RT	9,63
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	0,00
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	0,00
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	0,00

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022



2.2.1.4. Analisis Rantai Layanan Air Limbah Domestik

Analisis rantai layanan air limbah domestik merupakan *output* dari instrumen SSK yang merupakan hasil perhitungan dari langkah *penginputan* data umum dan data pengelolaan air limbah domestik, identifikasi gap capaian akses terhadap target SDGs, *input* data subsistem pengangkutan lumpur tinja dan data subsistem pengangkutan dan pengolahan untuk SPALD-S dan SPALD-T serta analisis keberfungsian sarana dan prasarana yang ada di Kota Payakumbuh. Adapun diagram alur rantai layanan air limbah domestik di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada gambar berikut :



A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	DPUPR	0,00%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	DPUPR	0,00%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	DPUPR	0,00%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	DPRKP	44,20%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	9,40%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	0,00%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	DPRKP	6,70%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	DPRKP	6,70%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	DPRKP	0,00%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	0,00%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

Gambar 2.16 Rantai Layanan Air Limbah Domestik Kota Payakumbuh



2.2.1.5. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

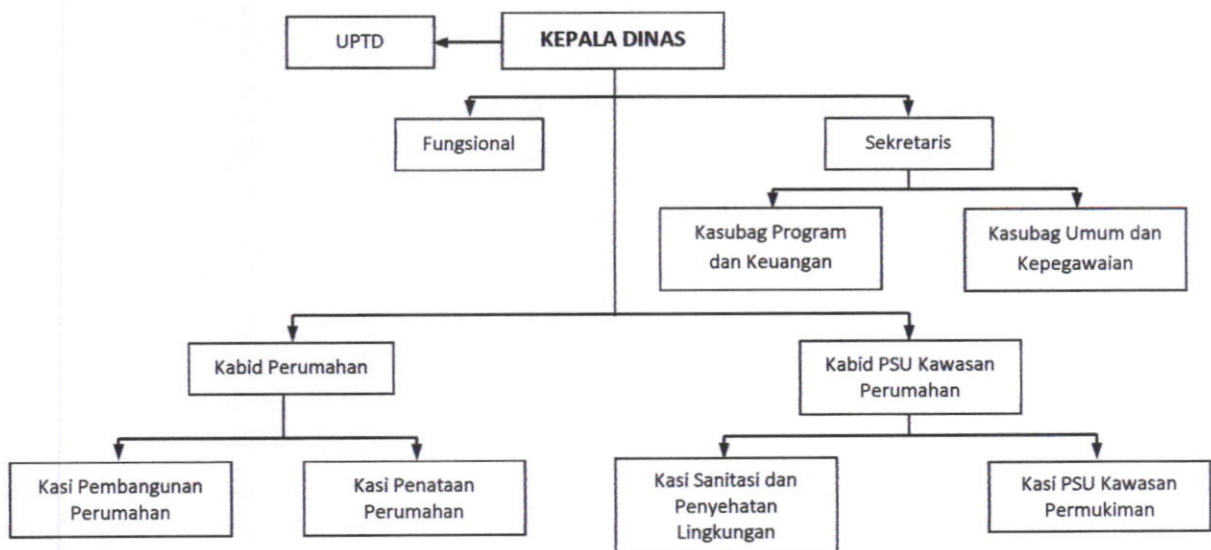
❖ Kelembagaan Pemerintah Daerah

Secara teknis Kelembagaan Pemerintah Kota Payakumbuh yang menangani dan terkait dalam pengelolaan limbah domestik adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Tugas dan kewenangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Bidang PSU Kawasan Permukiman dan berada pada seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan. Adapun tugas dan kewenangan seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan dalam hal ini adalah :

1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Sub Bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan
2. Penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan

Adapun bagan strutur organisasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.17 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh



Tabel 2.25
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL• Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja• Mengelola IPLT dan atau IPAL• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja• Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB• Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik
Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik
Bappeda	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik



Tabel 2.26
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	BAPPEDA, DINAS PKP, DINKES		
• Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	BAPPEDA, DINAS PKP, DINKES		
• Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA, DINAS PKP, DINKES		
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	DINAS PKP		
• Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	DINAS PKP		
• Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	DINAS PKP		
• Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	DINAS PKP		
• Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	DINAS PKP		
PENGLOLAAN			
• Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	DINAS PKP		
• Mengelola IPLT dan atau IPAL	DINAS PKP		
• Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	DINAS PKP		
• Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	DINAS PKP		
• Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	DINAS PKP		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
• Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	DINAS PKP		
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestic	DINAS PKP, DINKES, DINKOMINFO		
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah Domestic	DINAS PKP, SATPOLPP		



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	BAPPEDA, DINAS PKP, DINKES		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	DINAS PKP		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	BAPPEDA, DINAS PKP		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	DINAS PKP, DINKES		

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

Tabel 2.27
Data Lembaga Pengelola/kelompok masyarakat dalam pengelolaan air limbah

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tidak Ada								
2									
3									
4									
5									

Di Kota Payakumbuh tidak terdapat lembaga pengelola/kelompok masyarakat yang mengelola air limbah domestik.



Tabel 2.28
Pemetaan Pemangku Kepentingan Pengelolaan Air Limbah Domestik
di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/ Sumberdaya
▪ Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">- Legislasi- Penganggaran- pengawasan	<ul style="list-style-type: none">- Tim anggaran terkait alokasi APBD- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah domestik
Pengusaha/ Swasta <ul style="list-style-type: none">- Belum teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik dalam rangka penuntasan akses air limbah di Kota Payakumbuh
▪ Baznas (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	<ul style="list-style-type: none">- Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi
<ul style="list-style-type: none">- Forum komunikasi Da'i Sanitasi (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	<ul style="list-style-type: none">- Mendukung program BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZISWAF	<ul style="list-style-type: none">- Avokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

Tabel 2.29
Kontribusi, Keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Air Limbah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
▪ Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD- Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No . 17 Tahun 2014 Tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha/ Swasta <ul style="list-style-type: none">- Belum teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Ya



Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
▪ Baznas (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI No. 001/MUNAS IX/MUI/2015. Tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat	Sedang	Sedang	Ya
- Forum komunikasi Da'i Sanitasi (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist		Sedang	Sedang	Ya

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

Dengan adanya legitimasi di atas sudah seharusnya Pemerintah Kota dapat memanfaatkan regulasi yang ada di atas untuk memenuhi target dan capaian pengelolaan air limbah domestik di Kota Payakumbuh ke depannya.

❖ Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sampai dengan saat ini di Kota Payakumbuh belum memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur dan mengakomodir dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Adapun hasil dari pemetaan regulasi air limbah domestik di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Alat Bantu Pemetaan Regulasi-Air Limbah Domestik Kota Payakumbuh

No	Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik			KETERANGAN
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak	Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik sedang dalam Harmonisasi Kemenkumham
			Belum Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Perwako No. 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.			



No	Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik			KETERANGAN
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik			
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T			
b	Substansi pengaturan : Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi			
c	Substansi pengaturan : kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan			
d	Substansi pengaturan : pembinaan dan pengawasan			
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?			
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada			
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum			

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

Tabel 2.31
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (air limbah)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelengaraaan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	2021	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan Meningkatkan Kegiatan PHBS di Sekolah dan Rumah Tangga	Sekolah dan Rumah tangga di area beresiko sanitasi	Kepedulian pada sanitasi dan PHBS akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2022

4.



Tabel 2.32
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait air Limbah Domestik

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7
	Tidak Ada					

Tidak ada kegiatan media komunikasi dan kerjasama terkait air limbah domestik di Kota Payakumbuh.

2.2.2. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2.2.2.1. Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah merupakan hasil dari aktivitas masyarakat dengan banyak sampah yang dihasilkan per orang per hari dalam satu tahun volume mapun berat dan pada tempat-tempat pelayanan umum atau tempat komersial lainnya, dimana timbulan sampah dari sumbernya disini digolongkan dengan dua jenis yaitu ;

1. **Sampah Domestik** yaitu sampah yang dihasilkan dari aktifitas rumah tangga;
2. **Sampah Non Domestik** yaitu sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat pelayanan umum seperti dari pasar, perkantoran, jalan raya dan aktivitas komersial lainnya

Jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kota Payakumbuh selalu meningkat setiap tahunnya dengan komposisi jenis sampah yang beragam. Tahun 2021, total timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan Kota Payakumbuh adalah 36.052 ton/tahun atau 98,78 ton/hari atau rata-rata 0,70 kg/orang/hari. Timbulan sampah rumah tangga kawasan perkotaan sebesar 96,68 ton/hari dan timbulan sampah rumah tangga di kawasan perdesaan sebesar 2,1 ton/hari.



Tabel 2.33
Timbulan Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	98,78
	Perkotaan	ton/hari	96,68
	Perdesaan	ton/hari	2,1
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% oragnik	60
		% anorganik	40

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, Tahun 2022

2.2.2.2. Sistem dan Infrastruktur

Sistem dan infrastruktur persampahan digambarkan melalui sistem pengelolaan persampahan eksisting yang ada, baik dari sistem capaian cakupan layanan maupun profil infrastruktur persampahan yang ada di Kota Payakumbuh saat ini, yang disajikan dalam bentuk diagram dan tabulasi.

2.2.2.2.1. Capaian Akses Layanan Persampahan Saat Ini

Capaian akses layanan persampahan menggambarkan kondisi pelayanan persampahan di Kota Payakumbuh (wilayah perkotaan). Capaian tersebut memberikan informasi sistem penanganan timbulan sampah beserta nilai persentase penduduk saat ini (eksisting), deliniasi sistem penanganan timbulan sampah ini dibatasi berdasarkan klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan. Adapun capaian akses layanan persampahan pada wilayah perkotaan di Kota Payakumbuh saat ini yang diperoleh dari analisis instrumen SSK (*imputing* data studi EHRA dan data sekunder) dapat dilihat pada tabel 2.34

Tabel 2.34
Rekapitulasi Capaian Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	9,4
2	Penanganan Sampah	76,8
3	Sampah Tidak Terkelola	13,8
Total		100,0

Sumber : Instrumen SSK, Tahun 2022

4.



Tabel 2.33
Timbulan Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2022

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	98,78
	Perkotaan	ton/hari	96,68
	Perdesaan	ton/hari	2,1
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% oragnik	60
		% anorganik	40

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, Tahun 2022

2.2.2.2. Sistem dan Infrastruktur

Sistem dan infrastruktur persampahan digambarkan melalui sistem pengelolaan persampahan eksisting yang ada, baik dari sistem capaian cakupan layanan maupun profil infrastruktur persampahan yang ada di Kota Payakumbuh saat ini, yang disajikan dalam bentuk diagram dan tabulasi.

2.2.2.2.1. Capaian Akses Layanan Persampahan Saat Ini

Capaian akses layanan persampahan menggambarkan kondisi pelayanan persampahan di Kota Payakumbuh (wilayah perkotaan). Capaian tersebut memberikan informasi sistem penanganan timbulan sampah beserta nilai persentase penduduk saat ini (eksisting), deliniasi sistem penanganan timbulan sampah ini dibatasi berdasarkan klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan. Adapun capaian akses layanan persampahan pada wilayah perkotaan di Kota Payakumbuh saat ini yang diperoleh dari analisis instrumen SSK (*imputing* data studi EHRA dan data sekunder) dapat dilihat pada tabel 2.34

Tabel 2.34
Rekapitulasi Capaian Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	9,4
2	Penanganan Sampah	76,8
3	Sampah Tidak Terkelola	13,8
Total		100,0

Sumber : Instrumen SSK, Tahun 2022

4.



No	Uraian	Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah perkotaan	35.286,60	100,00%
B	Jumlah Sampah Tereduksi di TPS 3R	-	0,00%
C	Jumlah sampah tereduksi di Bank Sampah	3.333,08	9,45%
D	Jumlah sampah terolah di TPST	3.574,96	10,13%
E	Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA	-	0,00%
G	Jumlah residu TPST yang masuk dan diproses di TPA	-	0,00%
H	Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah - TPA) dan pengumpulan tidak langsung (Rumah - TPS - TPA)	23.527,30	66,67%
I	Jumlah residu TPS 3R yang tidak terkelola	-	0,00%
K	Jumlah residu TPST yang tidak terkelola	-	0,00%
L	Jumlah total sampah diproses di TPA	23.527,30	66,67%
M	Jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga)	4.851,27	13,75%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

Gambar 2.18 Rantai Layanan Persampahan Kota Payakumbuh



2.2.2.2.2. Kondisi Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pelayanan Persampahan

a. Pewadahan (User Interface)

Pewadahan atau user interface adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan ke tempat penampungan sampah sementara (TPS), diangkut dan selanjutnya dibuang ke tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Adapun pewadahan yang ada di Kota Payakumbuh khususnya pada wilayah dengan klasifikasi perkotaan dan dalam jangkauan pelayanan persampahan oleh pemerintah dilakukan dengan cara berupa tong sampah.

b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)

Tempat penampungan sampah sementara (TPS) ini merupakan suatu wadah sebagai penampungan sampah sementara sebelum diangkut/diantarkan ke tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA). Dimana tempat penampungan ini terdiri dari;

1. Bak Sampah

Tempat penampungan sementara yang berupa tong-tong yang terbuat dari fiber dan kaki terbuat dari pipa besi, drum yang dibagi dua bagian dan diberi kaki penyangga dari pipa besi serta yang terbuat dari kayu, penempatannya berada di fasilitas umum, perkantoran atau pun petokoan.

2. Kontainer

kontainer ini bergungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, baik yang ditempatkan masyarakat maupun petugas kebersihan. Lokasi penempatan bak kontainer berada pada titik tertentu seperti dekat permukiman penduduk, pasar, ataupun tempat-tempat fasilitas umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

c. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan, atau langsung dari sumber sampah menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA). Persyaratan moda pengangkut ini diantaranya, harus dilengkapi penutup sampah, minimal dengan jaring, tinggi bak maksimum 1,6 m sebaiknya ada alat ungkit, kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui, dan tidak mengalami kebocoran air sampah saat diangkut.

Dalam pelaksanaannya, pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh memiliki moda pengangkut sampah berupa dump truk untuk



mengangkut sampah dari area timbulan sampah yaitu lokasi perumahan, perkantoran, pasar dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya baik diambil dari TPS maupun yang ada didepan rumah penduduk sepanjang rute yang dilalui, yang nantinya sampah tersebut akan dibawa ke TPA. Adapun jumlah dan kondisi sarana dan prasarana persampahan yang ada di Kota Payakumbuh adalah ;

Tabel 2.35
Sub Sistem Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	88
	Pick Up	unit	2
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Perkotaan	m3	0
	Perdesaan	m3	132
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	m3	8
3	Ritase	Rit/hari	2

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, Tahun 2022

Tabel 2.36
Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	3
	TPS	unit	8
	Kontainer	unit	5
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	70
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	70
	TPS	m3	6
	Kontainer	m3	8
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	1
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	6
	Dump Truk	unit	18



No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	36
	Dump Truk	m3	108
	Pick Up	m3	0
5	Ritasl Pengangkutan	rit/hari	3

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, Tahun 2022



Gambar 2.19 Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Kota Payakumbuh Tahun 2022



Tabel 2.37
Sub Sistem Pengolahan Persampahan Kota Payakumbuh

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Persentase Luas instalasi terhadap luas lahan total (%)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan / dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	Tidak Ada												

Kota Payakumbuh tidak memiliki sub sistem pengolahan persampahan



d. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

Dalam pemrosesan akhir sampah, Kota Payakumbuh menggunakan TPA Regional Payakumbuh yang dikelola oleh UPT TPA Regional di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lokasi TPA Regional Payakumbuh terletak di Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Selatan. TPA Regional Payakumbuh ini melayani 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota. TPA Tegal Payakumbuh mulai dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2011. Luas Lahan TPA Regional Payakumbuh yaitu 2,7 ha. TPA Regional Payakumbuh ini beroperasi dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill*.

Tabel 2.38
Sub Sistem Pemrosesan Akhir Sampah - TPAS Regional Payakumbuh

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TPA Regional Kota Payakumbuh		Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Payakumbuh Selatan
	Wilayah Pelayanan		Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam,
2	Tahun pembangunan		2009-2011
	Tahun Optimalisasi		
	Usia Pakai TPA (tahun)		
3	Status aset (pilih salah satu)	Sudah	
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	2,7
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	2,7
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Sanitary Landfill
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 2 Ekxcavator : 2
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	Ada
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	220
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	

4.



13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	
14	Listrik	Gwh/hari	
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)		Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, Tahun 2022



Gambar 2.20 TPA Regional Payakumbuh Tahun 2022

e. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah di Kota Payakumbuh dilakukan di Bank Sampah dan sektor informan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

4.



Tabel 2.39 Pengurangan Sampah Kota Payakumbuh

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Bank Sampah	PAYOBASUNG	Beroperasi	2020		Daur Ulang	0,004	0,004	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
2	Bank Sampah	BALAI JARING	Beroperasi	2021		Daur Ulang	0,006	0,006	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
3	Bank Sampah	PADANG TINGGI PILIANG	Beroperasi			Daur Ulang	0,004	0,004	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
4	Bank Sampah	SUBARANG BATUANG	Beroperasi	2014		Daur Ulang	0,004	0,004	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
5	Bank Sampah	BULAKAN BALAI KANDI	Beroperasi	2020		Daur Ulang	0,001	0,001	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
6	TPS 3R	TPS3R Buah (Kotokaciak Kubu Tapakrajo)	Beroperasi	2007		Daur Ulang	0,092	0,092	0	Seksi	Sudah
7	TPS 3R	TPS3R Limbukan (Limbukan)	Beroperasi			Daur Ulang	0,043	0,043	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
8	TPS 3R	TPS3R Sejahtera (Koto Tuo Limo Kampuang)	Beroperasi			Daur Ulang	0,03	0,03	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah



No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
9	TPS 3R	TPS3R Mancang Labu (Payobasuang)	Beroperasi	2014		Daur Ulang	0,034	0,034	0	Seksi	Sudah
10	TPS 3R	TPS3R Pasar Berkah (Kapalo Koto Dibalai)	Beroperasi			Daur Ulang	0,024	0,024	0	Seksi	Sudah
11	TPS 3R	TPS3R Edukasi (Bulakan Balai Kandih)	Beroperasi	2019		Daur Ulang	0,017	0,017	0	Seksi	Sudah
12	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	PADANG DATAR TANAH MATI	Beroperasi			Daur Ulang	11,000	11,000	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
13	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	PADANG KARAMBIA	Beroperasi			Daur Ulang	3,015	2,975	0,04	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, Tahun 2022



2.2.2.3. Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan

Penentuan tahapan pencapaian dan pengembangan sektor persampahan dilakukan berdasarkan hasil analisis instrumen SSK.

Tabel 2.40
Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2027 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2022	GAP (%) Terhadap Target 2027	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	80,0%	78,5%	76,81%	3,19%	1,69%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	20,0%	17,0%	9,45%	10,55%	7,55%

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, Tahun 2022

Dari tabulasi tabel gap capaian pelayanan persampahan terhadap target yang didistribusikan provinsi Sumatera Barat diatas, Kota Payakumbuh melalui Pokja PKP menargetkan sebesar 78,5% untuk jangka pendek dan 80% untuk jangka menengah dalam penanganan timbulan sampah perkotaan yang ada di Kota Payakumbuh dengan sistem pelayanan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Jadi masih terdapat gap terhadap pencapaian target baik untuk jangka pendek sebesar 1,69% dan untuk jangka menengah sebesar 3,19% terhadap capaian di Tahun 2022/eksisting tahun 2022.

Dalam sistem pengurangan timbulan sampah dari sumber/rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh, Pokja PKP menargetkan terjadinya pengurangan sampah dari timbulan sampah rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh sebesar 20,0% pada Tahun 2027. Jika dilihat dari kondisi eksisting yang ada sekarang, berarti ada sebesar 7,55 gap capaian yang harus dipenuhi oleh Kota Payakumbuh untuk pencapaian target jangka pendek dan sisanya sebesar 10,55 dipenuhi untuk pencapaian target pada tahun 2027.

2.2.2.4. Kelembagaan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

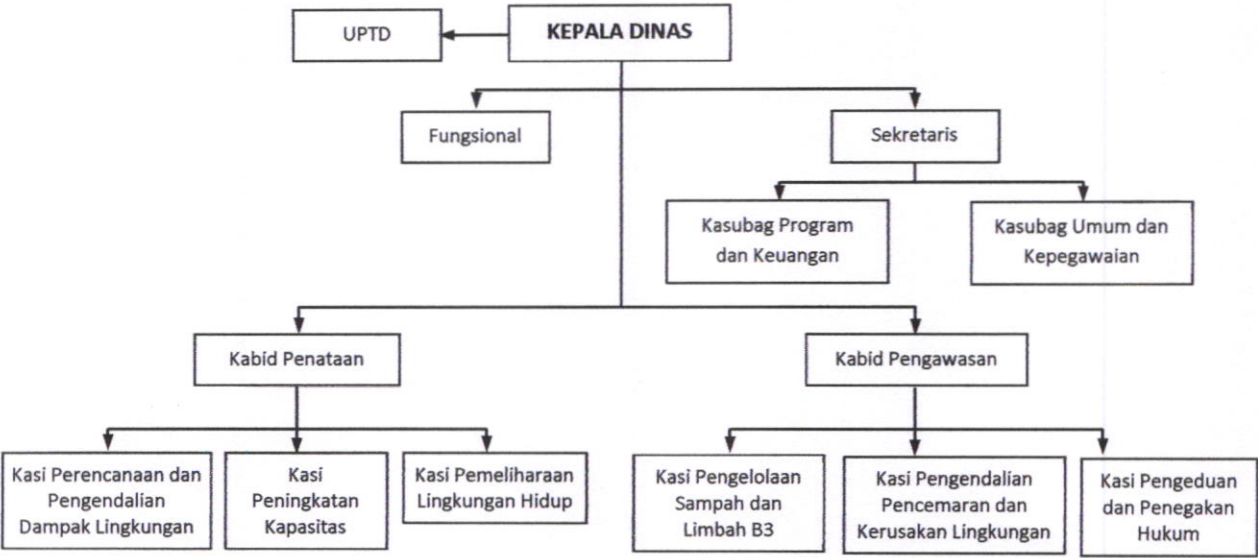
Pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2016 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
- 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun bagan strutur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.21 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh



Tabel 2.41
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan

Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Bappeda	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun target pengelolaan Sampah skala kabupaten/kota• Menyusun rencana program Persampahan dalam rangka pencapaian Target• Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka pencapaian target• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota
DPUPR	<ul style="list-style-type: none">• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)
DLH	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun target pengelolaan Sampah skala kabupaten/kota• Menyusun rencana program Persampahan dalam rangka pencapaian Target• Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka pencapaian target• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)• Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)• Menyediakan sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS• Mengelola sampah di TPS• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA• Melakukan pemilahan sampah• Melakukan penarikan retribusi sampah• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan
Satpol PP	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah

Sumber : Pokja PKP Kota Payakumbuh, Tahun 2022



Tabel 2.42
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
● Menyusun target pengelolaan Sampah skala kabupaten/kota	BAPPEDA, DLH		
● Menyusun rencana program Persampahan dalam rangka pencapaian Target	BAPPEDA, DLH		
● Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka pencapaian target	BAPPEDA, DLH		
PENGADAAN SARANA			
● Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	DLH		
● Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	DLH, DPUPR		
● Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	DLH, DPUPR		
● Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	DLH, DPUPR		
● Membangun sarana TPA	PUPR		
● Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	DLH, DPUPR		
PENGELOLAAN			
● Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	DLH		
● Mengelola sampah di TPS	DLH		
● Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	DLH		
● Mengelola TPA		UPTD PROV.	
● Melakukan pemilahan sampah	DLH		
● Melakukan penarikan retribusi sampah	DLH		
● Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	DLH		
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
● Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	DLH		

4.



Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	DLH		
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	DLH		
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	DLH, SATPOLPP		
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	BAPPEDA, DLH		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	DLH		
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	DLH		

Sumber : Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

b. Kelembagaan Di Luar Pemerintah Daerah

Sistem pengelolaan persampahan dilakukan secara sistematis menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik. Sampai dengan saat ini peran serta dalam pengelolaan sampah diluar Pemerintah Daerah (Masyarakat dan swasta) yang ikut dalam mengelola sistem persampahan di Kota Payakumbuh, teridentifikasi dimana masyarakat yang ikut terlibat secara organisasi yaitu hasil dari pembentukan dari program-program yang dilakukan oleh Pemerintah. Sebagai contoh dalam program pembangunan TPST dan Bank Sampah, dimana masyarakat penerima program memiliki kewajiban untuk mengelola infrastruktur terbangun tersebut dalam bentuk Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adapun kelembagaan/organisasi masyarakat yang telah terbentuk dan ikut dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;



Tabel 2.43
Data Lembaga pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pegelolaan Sampah Rumah Tangga

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan (SK Desa)	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TPS3R	TPST Kubang Gajah	KSM		Pengomposan	Kelurahan Limbukan	Swadaya		
2	TPS3R	TPST Sejahtera	KSM		Pengomposan	Koto Tuo Limo Kampuang	Swadaya		
3	Bank Sampah	Bank Sampah Mancang Labu, Tahun 2020	KSM		Daur Ulang	Payobasuang	Swadaya		
4	Bank Sampah	Bank Sampah Barasiah, Tahun 2021	KSM		Daur Ulang	Balai Jariang	Swadaya		
5	Bank Sampah	Bank Sampah Liberty	KSM		Daur Ulang	Padang Tinggi	Swadaya		
6	Bank Sampah	Bank Sampah Peduli, Tahun 2014	KSM		Daur Ulang	Subarang Batung	Swadaya		

Sumber : Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022







Tabel 2.44
Data KSM Pengelola Sampah Kota Payakumbuh

Lokasi		Nama KSM	Tahun Berdiri	Penanggung Jawab	Foto Dokumentasi
Kecamatan	Kelurahan				
Kec. Payakumbuh Utara	Kotokociak Kubu Tapakrajo	TPST Ibuah	2007	Usmayadi	
Kec. Payakumbuh Selatan	Kelurahan Limbukan	TPST Kubang Gajah	-	Yasril	
Kec. Payakumbuh Selatan	Koto Tuo Limo Kampuang	TPST Sejahtera	-	Yasril	
Kec. Payakumbuh Timur	Payobasuang	TPST Mancang Labu	2014	Afrial	
Kec. Payakumbuh Utara	Kapalo Koto Di Balai	TPST Pasar Berkah	-	Zulkarnain	
Kec. Payakumbuh Barat	Bulakan Balai Kandih	TPST Edukasi	2019	Dedi Mulya	

4.



Lokasi		Nama KSM	Tahun Berdiri	Penanggung Jawab	Foto Dokumentasi
Kecamatan	Kelurahan				
Kec. Payakumbuh Timur	Payobasuang	Bank Sampah Mancang Labu	2020	Asnel	
Kec. Payakumbuh Timur	Balai Jariang	Bank Sampah Barasiah	2021	Eri Voltin	
Kec. Payakumbuh Barat	Padang Tinggi	Bank Sampah Liberty	-	Rahmanida	
Kec. Payakumbuh Barat	Subarang Batung	Bank Sampah Peduli	2014	Lisa Marlina	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022



Tabel 2.45
Pemetaan Pemangku Kepentingan Pengelolaan Persampahan
di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/ Sumberdaya
▪ Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">- Legislasi- Penganggaran- pengawasan	<ul style="list-style-type: none">- Tim anggaran terkait alokasi APBD- Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Pengusaha/ Swasta <ul style="list-style-type: none">- Belum teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan Kota Payakumbuh
▪ Baznas (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	<ul style="list-style-type: none">- Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi
<ul style="list-style-type: none">- Forum komunikasi Da'i Sanitasi (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	<ul style="list-style-type: none">- Mendukung program BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZISWAF	<ul style="list-style-type: none">- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

Tabel 2.46
Kontribusi, Keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Air Limbah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
▪ Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">- Alokasi usulan terkait pengelolaan persampahan dalam APBD- Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan	Undang-undang No . 17 Tahun 2014 Tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Pengusaha/ Swasta <ul style="list-style-type: none">- Belum teridentifikasi	<ul style="list-style-type: none">- Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dalam rangka peningkatan layanan pengelolaan sampah	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Sedang	Sedang	Ya
▪ Baznas (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	<ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI No. 001/MUNAS IX/MUI/2015. Tentang	Sedang	Sedang	Ya

4.



Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
- Forum komunikasi Da'i Sanitasi (Belum ada realisasi di Kota Payakumbuh)	- Advokasi dan komunikasi sanitasi menurut tinjauan quran dan hadist	pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat	Sedang	Sedang	Ya

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

2.2.2.5. Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Penyelenggaraan sistem pengelolaan pelayanan persampahan merupakan kewajiban dari pemerintah daerah sebagai fungsi pelayanan umum. Pengelolaan persampahan yang dilakukan di Kota Payakumbuh yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Kota Payakumbuh telah memiliki Perda Pengelolaan Persampahan yaitu Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2014 Pengelolaan Sampah. Adapun pemetaan regulasi persampahan Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Pemetaan Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

No	Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan		
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	Tidak Ada
		Sudah Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2014 Pengelolaan Sampah	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :		
a	Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Bab IV Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12	



Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan			
No			
b	Substansi pengaturan: tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Bab X Pasal 44	
c	Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)	Bab IV Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21	
d	Substansi pengaturan: Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	Bab IV Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22	
e	Substansi pengaturan: pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.	Bab IV Pasal 13	
f	Substansi pengaturan: Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	Bab VIII Pasal 41	
g	Substansi pengaturan: Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	Pasal 11	
h	Substansi pengaturan: larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah.	Bab XIII Pasal 47	
i	Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	Bab XI Pasal 45	
j	Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif.	Bab XI Pasal 45	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?		
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.		

Sumber : Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022



Tabel 2.48
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (persampahan)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	2021	Dinas Kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan Meningkatkan Kegiatan PHBS di Sekolah dan Rumah Tangga	Sekolah dan Rumah tangga di area beresiko sanitasi	Kepedulian pada sanitasi dan PHBS akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2022

Tabel 2.49
Media Komunikasi dan Kerjasama terkait persampahan

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7
	Tidak Ada					

Tidak ada kegiatan media komunikasi dan kerjasama terkait persampahan di Kota Payakumbuh.

2.2.3. Drainase Lingkungan

Komponen drainase dalam konteks sanitasi adalah drainase lingkungan perumahan yang pemanfaatannya lebih diarahkan untuk saluran pembuangan limbah rumah tangga. Namun pada umumnya komponen ini relatif sulit dipisahkan dengan drainase makro atau saluran yang fungsi utamanya untuk saluran pembuangan air hujan dan pengendali banjir. Untuk itu pada bagian ini juga dibahas tentang sistem drainase makro Kota Payakumbuh yang berfungsi sebagai pengendali banjir di wilayah perkotaan.

Kota Payakumbuh telah terlayani oleh jaringan drainase makro dan jaringan drainase mikro. Jaringan drainase makro mencakup sungai sungai dan saluran primer, sedangkan jaringan



drainase mikro mencakup saluran sekunder dan tersier. Kondisi fisik saluran di beberapa tempat dibangun secara permanen dan pada tempat lainnya berupa saluran tanah. Kondisi tersebut pada saat turun hujan terjadi genangan-genangan, karena saluran yang ada sudah tidak mampu lagi menampung debit air yang datang, hal ini disebabkan oleh kondisi saluran yang tersumbat oleh sampah.

Sistem drainase di kawasan Payakumbuh sebagian besar berupa saluran tertutup di pinggir jalan di bawah trotoar. Pada umumnya kondisi saluran drainase berfungsi dengan baik. Untuk lebih jelasnya fasilitas sarana dan prasarana drainase di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

4.



Tabel 2.50 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Kota Payakumbuh

NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKASI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
001	Soekarno Hatta	Tugu Prestasi Menabung	Batas Kota	6.774	LU		Pyk Barat	Kiri	4.500,00
								Kanan	3.250,00
002	Sudirman	Tugu Prestasi Menabung	Batas Kota/ Tj. Pati	5.241	JJS		Pyk Utara	Kiri	2.500,00
						K		Kanan	2.000,00
								Kiri	
								Kanan	375,00
003	Ahmad Yani	Tugu Prestasi Menabung	Tugu Labuh Basilang	1.352	LU	P	Pyk Barat	Kiri	600,00
								Kanan	500,00
004	Prof. M.Yamin	Tugu Labuh Basilang	Bts. Kota/ Bt.Tabit	3.605	LU	P	Pyk Timur	Kiri	115,00
								Kanan	1.380,00
005	Tan Malaka	Veteran	Bts. Kota/ Lampasi	3.633	LU	P	Pyk Utara	Kiri	2.198,00
								Kanan	2.148,00
006	Imam Bonjol	Soekarno Hatta	Tan Malaka	4.160	LU	K	Pyk Barat	Kiri	520,00
								Kanan	530,00
007	Prof. DR. Hamka	Tanmalaka	Sudirman	2.694	LU	K	Pyk Utara	Kiri	460,00
								Kanan	385,00
008	DR. Sutomo	Sudirman	RKY. Rasuna Said	1.826	JJS	K	Pyk Timur	Kiri	675,00
								Kanan	850,00
009	RKY. Rasuna Said	Labuh Basilang	Batas Kota/ Taram	6.002	JJS	K	Pyk Timur	Kiri	4.085,00
								Kanan	2.300,00
010	Pahlawan	Labuh Basilang	Khatib Sulaiman	2.007	JJS	K	Pyk Timur	Kiri	425,00
								Kanan	1.965,00
011	Khatib Sulaiman	Pahlawan	Batas Kota/ Situjuh	3.295	JJS	K	Pyk Selatan	Kiri	2.014,00
012	ST. Syahrir	Pahlawan	Soekarno Hatta	2.356	JJS	K	Pyk Barat	Kiri	758,00
								Kanan	350,00
013	Diponegoro	Soekarno Hatta	Tan Malaka	6.201	JJS	N	Pyk Barat	Kiri	4.540,00
								Kanan	230,00
014	K.H Ahmad Dahlan	Tan Malaka	Sudirman	4.940	JJS	N	Latina	Kiri	1.330,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
								Kanan	280,00
015	Gajah Mada	Sudirman	RKY. Rasuna Said	3.482	JJS	K	Pyk Timur	Kiri	-
016	Panglima Polem	M. Yamin	RKY Rasuna Said	4.529	LU	K	Pyk Timur	Kiri	200,00
								Kanan	
017	H. Agus Salim	MR. M Yamin	Khatib Sulaiman	2.501	LU	K	Pyk Timur	Kiri	1.205,00
								Kanan	600,00
018	Teuku Umar	Khatib Sulaiman	Khatib Sulaiman	1.395	LU	K	Pyk Selatan	Kiri	125,00
								Kanan	75,00
019	Veteran	Soekarno Hatta	Sudirman	824	LU	P	Pyk Utara	Kiri	400,00
								Kanan	425,00
020	Syech H.Muchtar	Soekarno Hatta	Veteran	219	LU	K	Pyk Barat	Kiri	219,00
								Kanan	219,00
021	Melati	Soekarno Hatta	Tan Malaka	602	LU	K	Pyk Utara	Kiri	150,00
								Kanan	125,00
022	Latsir Tada	Soekarno Hatta	Imam Bonjol	1.184	JJS	K	Pyk Barat		658,00
									542,00
023	Mawar	Latsir Tada	Latsir Tada	416	LU	K	Pyk Barat		150,00
024	Mawar I	Latsir Tada	Mawar	63	LU	K	Pyk Barat		-
025	Mawar II	Latsir Tada	Mawar	83	LU	K	Pyk Barat		-
026	Anyelir	Soekarno Hatta	Latsir Tada	310	LU	K	Pyk Barat		150,00
027	Dahlia	Soekarno Hatta	H. Zainuddin HAMidy	935	LU	K	Pyk Barat		125,00
028	Dahlia I	Latsir tada	Dahlia	368	LU	K	Pyk Barat		100,00
029	Lili	H. Zainuddin Hamidy	Dahlia	305	LU	K	Pyk Barat		123,00
030	Kecubung	Soekarno Hatta	Dahlia	286	LU	K	Pyk Barat		156,00
031	Rambutan	Soekarno Hatta	Dahlia	249	LU	K	Pyk Barat		200,00
032	Chairil Anwar	Tan Malaka	Latsir Tana	1.007	LU	K	Pyk Barat		625,00
033	H. Zainuddin Hamidy	Soekarno Hatta	Imam Bonjol	556	LU	K	Pyk Barat		400,00
034	M. Syafei	Imam Bonjol	Bts Kota/ Sei Beringin	2.489	JJS	K	Pyk Barat	Kiri	1.250,00
								Kanan	825,00
035	Kamboja	M. Syafei	Diponegoro	1.692	JJS	K	Pyk Barat	Kiri	250,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
								Kanan	300,00
036	Kamboja I	Kamboja	Kamboja	557	LU	K	Pyk Barat	Kiri	245,00
								Kanan	200,00
037	Kamboja II	Diponegoro	Kamboja	586	LU	K	Pyk Barat		300,00
038	Nusa Indah	Imam Bonjol	Kamboja	350	LU	K	Pyk Barat		125,00
039	Aster	Imam Bonjol	Diponegoro	654	LU	K	Pyk Barat		325,00
039A	Aster	Imam Bonjol	Diponegoro	806	LU	K	Pyk Barat		300,00
040	Kenanga	Imam Bonjol	Diponegoro	815	LU	K	Pyk Utara		500,00
							Latina		
041	Rasyid Taher	Diponegoro	Prof. M. Nasrun	2.364	LU	K	Latina	Kiri	1.658,00
								Kanan	1.204,00
042	Minang Kabau	Rasyid Taher	Prof. M. Nasrun	958	JJS	K	Latina		
043	Melur	Rasyid Taher	Teratai	314	LU	K	Latina		
044	Prof. M Nasrun	Tan Malaka	Bts Kota/ Sei Beringin	3.469	JJS	K	Latina		2.560,00
045	Siti Manggopoh	Prof. M Nasrun	Bts Kota/ Kt. Br	1.092	JJS	K	Latina		1.025,00
046	Kaktus	Siti Manggopoh	Prof. M. Nasrun	2.214	LU	K	Latina		1.245,00
047	Bunga Matahari	Siti Manggopoh	Begonia	622	LU	K	Latina		214,00
048	Begonia	Kaktus	Kaktus	852	LU	K	Latina		423,00
049	Tulip	Prof. M. NAsrun	Begonia	501	LU	K	Latina		244,00
050	Kladiol	Kaktus	Batas Kota/Piobang	287	LU	K	Latina		200,00
051	Bakung	Siti Manggopoh	Ekor Padang Kt. Panjang	801	LU	K	Latina		500,00
052	Bungo Tanjung	Siti Manggopoh	Pabrik Bata Kt. Panjang	1.346	LU	K	Latina		854,00
									658,00
053	Palam	Diponegoro	Rasyid Taher	2.223	LU	K	Latina		588,00
054	Seruni	Rasyid Taher	Palam	1.351	LU	K	Latina		689,00
055	Amarilis	Rasyid Taher	Palam	587	LU	K	Latina		255,00
056	Tasbih	Diponegoro	Batas Kota/ Sei Beringin	649	LU	K	Latina		325,00
057	Rafflesia	Diponegoro	M.Syafei	1.344	LU	K	Pyk Barat		654,00
058	Rafflesia I	Kamboja	Rafflesia	153	LU	K	Pyk Barat		122,00
059	Puding	Diponegoro	Rafflesia	738	LU	K	Pyk Barat		325,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
060	Seroja	Imam Bonjol	Bts. Kota/ Sei Beringin	3.778	LU	K	Pyk Barat		2.500,00
061	Bogenvil	Soekarno Hatta	H. Zainuddin Hamidy	383	LU	K	Pyk Barat		233,00
062	Asoka	Soekarno Hatta	Imam Bonjol	600	LU	K	Pyk Barat		500,00
063	Kemuning	Imam Bonjol	M. Syafei	680	LU	K	Pyk Barat		600,00
064	Kembang Sepatu	M. Syafei	Kemuning	1.226	LU	K	Pyk Barat		650,00
065	Cempaka	Soekarno Hatta	Imam Bonjol	545	LU	K	Pyk Barat	Kiri	545,00
								Kanan	545,00
066	Sri Rezeki	Soekarno Hatta	Imam Bonjol	599	LU	K	Pyk Barat		
067	Flamboyan	Imam Bonjol	Diponegoro	1.367	LU	K	Pyk Barat	Kiri	1.367,00
								Kanan	1.367,00
068	Pakis	Imam Bonjol	Flamboyan	701	LU	K	Pyk Barat		500,00
069	Anggrek	Soekarno Hatta	Imam Bonjol	451	LU	K	Pyk Barat	Kiri	375,00
								Kanan	401,00
070	Anggrek I	Anggrek	STM Negeri Py. Kumbuh	462	LU	K	Pyk Barat	Kiri	256,00
								Kanan	312,00
071	Sakura	Imam Bonjol	Anggrek I	313	LU	K	Pyk Barat	Kiri	300,00
								Kanan	255,00
072	Setanggi	Imam Bonjol	Anggrek I	817	LU	K	Pyk Barat	Kiri	400,00
								Kanan	524,00
073	Inai	Diponegoro	Anggrek	360	LU	K	Pyk Barat	Kiri	201,00
								Kanan	201,00
074	Bunga Sirih	Diponegoro	Setanggi	320	LU	K	Pyk Barat		200,00
075	Ngalau Indah	Soekarno Hatta	Objek Wisata Ngalau	1.221	PAR	K	Pyk Barat		253,00
076	Ngalau Indah I	Soekarno Hatta	Soekarno Hatta	413	PAR	K	Pyk Barat		213,00
077	Olah Raga	Sudirman	Simp. Kantor Bupati	148	LU	K	Pyk Utara		100,00
078	H. Rasul	Veteran	Prof. DR. Hamka	985	LU	K	Pyk Utara	Kiri	255,00
								Kanan	325,00
079	Kutilang	Veteran	Rajawali	806	LU	K	Pyk Utara	Kiri	
								Kanan	421,00
080	Garuda	Sudirman	Kutilang	67	LU	K	Pyk Utara	Kiri	67,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
								Kanan	67,00
081	Tempua	Sudirman	Kutilang	61	LU	K	Pyk Utara	Kiri	51,00
								Kanan	45,00
082	Barabah	Sudirman	Kutilang	82	LU	K	Pyk Utara	Kiri	52,00
								Kanan	52,00
083	Elang	Sudirman	Kutilang	57	LU	K	Pyk Utara	Kiri	57,00
								Kanan	57,00
084	Kakak Tua	Sudirman	Rajawali	94	LU	K	Pyk Utara	Kiri	-
								Kanan	
085	Bondo	H. Rasul	Kutilang	135	LU	K	Pyk Utara	Kiri	100,00
								Kanan	
086	Mentilau	H. Rasul	Kutilang	146	LU	K	Pyk Utara	Kiri	45,00
								Kanan	
087	Kiwi	H. Rasul	Kutilang	227	LU	K	Pyk Utara	Kiri	102,00
								Kanan	125,00
088	Rajawali	Sudirman	Prof. DR. Hamka	833	LU	K	Pyk Utara	Kiri	521,00
089	Penguin	H. Rasul	Rajawali	207	LU	K	Pyk Utara		102,00
090	Angkasa	Pejuang	Rajawali	351	LU	K	Pyk Utara		100,00
091	Enggan	Sudirman	Pejuang	527	LU	K	Pyk Utara	Kiri	200,00
								Kanan	325,00
092	Belibis	Sudirman	Angkasa	160	LU	K	Pyk Utara	Kiri	-
								Kanan	
093	Merak	Tan Malaka	Prof. Dr. Hamka	628	LU	K	Pyk Utara	Kiri	325,00
								Kanan	185,00
094	Ketitiran	H. Rasul	Merak	298	LU	K	Pyk Utara		-
095	Pejuang	Sudirman	Prof. DR. Hamka	656	LU	K	Pyk Utara	Kiri	500,00
								Kanan	456,00
096	Gagak	Sudirman	Pejuang	449	LU	K	Pyk Utara	Kiri	255,00
								Kanan	300,00
097	Bangau	Sudirman	Sudirman	442	LU	K	Pyk Utara	Kiri	442,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
								Kanan	325,00
098	R.A Kartini	Sudirman	Prof. DR Hamka	2.391	LU	K	Pyk Utara	Kiri	1.781,00
								Kanan	1.781,00
099	Merpati	Prof. DR Hamka	R.A Kartini	565	LU	K	Pyk Utara	Kiri	250,00
								Kanan	200,00
100	Gelatik	RA Kartini	Merpati	585	LU	K	Pyk Utara	Kiri	585,00
								Kanan	400,00
101	Perkutut	R.A Kartini	Prof. DR. Hamka	648	LU	K	Pyk Utara	Kiri	152,00
								Kanan	200,00
102	Kasuari	R.A. Kartini	Perumnas Nankodok	447	LU	K	Pyk Utara	Kiri	400,00
								Kanan	200,00
103	Puyuh	R.A. Kartini	Sintua	796	LU	K	Pyk Utara	Kiri	200,00
								Kanan	
104	Pagam	Sudirman	Puyuh	268	LU	K	Pyk Utara	Kiri	156,00
								Kanan	
105	Burung Unta	Sudirman	R.A Kartini	159	LU	K	Pyk Utara	Kiri	100,00
								Kanan	
106	Cendrawasih	R.A Kartini	K.H. Ahmad Dahlan	1.620	LU	K	Pyk Utara	Kiri	530,00
								Kanan	470,00
107	Tekukur	R.A Kartini	KH. Ahmad Dahlan	920	LU	K	Pyk Utara	Kiri	130,00
								Kanan	80,00
108	Punai	Tan Malaka	KH. Ahmad Dahlan	1.926	LU	K	Latina		526,00
109	Balam	KH. Ahmad Dahlan	Batas Kota/ Simalanggang	335	KL	K	Pyk Utara		235,00
110	Nuri	KH. Ahmad Dahlan	Bts. Kota/ Pdg Rantang	739	LU	K	Pyk Utara		425,00
111	Pipit	Sudirman	Sudirman	624	LU	K	Pyk Utara		325,00
112	Camar	K.H. Ahmad Dahlan	K.H. Ahmad Dahlan	1.367	LU	K	Pyk Utara		365,00
									253,00
113	Murai	KH. Ahmad Dahlan	KH. Ahmad Dahlan	671	LU	K	Pyk Utara	Kiri	425,00
								Kanan	263,00
114	Pacuan	Ade Irma Suryani	RKY. Rasuna Said	1.265	LU	K	Pyk Utara		500,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
									500,00
115	Ade Irma Suryani	Sudirman	Kesehatan	464	LU	K	Pyk Utara	Kiri	464,00
								Kanan	464,00
116	H. Plobang	Sudirman	SD IV Lb. Baru	501	LU	K	Pyk Utara	Kiri	402,00
								Kanan	325,00
117	Arisun	Ade Irma Suryani	A. Yani	537	LU	K	Pyk Barat		300,00
118	H. Nasruddin Thoha	Arisun	H. Plobang	563	LU	K	Pyk Barat	Kiri	552,00
								Kanan	212,00
119	Luak Limo Puluah	A. Yani	H. Nasruddin Thoha	124	LU	K	Pyk Barat	Kiri	-
								Kanan	
120	Mangga	A. Yani	Mangga	159	LU	K	Pyk Barat		163,00
121	Kulni	Sudirman	Ade Irma Suryani	243	LU	K	Pyk Utara		200,00
122	Kesehatan	Sudirman	Ade Irma Suryani	322	LU	K	Pyk Utara	Kiri	253,00
								Kanan	125,00
123	Anggur	Sudirman	Kesehatan	380	LU	K	Pyk Utara		200,00
124	Duku	Ade Irma Suryani	Dewi Sartika	1.347	LU	K	Pyk Utara	Kiri	156,00
								Kanan	125,00
125	Apel	Sudirman	Duku	339	LU	K	Pyk Utara		255,00
126	Pepaya	Sudirman	Batang Agam	286	LU	K	Pyk Utara		200,00
127	Pala	Sudirman	Batang Agam	234	LU	K	Pyk Utara		-
128	Ceremai	Sudirman	Batang Agam	196	LU	K	Pyk Utara	Kiri	104,00
								Kanan	
129	Manggis	Sudirman	Batang Agam	242	LU	K	Pyk Utara	Kiri	242,00
								Kanan	200,00
130	Nenas	Sudirman	Batang Agam	248	LU	K	Pyk Utara		215,00
									136,00
131	Rambai	Sudirman	Batang Agam	218	LU	K	Pyk Utara		200,00
									165,00
132	Dewi Sartika	Sudirman	Gajah Mada	3.490	LU	K	Pyk Utara	Kiri	1.250,00
								Kanan	854,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
133	Delima	Dewi Sartika	DR. Sutomo	395	LU	K	Pyk Utara	Kiri	-
								Kanan	
134	Jambu	Pacuan	Pasar Ibh	680	LU	K	Pyk Barat	Kiri	680,00
								Kanan	
135	Jeruk	A. Yani	Pacuan	966	LU	K	Pyk Utara	Kiri	966,00
								Kanan	966,00
136	Cempedak	RKY. Rasuna Sadi	Jeruk	140	LU	K	Pyk Barat		140,00
137	Braja Sakti	RKY. Rasuna Said	Pacuan	1.133	LU	K	Pyk Timur	Kiri	854,00
								Kanan	625,00
138	Semangka	RKY. Rasuna Said	Pacuan	481	LU	K	Pyk Timur		213,00
139	Pemuda I	RKY. Rasuna Said	Pacuan	278	LU	K	Pyk Timur		125,00
140	Arbei	RKY. Rasuna Said	Braja Sakti	387	LU	K	Pyk Timur		150,00
141	Salak	Braja Sakti	DR. Sutomo	669	LU	K	Pyk Timur		300,00
142	Durian	RKY. Rasuna Said	Salak	100	LU	K	Pyk Timur		-
143	Belimbing	RKY. Rasuna Said	DR. Sutomo	522	LU	K	Pyk Timur		325,00
144	Pauh	DR. Sutomo	Belimbing	466	LU	K	Pyk Timur		222,00
145	Melon	DR. Sutomo	Belimbing	476	LU	K	Pyk Timur		235,00
146	Sawo	DR. Sutomo	Kirab Remaja	1.349	LU	K	Pyk Timur		857,00
									658,00
147	Kirab Remaja	Rasuna Said	Dewi Sartika	1.359	LU	K	Pyk Timur	Kiri	425,00
								Kanan	125,00
148	Mara Palam	RKY. Rasuna Said	Kirab Remaja	363	LU	K	Pyk Timur		200,00
149	Balai Kaco	RKY. Rasuna Said	Kirab Remaja	507	LU	K	Pyk Timur		-
150	Kedondong	Dewi Sartika	Dewi Sartika	737	LU	K	Pyk Timur	Kiri	255,00
								Kanan	245,00
151	Cerri	Dewi Sartika	Kedondong	137	LU	K	Pyk Timur		63,00
152	Bengkuang	Dewi Sartika	Kedondong	135	LU	K	Pyk Timur		54,00
153	Ambacang	Dewi Sartika	Dewi Sartika	991	LU	K	Pyk Timur	Kiri	235,00
								Kanan	200,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
154	Anau	Dewi Sartika	Ambacang	172	LU	K	Pyk Timur		87,00
155	Kopi	Dewi Sartika	Ambacang	147	LU	K	Pyk Timur		45,00
156	Ambacang I	Ambacang	Ambacang	510	LU	K	Pyk Timur		325,00
157	Markisa	Sudirman	Gajah Mada	1.037	LU	K	Pyk Utara	Kiri	650,00
								Kanan	758,00
158	H. Fatimah Jalil	Prof. M. Yamin	Padang Lebar	740	LU	K	Pyk Timur	Kiri	540,00
								Kanan	245,00
159	Gunung Bungsu	RKY. Rasuna Said	Syech Ibrahim Harun	1.623	LU	K	Pyk Timur		825,00
									500,00
159A	Gunung Bungsu I	Gunung Bungsu	DT. Parpatih Nan Sbtng	656	LU	K	Pyk Timur		300,00
159B	Gunung Bungsu II	RKY. Rasuna Said	Gunung Bungsu I	151	LU	K	Pyk Timur		151,00
160	Merapi	RKY. Rasuna Said	Gunung Bungsu	231	LU	K	Pyk Timur	Kiri	152,00
								Kanan	
161	Syech Ibrahim Harun	RKY. Rasuna Said	Panglima Polem	994	LU	K	Pyk Timur	Kiri	175,00
								Kanan	95,00
162	Singgalang	Panglima Polem	Kerinci	624	LU	K	Pyk Timur	Kiri	624,00
								Kanan	624,00
163	DT. Parpatih Nan	Prof. M. Yamin	Kapten Tantawi	1.798	LU	K	Pyk Timur	Kiri	958,00
								Kanan	1.185,00
164	Kapten Tantawi	Prof. M. Yamin	Kerinci	1.292	LU	K	Pyk Timur	Kiri	1.008,00
								Kanan	857,00
165	Katumpangungan	Prof. M Yamin	Kapten Tantawi	642	LU	K	Pyk Timur	Kiri	
								Kanan	520,00
166	Sago	Panglima Polem	Kapten Tantawi	302	LU	K	Pyk Timur		100,00
167	Krakatau	Panglima Polem	Kapten Tantawi	334	LU	K	Pyk Timur		200,00
168	Gunung Tandiket	Kapten Tantawi	Bts. Kota/ Andaleh	1.672	LU	K	Pyk Timur		200,00
169	Gunung Talang	Kapten Tantawi	Kapten Tantawi	523	LU	K	Pyk Timur		125,00
170	Kaluwek	RKY. Rasuna Said	Panglima Polem	1.305	LU	K	Pyk Timur	Kiri	250,00
								Kanan	200,00
171	Beringin	Prof. M Yamin	Pahlawan	1.248	LU	K	Pyk Timur	Kiri	854,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
								Kanan	700,00
172	Rasak	Pahlawan	Beringin	420	LU	K	Pyk Timur	Kiri	400,00
								Kanan	250,00
173	Kulin	Pahlawan	Beringin	375	LU	K	Pyk Timur		300,00
174	Marsawa	Pahlawan	Beringin	284	LU	K	Pyk Timur		158,00
175	Beringin I	Beringin	Tj/ Pd. Tiakar Mudik	409	LU	K	Pyk Timur		215,00
176	Aru	Prof. M. Yamin	H. Agus Salim	450	LU	K	Pyk Timur		200,00
177	Cendana	Meranti	Cemara	666	LU	K	Pyk Timur		425,00
178	Meranti	Prof. M. Yamin	Bts Kota/ Sikabu- Kabu	575	LU	K	Pyk Timur		200,00
179	Cemara	H. Agus salim	Bts Kota/ Sikabu- Kabu	775	LU	K	Pyk Timur		250,00
180	DR. Ir. Sutami	H. Agus Salim	WR. Supratman	2.426	LU	K	Pyk Timur	Kiri	1.500,00
								Kanan	1.380,00
181	WR. Supratman	Pahlawan	H. Agus Salim	1.252	LU	K	Pyk Selatan	Kiri	800,00
								Kanan	325,00
182	Kihajar Dewantara	H. Agus Salim	Ampangan	1.682	LU	K	Pyk Selatan	Kiri	970,00
								Kanan	265,00
183	Pinus	H. Agus Salim	WR. Supratman	633	LU	K	Pyk Selatan	Kiri	-
								Kanan	
184	Mahoni	Kh. Sulaiman	Batas Kota/ Tj. Mungo	2.050	LU	K	Pyk Selatan		500,00
185	Surian	Khatib Sulaiman	Khatib Sulaiman	386	LU	K	Pyk Selatan		125,00
186	Pagaruyung	Khatib Sulaiaman	Luhuang	800	LU	K	Pyk Selatan		150,00
187	Banio	Khatib Sulaiman	Batas Kota/ Pd. Jariang	1.180	LU	K	Pyk Selatan		500,00
188	Kubang Gajah	Khatib Sulaiman	Perumnas Kubang Gajah	659	LU	K	Pyk Selatan		600,00
189	Soetan Usman	Soekarno Hatta	Jakarta	148	LU	K	Pyk Barat	Kiri	75,00
								Kanan	
190	Jakarta	Soekarno Hatta	Bandung	491	LU	K	Pyk Barat		253,00
191	Bandung	A. Yani	Jakarta	360	LU	K	Pyk Barat	Kiri	254,00
								Kanan	
192	Tembakau	A. Yani	Jakarta	71	LU	K	Pyk Barat	Kiri	71,00
								Kanan	



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
193	Gambir	A. YAni	Jakarta	71	LU	K	Pyk Barat	Kiri	71,00
								Kanan	
194	Medan	Jakarta	Palembang	338	LU	K	Pyk Barat		110,00
195	Tanjung Karang	Jakarta	Palembang	303	LU	K	Pyk Barat	Kiri	165,00
								Kanan	
196	Padang	Soekarno Hatta	Soekarno Hatta	624	LU	K	Pyk Barat		325,00
197	Palembang	Padang	Sultan Hasanuddin	561	LU	K	Pyk Barat		321,00
198	Sultan Hasanuddin	Soekarno Hatta	Jendr. Gatot Subroto	860	LU	K	Pyk Barat		450,00
199	Jendr. Gatot Subroto	A. Yani	Sutan Syahrir	2.365	LU	K	Pyk Barat	Kiri	2.015,00
								Kanan	1.631,00
200	Bengkulu	Jendr. Gatot Subroto	Jendr. Gatot Subroto	600	LU	K	Pyk Barat		450,00
201	Lampung	Jendr. Gatot Subroto	Jendr. Gatot Subroto	734	LU	K	Pyk Barat		734,00
202	Riau	Pahlawan	Lampung	860	LU	K	Pyk Barat		300,00
203	Aceh	Pahlawan	Sutan Syahrir	1.063	LU	K	Pyk Barat		554,00
									764,00
204	Lhoksomawe	Jendr. Gatot Subroto	Aceh	336	LU	K	Pyk Barat	Kiri	150,00
								Kanan	100,00
205	Takengon	Jendr. Gatot Subroto	Aceh	181	LU	K	Pyk Barat		105,00
206	Maluku	Sutan Syahrir	Simalagi	506	LU	K	Pyk Barat		365,00
207	Halmahera	Sutan Syahrir	Maluku	440	LU	K	Pyk Barat		200,00
208	Kalimantan	Soekarno Hatta	Sultan Hasanuddin	618	LU	K	Pyk Barat		500,00
209	Balik Papan	Sultan Hasanuddin	Kalimantan	281	LU	K	Pyk Barat		201,00
210	Puti Bungsu	Soekarno Hatta	Kalimantan	409	LU	K	Pyk Barat		325,00
211	Ujung Pandang	Puti Bungsu	Kalimantan	181	LU	K	Pyk Barat		125,00
212	Surabaya	Soekarno Hatta	Jendral Gatot Subroto	1.470	LU	K	Pyk Barat	Kiri	800,00
								Kanan	525,00
213	Semarang	Soekarno Hatta	Yogyakarta	238	LU	K	Pyk Barat		200,00
214	Yogyakarta	Surabaya	Sulawesi	376	LU	K	Pyk Barat		376,00
215	Balai Polam	Soekarno Hatta	Lombok	429	LU	K	Pyk Barat	Kiri	429,00
								Kanan	350,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
216	Bali	Soekarno Hatta	Denpasar	296	LU	K	Pyk Barat		200,00
217	Denpasar	Balai Polam	Surabaya	379	LU	K	Pyk Barat	Kiri	379,00
								Kanan	250,00
218	Lombok	Surabaya	Sumbawa	412	LU	K	Pyk Barat	Kiri	412,00
								Kanan	412,00
219	Mataram	Denpasar	Lombok	112	LU	K	Pyk Barat		112,00
220	Sumbawa	Soekarno Hatta	Lombok	555	LU	K	Pyk Barat		
221	Bima	Balai Polam	Surabaya	175	LU	K	Pyk Barat	Kiri	175,00
								Kanan	100,00
222	Flores	Soekarno Hatta	Sumbawa	375	LU	K	Pyk Barat		200,00
223	Kupang	Plores	Irian Jaya	155	LU	K	Pyk Barat		155,00
224	Irian Jaya	Soekarno Hatta	Soekarno Hatta	858	LU	K	Pyk Barat		500,00
225	Merauke	Soekarno Hatta	Irian Jaya	104	LU	K	Pyk Barat		104,00
226	Jayapura	Soekarno Hatta	Irian Jaya	125	LU	K	Pyk Barat		125,00
228	Singa Harau	Soekarno Hatta	Khatib Sulaiman	1.262	LU	K	Pyk Selatan		700,00
229	Ambon	Singa Harau	Singa Harau	372	LU	K	Pyk Selatan		200,00
230	Ternate	Singa Harau	Singa Harau	400	LU	K	Pyk Selatan		150,00
231	Tidore	Singa Harau	Ternate	96	LU	K	Pyk Selatan		
232	Bandanaire	Singa harau	Ternate	89	LU	K	Pyk Selatan		
233	Dili	Soekarno Hattta	Soekarno Hattta	482	LU	K	Pyk Barat		400,00
234	Pekan Baru	Soekarno Hatta	Sutan Syahrir	261	LU	K	Pyk Barat		200,00
235	Mangga I	Mangga	Mangga III	313	LU	K	Pyk Barat		200,00
236	Mangga II	Nasaruddin Thoha	Mangga III	120	LU	K	Pyk Barat		50,00
237	Mangga III	Nasaruddin Thoha	A. Yani	96	LU	K	Pyk Barat		-
238	Cocon	Kihajar Dewantara	Batas Kota	901	LU	K	Pyk Selatan		200,00
239	Murbey	Cocon	Batas Kota	1.130	LU	K	Pyk Selatan		600,00
240	Gunung Kerinci	RKY. Rasuna Said	Panglima Polem	708	LU	K	Pyk Timur		325,00
242	Sulawesi	Sutan Syahrir	Khatib Sulaiman	791	LU	K	Pyk Barat		-
243	Timor Timur	Soekarno hatta	Batas Kota	1.487	LU	K	Pyk Selatan		256,00
244	A.H. Nasution	Latsitarda	Dahlia	514	LU	K	Pyk. Barat		225,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
245	Melati I	Veteran	Mawar	212	LU	K	Pyk. Barat		165,00
246	Anyelir I	Dahlia	Anyelir	298	LU	K	Pyk. Barat		298,00
247	Anyelir II	Sukarno Hatta	Anyelir	348	LU	K	Pyk. Barat		348,00
248	Anyelir III	Anyelir	Anyelir II	159	LU	K	Pyk. Barat		125,00
249	Anyelir IV	Latsitarda	Anyelir I	78	LU	K	Pyk. Barat		-
250	Anyelir V	Anyelir III	Anyelir II	109	LU	K	Pyk. Barat		109,00
251	Sri Rezeki I	Soekarno Hatta	Sri Rezeki	396	LU	K	Pyk. Barat		350,00
252	Sri Rezeki II	Imam Bonjol	Sri Rezeki	225	LU	K	Pyk. Barat		225,00
253	Alamanda	Imam Bonjol	Aster	443	LU	K	Pyk. Barat		325,00
254	Alamanda I	Aster	Alamanda	260	LU	K	Pyk. Barat		165,00
255	Alamanda II	Aster	Kamboja II	399	LU	K	Pyk. Barat		250,00
256	Asparagus	M. Syafe'i	Rafflesia	292	LU	K	Pyk. Barat		200,00
257	Asparagus I	M. Syafe'i	Kemuning	396	LU	K	Pyk. Barat		300,00
258	Asparagus II	Asparagus	Asparagus	244	LU	K	Pyk. Barat		150,00
259	Asparagus III	Asparagus	Asparagus II	33	LU	K	Pyk. Barat		-
260	Mawar Putih	Diponegoro	M. Syafe'i	441	LU	K	Pyk. Barat		356,00
261	Sedap Malam	Tan Malaka	Kenanga	315	LU	K	Pyk. Barat		136,00
262	Krishan	Tan Malaka	Kenanga	219	LU	K	Pyk. Barat		125,00
263	Kamboja III	Kamboja	Kamboja II	82	LU	K	Pyk. Barat		-
264	Edelweis	Aster I	Kenanga	445	LU	K	Pyk. Barat		350,00
265	Rafflesia II	M. Syafe'i	Rafflesia	330	LU	K	Pyk. Barat		205,00
266	Teratai	Setanggi	Setanggi	300	LU	K	Pyk. Barat		200,00
267	Teratai I	Anggrek I	Teratai	163	LU	K	Pyk. Barat		65,00
268	Inai I	Soekarno Hatta	Inai	120	LU	K	Pyk. Barat	Kiri	60,00
								Kanan	68,00
269	Setanggi I	Diponegoro	Setanggi	571	LU	K	Pyk. Barat		452,00
270	Sumatera	ST. Syahril	Dili	532	LU	K	Pyk. Barat	Kiri	400,00
								Kanan	
271	Sumatera I	Sumatera	-	153	LU	K	Pyk. Barat		110,00
273	Mentawai I	Sulawesi	Mentawai III	215	LU	K	Pyk. Barat		152,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
274	Mentawai II	ST. Syahril	Mentawai I	95	LU	K	Pyk. Barat		25,00
275	Mentawai III	Mentawai	Mentawai	254	LU	K	Pyk. Barat		200,00
276	Tanjung Pinang	Bandung	Bengkulu	365	LU	K	Pyk. Barat		200,00
277	Anggrek Bulan	Flamboyan	Anggrek Putih	474	LU	K	Pyk. Barat		350,00
278	Anggrek Putih	Flamboyan	-	366	LU	K	Pyk. Barat	Kiri	366,00
								Kanan	
279	Anggrek Putih I	Anggrek Putih	Anggrek Bulan	107	LU	K	Pyk. Barat	Kiri	107,00
								Kanan	120,00
280	Bonai Indah Barat I	Asoka	Asoka	457	LU	K	Pyk. Barat		425,00
281	Bonai Indah Timur I	Asoka	Bonai Indah Timur II	248	LU	K	Pyk. Barat		248,00
282	Bonai Indah Timur II	Imam Bonjol	Asoka	260	LU	K	Pyk. Barat		260,00
283	Bonai Indah Timur III	Bonai Indah Timur I	Bonai Indah Timur I	285	LU	K	Pyk. Barat		285,00
284	Bonai Indah Timur IV	Asoka	Asoka	313	LU	K	Pyk. Barat		313,00
285	Pangkal Pinang	Soekarno Hatta	Balai Polam	251	LU	K	Pyk. Barat		251,00
286	Serang	Soekarno Hatta	Jogjakarta	200	LU	K	Pyk. Barat		120,00
287	Batam	Soekarno Hatta	H. Zainuddin Hamidy	271	LU	K	Pyk. Barat		201,00
288	Siberut	Sumbawa	Balai Polam	162	LU	K	Pyk. Barat		100,00
289	Sipora	Irian Jaya	Irian Jaya	250	LU	K	Pyk. Barat		189,00
290	Pagai	Lombok	Denpasar	139	LU	K	Pyk. Barat	Kiri	78,00
								Kanan	
291	Flores I	Flores	Flores II	131	LU	K	Pyk. Barat		63,00
292	Flores II	Flores	Flores	125	LU	K	Pyk. Barat		52,00
293	Seroja I	M. Syafe'i	Kemuning	728	LU	K	Pyk. Barat		451,00
294	Kemuning I	Kemuning	Seroja I	257	LU	K	Pyk. Barat		257,00
295	Kemuning II	Kemuning	Seroja I	175	LU	K	Pyk. Barat		175,00
296	Kemuning III	Kemuning I	Seroja I	203	LU	K	Pyk. Barat		203,00
297	Irian Jaya I	Irian Jaya	-	384	LU	K	Pyk. Barat		300,00
298	Irian Jaya II	Irian Jaya	-	302	LU	K	Pyk. Barat		288,00
299	Jati	Agus Salim	Cendana	277	LU	K	Pyk Timur		200,00
300	Akasia	Agus Salim	Cemara	351	LU	K	Pyk Timur		300,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
301	Damar	Beringin	Beringin I	420	LU	K	Pyk Timur		250,00
302	Pinus I	Agus Salim	Pinus	420	LU	K	Pyk Timur		250,00
303	Pinus II	WR. Supratman	Pinus I	294	LU	K	Pyk Selatan		150,00
304	Pinus III	WR. Supratman	Pinus II	312	LU	K	Pyk Selatan		-
305	Beringin II	Agus Salim	Beringin	718	LU	K	Pyk Timur		500,00
306	Beringin III	KI Hajar Dewantar	Beringin II	340	LU	K	Pyk Timur		200,00
307	Gunung Talamau	Katumpangungan	Kapten Tantawi	848	LU	K	Pyk Timur		325,00
308	Gunung Dempo	Krakatau	Gunung Leuser	200	LU	K	Pyk Timur		65,00
309	Gunung Tambora	Panglima Polem	Gunung Sinabung	177	LU	K	Pyk Timur		50,00
310	Gunung Leuser	Panglima Polem	Singgalang	527	LU	K	Pyk Timur		250,00
311	Solok	Pahlawan	Beringin	874	LU	K	Pyk Timur		350,00
312	Gunung Agung	Panglima Polem	Kaluwek	339	LU	K	Pyk Timur		250,00
313	Gunung Rinjani	Panglima Polem	DT. Parpatih Nan	471	LU	K	Pyk Timur	Kiri	50,00
								Kanan	
314	Gunung Sinabung	Panglima Polem	Singgalang	528	LU	K	Pyk Timur		365,00
315	Gunung Sibayak	Singgalang	Gunung Leuser	396	LU	K	Pyk Timur		255,00
316	Gunung Bromo	RKY. Rasuna Said	Gunung Semeru	229	LU	K	Pyk Timur		133,00
317	Gunung Semeru	RKY. Rasuna Said	Syech Ibrahim Harun	762	LU	K	Pyk Timur		500,00
318	Pisang	Balai Kaco	Balai Kaco	436	LU	K	Pyk Timur		200,00
319	Gunung Galunggung	RKY. Rasuna Said	Gunung Papandayan	230	LU	K	Pyk Timur		130,00
320	Gunung Kelud	RKY. Rasuna Said	Gunung Papandayan	167	LU	K	Pyk Timur		50,00
321	Gunung Papandayan	RKY. Rasuna Said	Kaluwek	848	LU	K	Pyk Timur		524,00
322	Lengkeng	RKY. Rasuna Said	Balai Kaco	244	LU	K	Pyk Timur		120,00
323	Lengkeng I	RKY. Rasuna Said	Balai Kaco	195	LU	K	Pyk Timur		-
324	Sirsak	Pacuan	Semangka	203	LU	K	Pyk Timur		130,00
325	Strawberi	RKY. Rasuna Said	Semangka	340	LU	K	Pyk Timur		250,00
326	Manjato	Pacuan	-	614	LU	K	Pyk. Utara		300,00
327	Angsa	Gagak	Bangau	77	LU	K	Pyk Utara		-
328	Galapagos	Tan Malaka	Tekukur	797	LU	K	Pyk Utara		450,00
329	Galapagos I	Hamka	Galapagos	173	LU	K	Pyk Utara		-



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKA SI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
330	Galapagos II	Kartini	Galapagos	329	LU	K	Pyk Utara		200,00
331	Poksai	Sudirman	Bangau	146	LU	K	Pyk Utara		-
332	Seriti	Gagak	Murai Batu	203	LU	K	Pyk Utara		150,00
333	Kurma	Kesehatan	Kuini	113	LU	K	Pyk Utara		100,00
334	Markisa I	Markisa	Markisa	181	LU	K	Pyk Utara		-
335	Murai Batu	Sudirman	Pejuang	199	LU	K	Pyk Utara	Kiri	100,00
								Kanan	50,00
336	Haji Piobang I	Pacuan	Haji Piobang	443	LU	K	Pyk Utara	Kiri	250,00
								Kanan	150,00
337	Alpokot	Pacuan	Braja Sakti	429	LU	K	Pyk Utara		-
338	Walet	Pejuang	Enggang	254	LU	K	Pyk Utara		150,00
339	Pelikan	Sudirman	Pipit	215	LU	K	Pyk Utara		
340	Kasturi	Sudirman	Sudirman	540	LU	K	Pyk Utara	Kiri	325,00
								Kanan	200,00
341	Beo	Sudirman	Angkasa	132	LU	K	Pyk Utara	Kiri	
								Kanan	
342	Camar I	Ahmad Dahlan	Camar	375	LU	K	Pyk Utara		312,00
343	Camar II	Ahmad Dahlan	Camar I	94	LU	K	Pyk Utara		
344	Bidadari	Ahmad Dahlan	Cendrawasih	1.077	LU	K	Pyk Utara		650,00
345	Bidadari I	Cendrawasih	Bidadari	104	LU	K	Pyk Utara		50,00
346	Jalak	Hamka	Gelatik	573	LU	K	Pyk Utara		325,00
347	Tiung	Hamka	Pejuang	193	LU	K	Pyk Utara	Kiri	85,00
								Kanan	100,00
348	H. Rasul I	Veteran	Haji Rasul	239	LU	K	Pyk Utara		125,00
349	Balam I	Ahmad Dahlan	Balam	262	LU	K	Pyk Utara		262,00
350	Nuri I	Ahmad Dahlan	Camar	390	LU	K	Pyk Utara		325,00
351	Mengkudu	Dewi Sartika	Dewi Sartika	172	LU	K	Pyk. Utara		-
352	Kapulasan	Dewi Sartika	Dewi Sartika	154	LU	K	Pyk. Utara		100,00
353	Tuanku Lareh	Arisun	Luak Limo Puluah	81	LU	K	Pyk. Utara		81,00
354	Bukittinggi	Pahlawan	Solok	206	LU	K	Pyk Selatan		100,00



NO RUAS	NAMA RUAS	NAMA PANGKAL RUAS	NAMA UJUNG RUAS	PANJANG (METER)	KLASIFIKASI	STATUS ADM	TERMASUK KEC.	SALURAN KIRI / KANAN	PANJANG SALURAN
355	Painan	Pahlawan	Solok	216	LU	K	Pyk Selatan		75,00
356	Matoa	Khatib Sulaiman	WR. Supratman	420	LU	K	Pyk Selatan		201,00
357	Bakau	KI Hajar Dewantara	Dr. Sutami	363	LU	K	Pyk Selatan		150,00
358	Bakau I	KI Hajar Dewantar	Bakau/Hybrida	323	LU	K	Pyk Selatan	Kiri	30,00
								Kanan	360,00
359	Sijunjung	Pahlawan	Riau	380	LU	K	Pyk Selatan		200,00
360	Batusangkar	Pahlawan	Sijunjung	174	LU	K	Pyk Selatan		50,00
361	Pasaman	Pahlawan	Solok	218	LU	K	Pyk Selatan		152,00
362	Panorama	Dr. Sutami	Dr. Sutami	592	LU	K	Pyk Selatan		300,00
363	Anthurium	Bunga Matahari	Kaktus	193	LU	K	Latina		68,00
364	Bagindo Aziz Chan	Prof. M. Nasrun	Minang Kabau	1.111	LU	K	Latina		605,00
365	Adi Negro	Prof. M. Nasrun	Prof. M. Nasrun	684	LU	K	Latina		400,00
366	Rose	Palam	Seruni	531	LU	K	Latina		350,00
367	Abdul Muis	Bagindo Aziz Chan	Menuju Rasyid Thaer	693	LU	K	Latina		500,00
		PANJANG DRAINASE KOTA		261.437					182.172,00
		PANJANG JALAN BER-DRAINASE		15.438					131.770,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2022



2.3. Target Akses Kab/Kota yang ingin di capai

Target Akses sanitasi Kota Payakumbuh sampai tahun 2027 adalah sebesar 26,8 % untuk akses aman, 100% Kases Layak dan 0 % BABS, sedang untuk target penangana untuk sampah adalah 70% dan pengurangan sampah 300% dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.51
Target Capaian Akses Sanitasi Kota Payakumbuh

No	Komponen	Target Capaian Sanitasi	
		Tahun 2023	Tahun 2027
		(%)	(%)
1	Akses Aman	22,6	26,8
2	Akses Layak	100,0	100,0
	- Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	75,0	72,7
	- Akses Layak Bersama	2,4	0,4
	- Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,0	0,0
3	Belum Layak	0,0	0,0
4	BABS	0,0	0,0
5	Penanganan sampah	76,81%	70%
6	Pengurangan Sampah	9,45%	30%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun Tahun 2022

2.4. Area Berisiko dan Permasalahan

Area berisiko dan permasalahan sanitasi berisikan penjelasan mengenai pemetaan area berisiko untuk sub-sektor air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan berdasarkan hasil instrumen SSK yang sudah dilakukan penyepakatan oleh pokja serta permasalahan mendesak yang dihadapi.

Penentuan tingkat risiko dilakukan melalui penilaian dengan metode pemberian skor berdasarkan data sekunder yang tersedia dan indeks risiko studi EHRA nilai skoring di klasifikasikan dalam 4 (empat) *grade*/tingkatan risiko sebagai berikut;

- Skor angka 1/ warna biru : Tingkat Risiko Kurang Berisiko
- Skor angka 2/warna hijau : Tinkat Risiko Rendah

4.



Skor angka 3/warna kuning : Tingkat Risiko Tinggi

Skor angka 4/warna merah : Tingkat Risiko Sangat Tinggi

Setelah melakukan skoring tersebut, kemudian Pokja menyepakati besaran pembobotan *Exposure* dan *Impact* untuk menentukan area berisiko dimana hasil pembobotan *Exposure* dan *Impact* dilaporkan sebagai berikut;

Tabel 2.52
Pembobotan Exposure dan Impact

	Pembobotan EXPOSURE ()		
	Air Limbah	Sampah	Drainase
Data Sekunder	30	30	30
Indeks Risiko Sanitasi - EHRA	40	40	40
Persepsi SKPD	30	30	30

	Pembobotan IMPACT ()
Jumlah Penduduk	30
Kepadatan Penduduk	25
Angka Kemiskinan	20
Fungsi Urban - Urban/rural	25

Sumber : Instrumen SSK, 2022

Dari hasil skoring dan pembobotan *Exposure* dan *Impact* kemudian akan tergambarkan area berisiko sanitasi yang divisualisasikan dan disajikan dalam bentuk tabel dan peta.

Permasalahan sanitasi adalah persoalan teknis maupun non teknis terkait komponen sistem sanitasi yang menghalangi tercapainya tujuan pelayanan sistem sanitasi sehingga harus ditemukan solusi dan diselesaikan baik dalam rencana jangka waktu anggaran pendek, menengah maupun rencana jangka panjang.

Permasalahan sanitasi yang bersifat teknis dirumuskan berdasarkan kondisi eksisting sanitasi yang telah dirinci pada sub bab diatas. Permasalahan non teknis dirumuskan dari kajian primer non EHRA (Kajian peran diluar pemerintah, kajian kelembagaan dan kebijakan serta kajian peranserta masyarakat).



2.4.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Area berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik memberikan informasi terkait area berisiko dan permasalahan yang dihadapi Kota Payakumbuh dalam pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari analisis menggunakan Instrumen SSK dan digambarkan dalam bentuk peta dan tabel area berisiko air limbah.

2.4.1.1 Area Berisiko Air Limbah Domestik

Berdasarkan metode di atas, diketahui Area berisiko Air Limbah Domestik di Kota Payakumbuh sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut:



Tabel 2.53
Area Berisiko Air Limbah Domestik

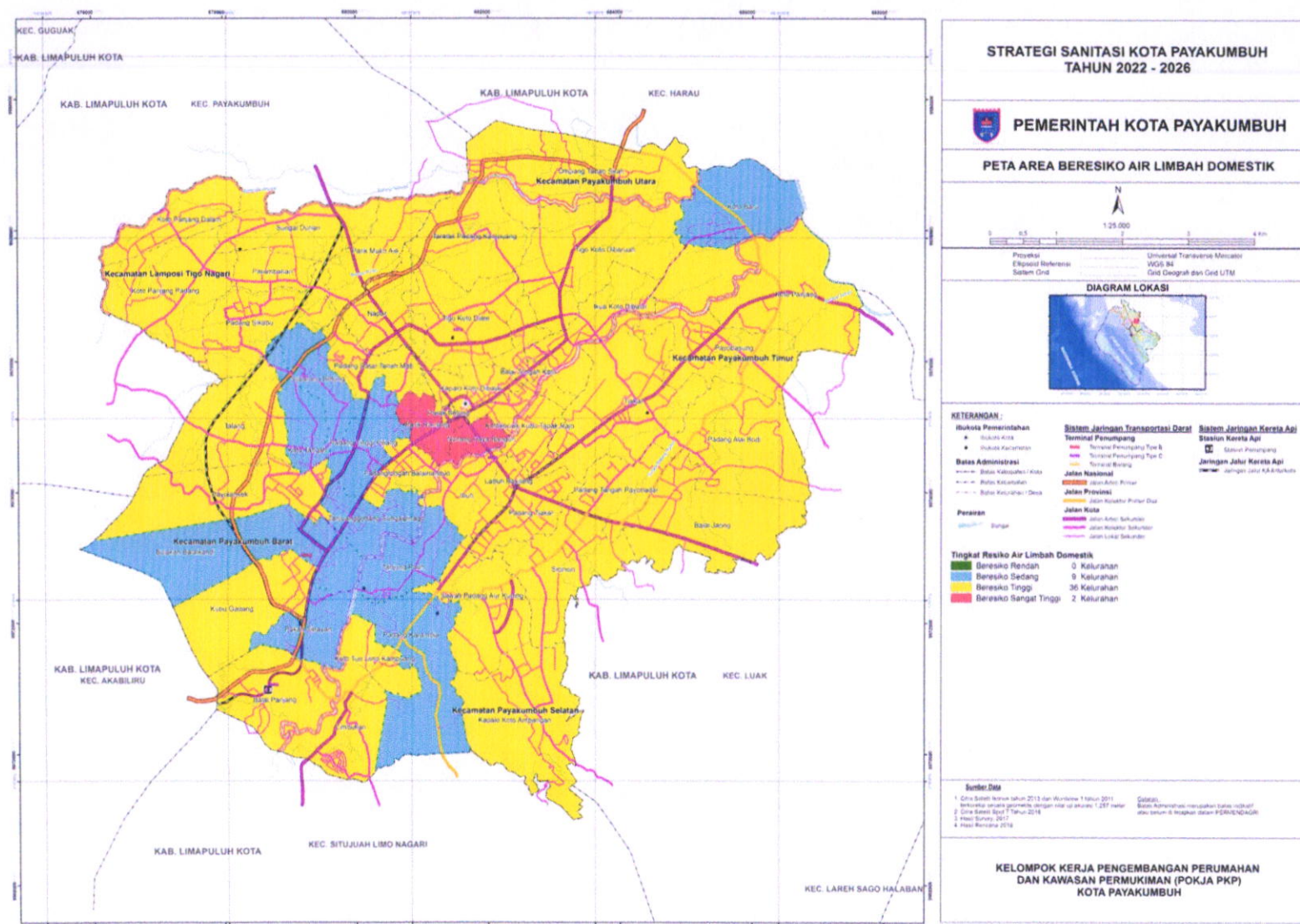
No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas		
			Kecamatan	Kelurahan
I.	Resiko 4	1	Payakumbuh Barat	Parit Rantang
				Nunang Daya Bangun
II.	Resiko 3	1	Payakumbuh Barat	Kubu Gadang
				Ibuah
				Labuah basilang
				Parak batuang
				Payolansek
				Talang
				Padangtongah Balainanduo
				Tanah Mati
		2	Payakumbuh Selatan	Balai Panjang
				Limbukan
				Kototuo limokampung
				Kapalo koto ampangan
				Sawahpadang aua kuniang
		3	Payakumbuh Timur	Padang tengah payobada
				Balai jaring
				Sicincin
				Payobasung
				Koto panjang
				Padang alai bodi
				Padang tiakar
				Tiakar
		4	Payakumbuh Utara	Napar
				Ompang tanah sirah
				Taratak padang kampung
				Tigo koto dibaruah

4.



No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan
			Tigo koto diate
			Kapalo koto dibalai
			Kotokociak kubu tapakrajo
			Balai tongah koto
			Ikua koto dibalai
		5. Lamposi Tigo Nagori	Koto panjang padang
			Koto panjang dalam
			Parambahan
			Padang sikabu
			Parit muko aie
			Sungai durian
III.	Resiko 2	1 Payakumbuh Barat	Pakan sinayan
			Bulakan balai kandi
			Tanjung pauah
			Subarang batuang
			Koto tengah
			Padang tinggi piliang
			Tanjunggodang sungaipinago
		2 Payakumbuh Selatan	Padang karambia
		3 Payakumbuh Timur	Koto baru
IV.	Resiko 1	Tidak Ada	

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022



Gambar 2.22 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik Kota Payakumbuh



Dari tabel dan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa hasil skoring berdasarkan penilaian dan pembobotan tingkat risiko terdapat 3 Kelurahan yang tersebar di 2 Kecamatan dengan tingkat risiko sangat tinggi (Skor 4). Sedangkan kelurahan dengan tingkat risiko tinggi (Skor 3) berjumlah 35 Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan. kelurahan dengan tingkat risiko sedang (Skor 2) berjumlah 9 Kelurahan yang tersebar di 3 Kecamatan dan tidak ada kelurahan yang beresiko rendah (Skor 1) di Kota Payakumbuh.

Kecamatan dengan tingkat resiko sangat tinggi yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat dengan 2 Kelurahan dan Kecamatan Payakumbuh Timur dengan 1 Kelurahan. Dari analisis Pokja PKP Kota Payakumbuh, kawasan ini memiliki resiko sangat tinggi air limbah domestik karena kawasan ini banyak terdapat industri rumah tangga yang membuang limbahnya ke saluran drainase.

2.4.1.2 Permasalahan Air Limbah Domestik

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan seperti sampah, air kakus (*Black water*) dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).

Untuk mengetahui secara garis besar permasalahan air limbah di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.54
Permasalahan Air Limbah Domestik

No.	Permasalahan
A. Aspek Teknis	
Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1.	Gap akses aman antara kondisi eksisting dengan target jangka menengah masih cukup besar yaitu 13,5% sedangkan gap antara akses layak dengan target jangka menengah 9,3%
2.	Rumah tangga dengan komponen akses belum layak/cubluk masih tinggi yaitu 9,3%.
3.	Septictank individu masih banyak yang belum memadai
4.	Penyedotan lumpur tinja terjadwal masih belum optimal

4.



No.	Permasalahan
5.	Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman berbasis masyarakat masih terbatas
6.	Pengawasan pembangunan gedung belum optimal
B. Aspek Non Teknis Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta dan Komunikasi	
1.	Aspek Pendanaan <ul style="list-style-type: none">○ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah;○ Belum teridentifikasinya potensi sumber pembiayaan dari luar anggaran pemerintah (potensi pendanaan dari swasta/CSR).
2.	Aspek Kelembagaan <ul style="list-style-type: none">○ Belum adanya unit pengelola teknis air limbah domestik○ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat○ Belum optimalnya kinerja kelompok pengelola sarana (KPS) yang telah dibentuk○ Minimnya lembaga swasta yang berperan dalam pengelolaan air limbah domestik.
3.	Aspek Peraturan <ul style="list-style-type: none">○ Belum adanya Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. (Masih dalam bentuk Ranperda)
4.	Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta <ul style="list-style-type: none">○ Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan PHBS dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sesuai dengan standar yang berlaku

Sumber : Analisis Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022

2.4.2 Area Berisiko dan Permasalahan Persampahan Rumah Tangga

Area berisiko dan permasalahan sampah rumah tangga memberikan informasi terkait area berisiko dan permasalahan yang dihadapi Kota Payakumbuh dalam pengelolaan persampahan yang dihasilkan dari analisis menggunakan Instrumen SSK. Adapun penyajian permasalahan dari kondisi eksisting tersebut berupa;

- Gambaran dalam bentuk peta dan tabel area berisiko persampahan
- Daftar permasalahan terkait pengelolaan persampahan di Kota Payakumbuh dengan mencantumkan permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi, yang menjadi terjadi dalam pengelolaan persampahan.

4.



2.4.2.1 Area Berisiko Persampahan Rumah Tangga

Pada tabel dan peta di bawah ini tergambar area berisiko terhadap permasalahan terkait sektor sampah rumah tangga, yang diplot berdasarkan batas kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh.

Tabel 2.55
Area Berisiko Persampahan

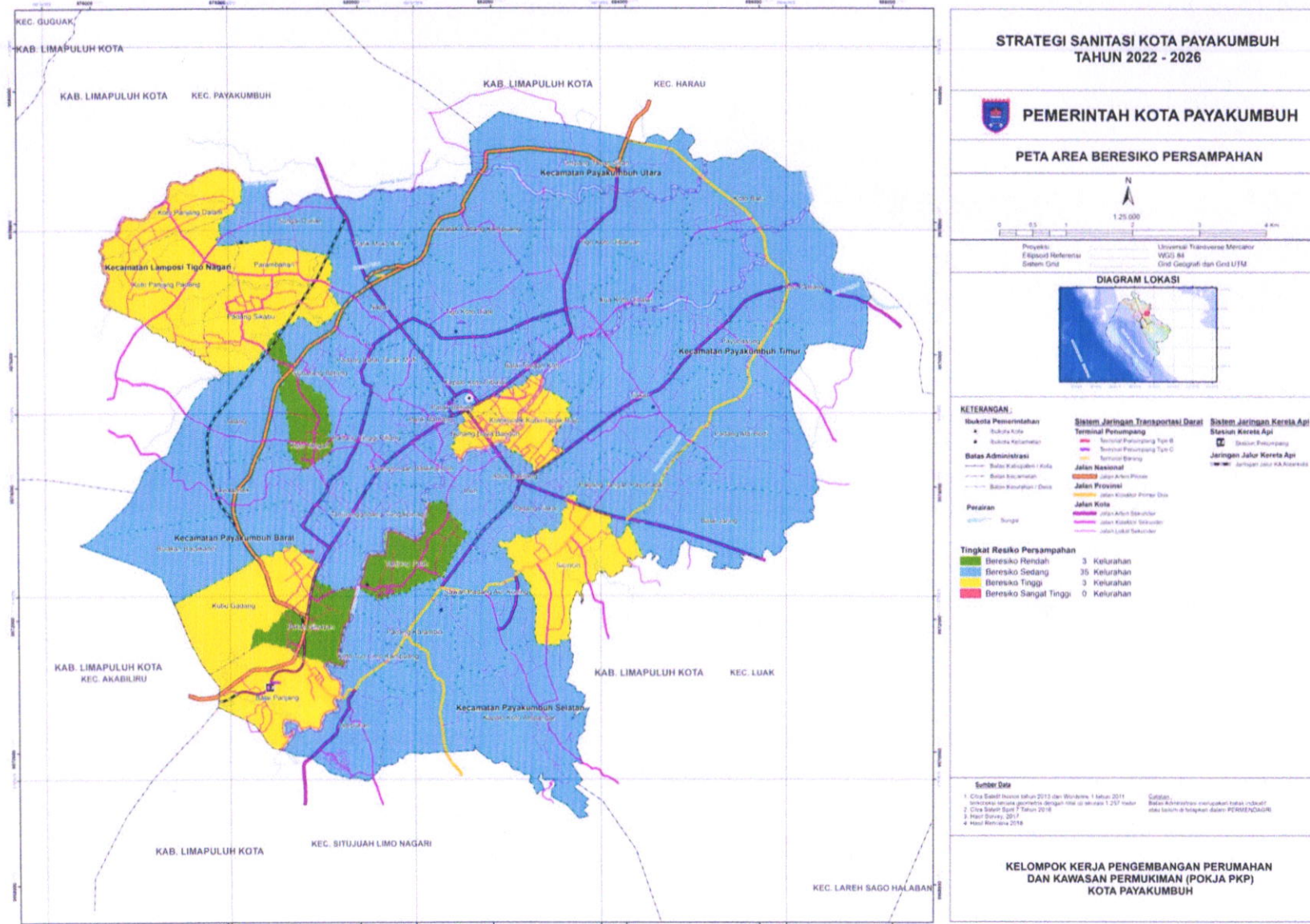
No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas		
		Kecamatan		Kelurahan
I.	Resiko 4	Tidak Ada		
II.	Resiko 3	1	Payakumbuh Barat	Kubu Gadang
				Nunang Daya Bangun
		2	Payakumbuh Selatan	Balai Panjang
		3	Payakumbuh Timur	Sicincin
		4	Payakumbuh Utara	Kotokociak kubu tapakrajo
		5	Lamposi Tigo Nagori	Koto panjang padang
				Koto panjang dalam
				Parambahan
				Padang sikabu
III.	Resiko 2	1	Payakumbuh Barat	Bulakan balai kandi
				Ibuah
				Labuah basilang
				Parak batuang
				Parik rantang
				Payolansek
				Subarang batuang
				Talang
				Padang tinggi piliang
				Padangtongah balainanduo
				Tanjuanggodang sungaipinago
				Tanah mati
		2	Payakumbuh Selatan	Limbukan
				Padang karambia
				Kototuo limokampung

4.



No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas		
		Kecamatan		Kelurahan
				Kapalo koto ampangan
				Sawahpadang aua kuniang
		3	Payakumbuh Timur	Padang tengah payobada
				Balai jaring
				Payobasung
				Koto panjang
				Koto baru
				Padang alai bodi
				Padang tiakar
				Tiakar
		4	Payakumbuh Utara	Napar
				Ompang tanah sirah
				Taratak padang kampuang
				Tigo koto dibaruah
				Tigo koto diate
				Kapalo koto dibalai
				Balai tongah koto
				Ikua koto dibalai
		5	Lamposi Tigo Nagori	Parit muko aie
				Sungai durian
IV.	Resiko 1	1	Payakumbuh Barat	Pakan Sinayan
				Tanjung Pauah
				Koto Tengah

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022



Gambar 2.23 Peta Area Beresiko Persampahan Kota Payakumbuh



Dari tabel dan gambar di atas diperoleh informasi bahwa hasil scoring berdasarkan penilaian dan pembobotan tingkat risiko, tidak ada Kelurahan yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi (Skor 4). Sedangkan kelurahan dengan tingkat risiko tinggi (Skor 3) berjumlah 9 Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan. Kelurahan dengan tingkat risiko sedang (Skor 2) berjumlah 35 Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan dan kelurahan yang beresiko rendah (Skor 1) berada di 3 kelurahan di Kecamatan Payakumbuh Barat.

2.4.2.2 Permasalahan Persampahan Rumah Tangga

Penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh merupakan permasalahan yang terus meningkat oleh karena terus berkembangnya populasi manusia dengan tingkat kebutuhan yang juga semakin meningkat.

Tabel di bawah ini mengidentifikasi aspek yang dinilai sangat mempengaruhi permasalahan sampah di Kota Payakumbuh dalam pencapaian target, yaitu aspek teknis dan non teknis. Pada tinjauan aspek teknis mencakup permasalahan terkait capain kinerja, ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan dan lingkungan), serta ketersediaan dokumen perencanaan teknis). Sedangkan cakupan dari pada aspek non-teknis terdiri dari permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundan-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 2.56
Permasalahan Penanganan Persampahan

No.	Permasalahan
A. Aspek Teknis	
Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan dan lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1.	Gap penanganan sampah antara kondisi eksisting dengan target jangka panjang masih 3,2%
2.	Gap pengurangan sampah antara kondisi eksisting dengan target jangka menengah masih tinggi yaitu 10,6%
3.	Sistem pengeloaan sampah 3R belum optimal
4.	Sarana dan prasarna persampahan belum memadai
5.	Peningkatan timbulan sampah akibat semakin meningkatnya kegiatan masyarakat di malam hari
6.	Keterbatasan lahan TPA sehingga kapasitas daya tampung semakin berkurang

4.



No.	Permasalahan
7.	Meningkatkan pengurangan sampah dari sumber
B. Aspek Non Teknis Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta dan Komunikasi	
1.	Aspek Pendanaan <ul style="list-style-type: none">○ Tebatasnya sumber pendanaan dari Pemerintah;○ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi;
2.	Aspek Kelembagaan <ul style="list-style-type: none">○ Hanya sebagian kecil lembaga/organisasi masyarakat yang terlibat dalam penanganan sampah;
4.	Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta <ul style="list-style-type: none">○ Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan masih rendah (ditingkat kelurahan/kecamatan hanya pada kegiatan pengumpulan sampah dari rumah)○ Keterlibatan swasta dalam pengadaan sarana persampahan masih rendah

Sumber : Analisis Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022

2.4.3 Area Berisiko dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Area berisiko dan permasalahan drainase lingkungan memberikan informasi terkait area berisiko dan permasalahan yang dihadapi Kota Payakumbuh dalam pengelolaan drainase.

- Digambarkan dalam bentuk tabel dan peta area berisiko drainase, dalam hal ini risiko terhadap genangan/banjir
- Daftar identifikasi permasalahan terkait pengelolaan drainase dengan mencantumkan permasalahan yang paling mendasar dan paling prioritas yang dihadapi. Yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan drainase lingkungan.

2.4.3.1 Area Berisiko Drainase Lingkungan

Untuk mengetahui kondisi drainase lingkungan/selokan sekitar rumah dan kejadian banjir, Studi EHRA yang telah dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2020 lalu mewajibkan emunerator EHRA untuk mengamati keberadaan saluran drainase di sekitar rumah tangga sasaran. Saluran dimaksud adalah yang digunakan untuk membuang air bekas penggunaan rumah tangga (*grey water*). Bila ada, emunerator juga mengamati dari dekat apakah air di saluran itu mengalir, apa warna airnya dan apakah terdapat tumpukan sampah di dalam

4.



saluran air itu. Saluran air yang memadai ditandai dengan aliran air yang lancar, warna yang cenderung bening atau bersih, dan tidak adanya tumpukan sampah di dalamnya. Pokok kedua dalam bagian ini adalah banjir yang didefinisikan secara sederhana yakni datangnya air ke lingkungan atau ke dalam rumah yang tengah disurvei. Air yang datang dapat berasal dari manapun termasuk luapan sungai, laut ataupun air hujan. Besarnya banjir tidak dibatasi. Artinya, air bisa setinggi ≥ 20 cm ataupun ≤ 20 cm.

Berdasarkan hasil studi EHRA, kemudian di akumulasi dengan persepsi OPD dan data skunder didalam Instrumen SSK berupa wilayah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan estimasi area permukiman rawan genangan yang kemudian dilakukan pembobotan Exposure dan Impact sehingga area beresiko terhadap drainase lingkungan tergambar pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.57
Area Berisiko Drainase Lingkungan

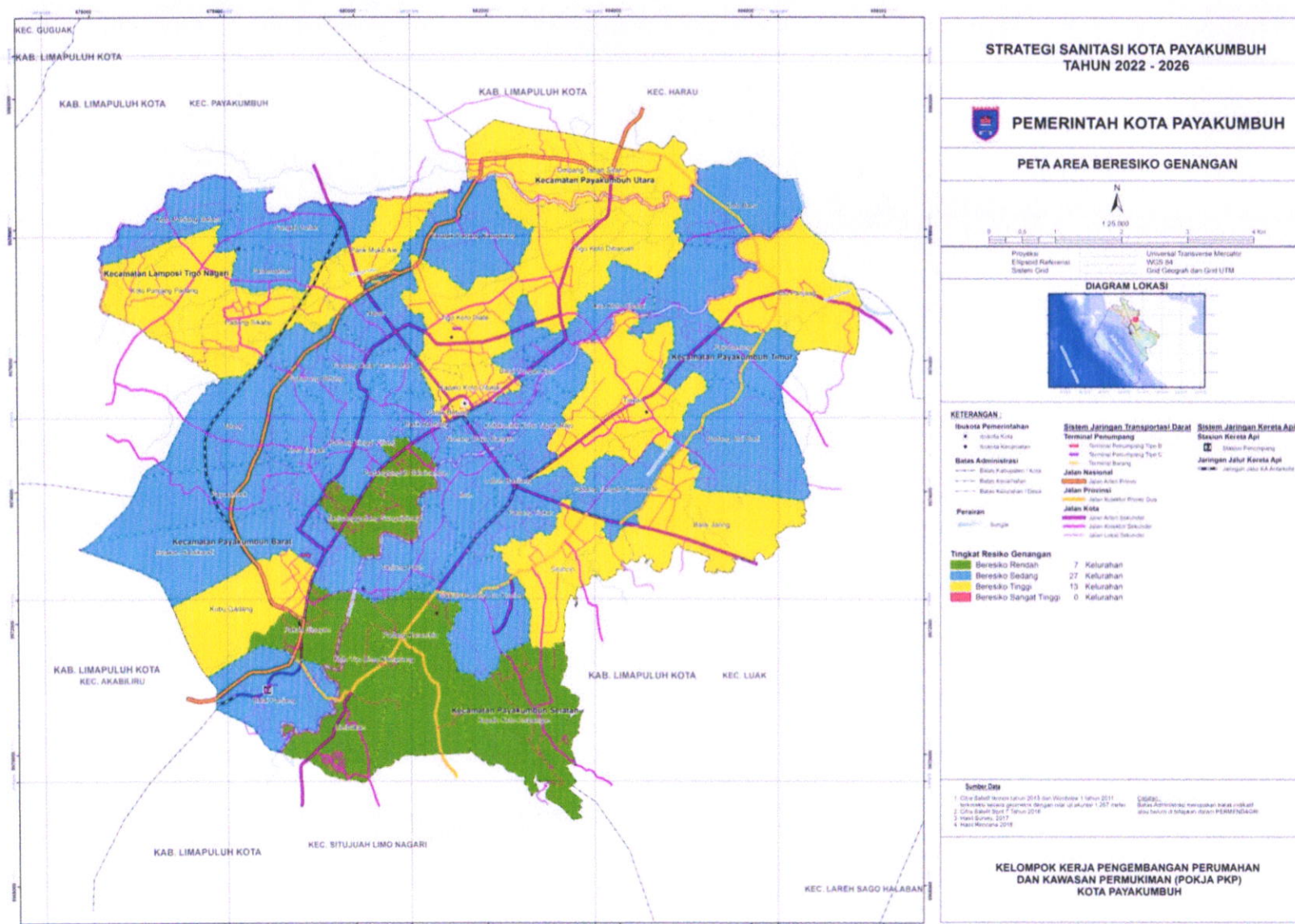
No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas		
		Kecamatan		Kelurahan
I.	Resiko 4	Tidak Ada		
II.	Resiko 3	1	Payakumbuh Barat	Kubu Gadang
				Parak Batuang
		2	Payakumbuh Timur	Balai Jariang
				Koto Panjang
				Sicincin
				Tiakar
		4	Payakumbuh Utara	Ompang Tanah Sirah
				Tigo Koto Dibuah
				Tigo Koto Diateh
				Kapalo Koto Dibalai
		5	Lamposi Tigo Nagori	Koto Panjang Padang
				Padang sikabu
				Parit Muko Aie
III.	Resiko 2	1	Payakumbuh Barat	Bulakan balai kandi
				Tanjung Pauah
				Ibuah

4.



No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan
			Labuah Basilang
			Parik Rantang
			Payolansek
			Subarang Batuang
			Koto Tengah
			Talang
			Nunang Daya Bangun
			Padang Tinggi Piliang
			Tanah mati
		2 Payakumbuh Selatan	Balai Panjang
			Sawah Padang Aua Kuniang
		3 Payakumbuh Timur	Padang Tengah Payobada
			Payobasung
			Koto Baru
			Padang Alai Bodi
			Padang Tiakar
		4 Payakumbuh Utara	Napar
			Taratak Padang Kampuang
			Koto Kaciak Kubu Tapak Rajo
			Balai Tongah Koto
			Ikua Koto Dibalai
		5 Lamposi Tigo Nagori	Koto Panjang Dalam
			Parambahan
			Sungai Durian
IV.	Resiko 1	1 Payakumbuh Barat	Padang Tongah Balai Nan Duo
			Tanjuanggodang Sungaipinago
		2 Payakumbuh Selatan	Limbukan
			Padang Karambia
			Kototuo Limokampuang
			Kapalo Koto Ampangan

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022



Gambar 2.24 Peta Area Beresiko Genangan Kota Payakumbuh



Dari tabel dan gambar di atas diperoleh informasi bahwa hasil skoring berdasarkan penilaian dan pembobotan tingkat risiko, tidak ada Kelurahan yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi (Skor 4). Sedangkan kelurahan dengan tingkat risiko tinggi (Skor 3) berjumlah 13 Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan. Kelurahan dengan tingkat risiko sedang (Skor 2) berjumlah 27 Kelurahan yang tersebar di 5 Kecamatan dan kelurahan yang beresiko rendah (Skor 1) berada di 6 kelurahan yang tersebar di 2 Kecamatan.

2.4.3.2 Permasalahan Drainase Lingkungan

Secara umum permasalahan drainase lingkungan di Kota Payakumbuh adalah terjadinya pendangkalan dan penyumbatan oleh sedimen. Disamping itu rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di saluran drainase.

Tabel 2.58
Permasalahan Drainase

No.	Permasalahan
A. Aspek Teknis	
Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1.	Terjadinya pendangkalan dan penyumbatan oleh sedimen
B. Aspek Non Teknis	
Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat, Dunia Usaha/Swasta dan Komunikasi	
1.	Aspek Pendanaan ○ Tebatasnya sumber pendanaan dari Pemerintah;
2.	Aspek Kelembagaan -
4.	Aspek Peran serta Masyarakat ○ rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di saluran drainase

Sumber : Analisis Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022

4.

PPSP

Perencanaan
Pengembangan
Santitas
Perumahan



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB 3

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI





BAB 3
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir perencanaan. Rumusan visi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi juga dapat berperan sebagai alat motivasi sebagai sumber inspirasi kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal perencanaan pengembangan sanitasi, penyamaan visi dan misi sanitasi terhadap visi dan misi daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sehingga diperoleh sinergi program yang sesuai sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi dan misi sanitasi disusun untuk masing-masing sektor yaitu air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan. Hal ini bertujuan agar visi dan misi dapat tersampaikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan sektor dan dinas terkait di dalamnya. Adapun visi dan misi Kota Payakumbuh terkait dengan sanitasi adalah;

Tabel 3.1
Visi dan Misi Sanitasi Kota Payakumbuh

Visi dan Misi Kota	
Visi	Misi
Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju	<ul style="list-style-type: none">▪ Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat, dan Kompetitif▪ Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya

4.



Payakumbuh Menang	<p>Saing dan Berkeadilan dengan Berbasis ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan▪ Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih▪ Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Visi dan Misi Sanitasi	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<p><u>Misi Air Limbah Domestik ;</u></p> <p>Peningkatan Persentase Rumah Bersanitasi Layak dan Aman</p>
	<p><u>Misi Persampahan ;</u></p> <p>Peningkatan Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan</p>
	<p><u>Misi Drainase ;</u></p> <p>Peningkatan Persentase Jalan Kota yang Memiliki Drainase</p>

3.2. Rencana Pengembangan Sanitasi

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Penentuan tahapan pengembangan sanitasi dilakukan berdasarkan hasil analisis instrumen SSK bagian sistem air limbah dan persampahan. Hasil analisis instrumen SSK merupakan *input* untuk tahapan pengembangan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau jangka menengah. Dalam penentuan target tahapan pengembangan sanitasi tersebut mengacu kepada target yang sudah ditetapkan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kota seperti RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi untuk air limbah domestik.

Di dalam target RPJMN, Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi (air limbah domestik dan persampahan).

4.



Pada sektor air limbah, target air limbah domestik dijabarkan menjadi 90% akses layak termasuk 15% akses aman.. Target air limbah tingkat provinsi selanjutnya dijabarkan ke tingkat kota yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

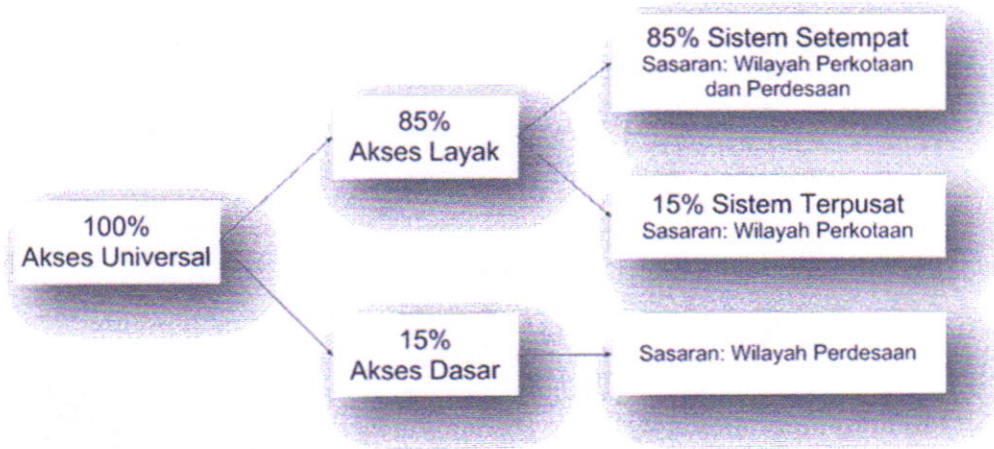
Tabel 3.2
Distribusi Target Air Limbah Domestik Nasional

No	Provinsi	Target Akses Layak (Air Limbah Domestik)	Target Akses Aman (Air Limbah Domestik)	Target akses layak (tanpa akses aman)
		%	%	%
1	Aceh	80%	13%	67,00%
2	Sumatera Utara	95%	9%	86,00%
3	Sumatera Barat	85%	9%	76,00%
4	Riau	90%	11%	79,00%
5	Jambi	80%	6%	74,00%
6	Sumatera Selatan	90%	10%	80,00%
7	Bengkulu	79%	4%	75,00%
8	Lampung	90%	10%	80,00%
9	Kep. Bangka Belitung	90%	7%	83,00%
10	Kep. Riau	90%	12%	78,00%

Sumber : Bappenas

Pencapaian akses layak dilakukan melalui pendekatan 85% pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dan 15% pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat untuk penduduk yang berada di kawasan perkotaan.

Gambar 3.1 Skema Persentase Target Akse Air Limbah Domestik



Sumber : Bappenas



Pada sektor persampahan, pengelolaan sampah mengacu pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sampai 2024 dimana pengelolaan persampahan terdiri atas pengurangan dan penanganan.

- Kegiatan pengurangan sampah merupakan upaya pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah;
- Kegiatan penanganan sampah meliputi aktivitas pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan RPJMN ini dicanangkan sebesar 20% (dua puluh persen) dan penanganan sebesar 80% (tujuh puluh persen) pada tahun 2024.

Dalam tinjauan kebijakan daerah, tahapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi selain mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi juga disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RPIJMD serta dokumen RTRW.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem antara lain adalah :

- a. Arah pengembangan wilayah yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kota Payakumbuh dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang;
- b. Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan berdasarkan luas terbangun;
- c. Kawasan beresiko sanitasi; dan
- d. Kondisi fisik wilayah.

Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sistem tersebut adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan (Center of Business Development/ komersial atau rumah tangga), serta resiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan sanitasi yang akan menjadi bahan untuk perencanaan pengembangan sistem.

4.



Penetapan Sistem dilakukan untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan program dan kegiatan dengan kondisi wilayah berdasarkan sistem yang diusulkan. Sistem sanitasi berdasarkan pentahapan implementasi dikelompokkan dalam beberapa priode pelaksanaan jangka pendek (1-2 tahun), jangka Menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10-15 tahun). Sistem sanitasi menunjukkan dimana sistem tersebut akan diterapkan.

Dalam menetapkan sistem sanitasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah:

- faktor pengelolaan (peraturan, pengelolaan kelembagaan, pengaturan operasional dan pemeliharaan, kepemilikan aset);
- faktor fisik wilayah (kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah perkotaan atau perdesaan dan karakteristik tata guna lahan/Center of Business Development (CBD), komersial atau rumah tangga);
- faktor keuangan dan pendanaan (kapasitas fiskal, dukungan, dan mekanisme pendanaan).

Pilihan sistem yang dapat digunakan umumnya adalah :

- a) Sub sektor air limbah domestik : Sistem terpusat (SPALD-T), yaitu mengalirkan air limbah domestik melalui perpipaaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sistem setempat (SPALD-S) dimana air limbah langsung diolah di tempat.
- b) Sub sektor persampahan: sistem pengolahan tidak langsung (melalui tempat penampungan sementara/TPS; sistem pengangkutan langsung dan sistem penanganan sampah di sumbernya.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tercapainya akses aman air limbah domestik	Meningkatkan akses aman dari 13,4% menjadi 26,8% pada tahun 2024	Capaian akses layak tahun 2022 adalah 90,7 % termasuk 13,4% akses aman
Tercapainya akses layak air limbah domestik	Menurunkan akses belum layak dari 9,3% menjadi 0% pada tahun 2024	Rumah tangga dengan komponen akses belum layak/cubluk masih tinggi yaitu 9,3%
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengeloaan air limbah domestik	Terbangunnya kepedulian masyarakat dan swasta dalam pengeolaan air limbah domestik	Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik masih rendah

Sumber : Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022



Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan

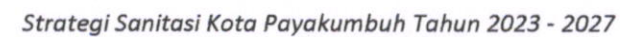
Tujuan	Sasaran	Data Dasar
(1)	(2)	(3)
Tercapainya target penanganan sampah	Meningkatkan capaian penanganan sampah dari 76,8% menjadi 80% pada tahun 2024	Capaian penanganan sampah perkotaan 76,8%
Tercapainya target pengurangan sampah	Meningkatkan capaian pengurangan sampah dari 9,4% menjadi 20% pada tahun 2024	Capaian pengurangan sampah perkotaan baru 9,4%
Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah	Terbangunnya kepedulian masyarakat dan swasta dalam pengeolaan sampah	Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah masih rendah

Sumber : Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Tahapan pengembangan air limbah domestik Kota Payakumbuh disajikan dalam tabel tahapan pengembangan air limbah domestik.. Tabel tersebut menunjukkan pereentase eksisting air limbah domestik dan target jangka pendek maupun jangka menengah dari sistem penelolaan air limbah yang direncanakan, serta *gap* yang nantinya akan dicapai kabupaten dalam pemenuhan target yang direncanakan kabupaten. Sistem pengelolaan air limbah domestik berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M2017 terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat dan Terpusat. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pengembangan pembangunan air limbah domestik, Pokja menggunakan bantuan Instrumen SSK, dimana dalam istrumen tersebut menghasilkan hasil sebagai berikut;





Tabel 3.5
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Payakumbuh

No	Komponen	Cakupan Layanan Eksisting	Target Cakupan Layanan	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
1	Akses Aman	13,38%	22,6%	26,8%
2	Akses Layak	90,67%	100,0%	100,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	74,86%	75,0%	72,7%
	Akses Layak Bersama	2,43%	2,4%	0,4%
	Akses Layak Khusus Perdesaan	0,00%	0,0%	0,0%
3	Belum Layak	9,33%	0,0%	0,0%
4	BABS di Tempat Terbuka	0,0%	0,0%	0,0%
	Total	100%	100%	100%

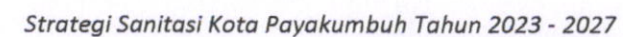
Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, 2022

b. Tahapan Pengembangan Persampahan Rumah Tangga

Tahapan pengembangan persampahan dibagi menjadi klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan yang disajikan dalam bentuk tabulasi tabel. Pada bentuk tabel menunjukkan persentase eksisting serta target jangka pendek dan menengah dari sistem penanganan persampahan eksisting dan yang direncanakan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, sistem pengelolaan persampahan terbagi atas upaya pengurangan dan penanganan dimana persentase pengurangan sampah lebih kecil dibandingkan sampah yang tertangani ke tempat pemrosesan akhir. Gap pengurangan dan penanganan ini terlihat lebih besar di wilayah perdesaan yang karena tingkat risiko timbulan sampah di wilayah perdesaan lebih didominasi pada tingkat risiko rendah.

Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pentahapan pengembangan persampahan, Pokja PKP Kota Payakumbuh menggunakan bantuan dari Instrumen SSK dimana dalam instrumen tersebut terdapat 3 (tiga) kemungkinan kondisi yang dapat diterapkan yaitu; 1). Pengurangan Sampah, 2). Penanganan Sampah dan 3). Sampah yang tidak terkelola.

4.





Tabel 3.6
Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan Kota Payakumbuh

No	Komponen	Cakupan Layanan Eksisting	Target Cakupan Layanan	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
1	Pengurangan Sampah	9,4%	17,0%	20,0%
2	Penanganan Sampah	76,8%	78,5%	80,2%
3	Sampah Tidak Terkelola	13,8%	4,5%	0,0%
Total		100%	100%	100%

Sumber : Instrumen SSK Kota Payakumbuh, 2022

3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses air limbah domestik dan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Skenario Pencapaian Sasaran Sanitasi untuk Jangka Menengah

KOMPONEN	TAHUN					
	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
AIR LIMBAH DOMESTIK						
Akses Aman	13,4%	18,0%	22,6%	24,0%	25,4%	26,8%
Akses Layak	90,7%	95,3%	96,3%	97,3%	98,3%	100,0%
Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	74,9%	75,0%	75,0%	74,0%	73,6%	72,7%
Akses Layak Bersama	2,4%	2,4%	2,4%	2,0%	1,0%	0,4%
Akses Layak Khusus Perdesaan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Belum Layak	9,3%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
BABS di Tempat Terbuka	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
PERSAMPAHAN						
Pengurangan Sampah	9,4%	16,0%	28,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Penanganan Sampah	76,8%	84,0%	72,0%	70,0%	70,0%	70,0%
Sampah Tidak Terkelola	13,8%	9,2%	4,5%	0%	0%	0%

Sumber : Analisa Pokja PKP dan Instrumen SSK Kota Payakumbuh, 2022



3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Analisa perkiraan kemampuan daerah untuk pendanaan sanitasi dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran ini, analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kota Payakumbuh. Dari analisis belanja APBD akan terlihat kecenderungan pertumbuhan belanja sanitasi di Kota Payakumbuh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. Kecenderungan ini yang akan digunakan untuk memperkirakan besaran belanja sanitasi di Kabupaten hingga akhir periode perencanaan SSK.

Untuk menetapkan besaran belanja sanitasi yang lebih terstruktur, maka selain hal-hal di atas perlu juga dilakukan identifikasi biaya operasional dan pemeliharaan untuk aset sanitasi yang telah terbangun. Untuk itu analisis dilengkapi juga dengan identifikasi aset infrastruktur sanitasi yang ada di Kota Payakumbuh (aset sanitasi kota, aset sanitasi Provinsi, maupun aset sanitasi pusat). Lebih jauh lagi terkait biaya operasional/pemeliharaan pendanaan bersama dalam pelaksanaan operasional/pemeliharaan untuk setiap aset sanitasi provinsi dan aset sanitasi pusat, serta kapan aset akan diserahkan kepada daerah sehingga pada tahun berapa biaya operasional/pemeliharaan atas aset terkait akan sepenuhnya ditanggung oleh daerah. Dengan melakukan analisis terhadap hal ini, maka didapatkan tingkat pertumbuhan pendanaan untuk operasional/pemeliharaan di Kota Payakumbuh. Dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan tersebut hingga akhir periode perencanaan SSK, maka secara logis dapat ditentukan perkiraan yang rasional mengenai besaran belanja APBD Kota Payakumbuh yang akan dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan SSK.

Sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan analisis adalah untuk menetapkan perkiraan besarnya pendanaan sanitasi oleh APBD Kota Payakumbuh hingga akhir periode perencanaan SSK. Untuk bisa mendapatkan besaran pendanaan APBD tersebut, maka perlu diperhitungkan besarnya belanja sanitasi dalam APBD dikurangi dengan DAK dan pinjaman/hibah untuk pembangunan sanitasi yang diterima oleh Kabupaten dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Pokja juga memasukkan besarnya komitmen pendanaan yang ditetapkan oleh daerah sebagai pertimbangan lain dalam melakukan estimasi pendanaan sanitasi pada tahun-tahun hingga akhir periode perencanaan SSK. Adapun hasil analisis perhitungan di atas disajikan pada tabel berikut.

4.



Tabel 3.8

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Payakumbuh untuk Sanitasi

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi ^(1.1+1.2+1.3+1.4)	18.802.970.252	8.297.773.023	14.029.204.510	11.629.838.741	21.801.311.247	-0,26%
1.1	Air Limbah Domestik	4.943.174.334	4.662.462.989	5.342.979.029	4.743.031.773	3.668.906.950	1,22%
1.2	Persampahan	1.649.870.200	3.201.411.665	8.388.374.499	6.782.912.968	7.338.711.003	-0,47%
1.3	Drainase Lingkungan	11.783.176.198	0	0	0	10.076.710.994	-0,05%
1.4	PHBS	426.749.520	433.898.369	297.850.982	103.894.000	716.982.300	0,05%
2	Dana Alokasi Khusus ^(2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0	0	
2.1	DAK Sanitasi						
2.2	DAK Lingkungan Hidup						
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman						
Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi ⁽¹⁻²⁾		18.802.970.252	8.297.773.023	14.029.204.510	11.629.838.741	21.801.311.247	-0,26%
Total Belanja Modal		413.784.951.357	431.015.029.009	516.598.869.240	479.600.086.704	731.041.110.447	0,30%
% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung		4,54%	1,93%	2,72%	2,42%	2,98%	3,65%
Komitmen Pendanaan APBD Untuk Pendanaan Sanitasi Ke Depan (% Terhadap Belanja Langsung Atau pun Nilai Absolut)							4,00%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat ditetapkan perkiraan (estimasi) belanja APBD ke depan selama periode perencanaan SSK sebagai berikut:



Tabel 3.9
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Belanja Modal	731.063.332.012	731.085.554.252	731.107.777.167	731.130.000.758	731.152.225.025	3.655.538.889.213
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	21.800.747.350	21.800.183.468	21.799.619.601	21.799.055.748	21.798.491.909	108.998.098.076
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	29.242.533.280	29.243.422.170	29.244.311.087	29.245.200.030	29.246.089.001	146.221.555.569

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022



Perkiraan besaran pendanaan APBD murni dan besaran komitmen pendanaan untuk sanitasi diperbanding dan didiskusikan sebagai rentang logis pendanaan sanitasi hingga akhir periode perencanaan SSK. Besaran pendanaan sanitasi yang disepakati adalah Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi ditambah 1% dari perkiraan APBD murni tersebut.

Mengingat pendanaan sanitasi dapat dibagi menjadi pendanaan operasional/pemeliharaan infrastruktur terbangun dan pendanaan untuk investasi baru, maka perlu dianalisis struktur pendanaan khususnya dalam hal ini untuk pendanaan operasional/pemeliharaan. Pendanaan investasi ke depan, dalam analisis ini tidak didasarkan pada pertumbuhan pendanaan APBD daerah untuk investasi sanitasi dalam 5 (lima) tahun terakhir, tetapi diperhitungkan berdasarkan hasil estimasi perencanaan teknis sebagaimana telah ditetapkan pada bagian terdahulu dalam SSK. Dengan melakukan perhitungan pertumbuhan untuk pendanaan operasional/pemeliharaan, maka perkiraan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sanitasi baru di tahun-tahun mendatang akan dapat digambarkan selisih antara perkiraan total ketersediaan APBD murni sanitasi (berdasarkan estimasi pertumbuhan ataupun persentase komitmen Kabupaten) dengan perkiraan total kebutuhan operasional/pemeliharaan hingga akhir periode perencanaan SSK. Dalam hal ini perkiraan besaran pendanaan operasional/pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

1. Melalui estimasi pertumbuhan pendanaannya.
2. Melalui perkiraan pembangunan infrastruktur setiap tahunnya hingga akhir tahun perencanaan SSK, kemudian diperhitungkan biaya operasional/pemeliharaan berdasarkan standar biaya.

Perhitungan pendanaan operasional/pemeliharaan harus berdasarkan inventarisir aset infrastruktur sanitasi terbangun yang dimiliki oleh daerah, aset infrastruktur sanitasi Provinsi maupun pusat yang didanai sebagian operasional/pemeliharaannya oleh daerah, ataupun perkiraan aset infrastruktur sanitasi Provinsi dan pusat yang akan diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan data pendanaan operasional/pemeliharaan yang telah telah dimutakhirkan dan data dari tabel di atas, maka tabel perhitungan pertumbuhan pendanaan sanitasi untuk operasional/pemeliharaan disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3.10
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi 5 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi	20.683.267.277	9.127.550.325	15.432.124.961	12.792.822.615	23.981.442.372	-0,26%
1,1	Air Limbah Domestik	4.943.174.334	4.662.462.989	5.342.979.029	4.743.031.773	3.668.906.950	1,22%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Air Limbah Domestik</i>	494.317.433	466.246.299	534.297.903	474.303.177	366.890.695	
1,2	Sampah Rumah Tangga	1.649.870.200	3.201.411.665	8.388.374.499	6.782.912.968	7.338.711.003	-0,47%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah Rumah Tangga</i>	164.987.020	320.141.167	838.837.450	678.291.297	733.871.100	
1,3	Drainase Perkotaan	11.783.176.198	0	0	0	10.076.710.994	-0,05%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Drainase Lingkungan</i>	1.178.317.620	0	0	0	1.007.671.099	
1,4	PHBS/Dokumen Sanitasi	426.749.520	433.898.369	297.850.982	103.894.000	716.982.300	0,05%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) PHBS</i>	42.674.952	43.389.837	29.785.098	10.389.400	71.698.230	

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022



Berdasarkan perhitungan pertumbuhan di atas, maka dapat dilakukan perhitungan perkiraan biaya operasional/pemeliharaan hingga akhir tahun perencanaan SSK dengan menggunakan angka pertumbuhan rata-rata yang dihasilkan. Arahkan perhitungan pendanaan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun disaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun Hingga Tahun 2027

No	Uraian	Tahun					Total pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	2.180.667.327	2.181.274.516	2.181.953.283	2.181.953.283	2.181.953.283	10.907.801.691
1.1	Air Limbah Domestik	3.713.682.355	3.759.004.201	3.804.879.155	3.804.879.155	3.804.879.155	18.887.324.020
1.1.1	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	371.368.236	375.900.420	380.487.915	380.487.915	380.487.915	1.888.732.402
1.2	Sampah Rumah Tangga	7.304.410.989	7.270.271.288	7.236.291.151	7.236.291.151	7.236.291.151	36.283.555.732
1.2.	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	730.441.099	727.027.129	723.629.115	723.629.115	723.629.115	3.628.355.573
1.3	Drainase Lingkungan	10.071.258.777	10.065.809.510	10.060.363.191	10.060.363.191	10.060.363.191	50.318.157.861
1.3.1	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	1.007.125.878	1.006.580.951	1.006.036.319	1.006.036.319	1.006.036.319	5.031.815.786
1.4	PHBS	717.321.150	717.660.159	717.999.329	717.999.329	717.999.329	3.588.979.297
1.4.1	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	71.732.115	71.766.016	71.799.933	71.799.933	71.799.933	358.897.930

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022

Berdasarkan perhitungan perkiraan pendanaan APBD sanitasi murni daerah, perhitungan perkiraan besaran komitmen pendanaan ke depan, serta perhitungan perkiraan pendanaan operasional/pemeliharaan, maka dapat diperhitungkan perkiraan ketersediaan ataupun perkiraan kemampuan APBD untuk mendanai program/kegiatan sanitasi sebagaimana diidentifikasi dalam SSK.



Perkiraan ketersediaan besaran APBD daerah untuk mendanai program/kegiatan dalam SSK didapat dengan cara : 1) mengurangi besaran APBD murni terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan, dan 2) mengurangi besaran komitmen pendanaan sanitasi terhadap kebutuhan biaya operasional/pemeliharaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut.

Tabel 3.12
Perkiraan Kemampuan APBD dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Tahun					Total pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasi/Pemeliharaaa	2.180.667.327	2.181.274.516	2.181.953.283	2.181.953.283	2.181.953.283	10.907.801.691
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	21.800.747.350	21.800.183.468	21.799.619.601	21.799.055.748	21.798.491.909	108.998.098.076
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	29.242.533.280	29.243.422.170	29.244.311.087	29.245.200.030	29.246.089.001	146.221.555.569
4	Perkiraan Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) ²⁻¹	19.620.080.023	19.618.908.952	19.617.666.318	19.617.102.465	19.616.538.627	98.090.296.385
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) ³⁻¹	27.049.289.400	27.036.387.586	27.022.790.518	27.023.679.461	27.024.568.432	135.156.715.397

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh, 2022

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui pendanaan yang diestimasikan ataupun komitmen oleh Kota Payakumbuh melalui APBD hingga akhir tahun perencanaan SSK untuk mendanai program/kegiatan SSK sebesar Rp. 135.156.715.397 selama 5 tahun ke depan.



BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI





BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Dalam konteks penyusunan SSK, strategi adalah rencana tentang serangkaian manuver, baik yang kasat mata maupun yang tak-kasat mata, untuk lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan pembangunan sanitasi. Mengingat perumusan strategi adalah untuk mencapai tujuan organisasi, maka tentu saja sebelum merumuskan strategi harus dipahami dulu tujuan (termasuk sasaran) yang ingin di capai. Pemahaman akan tujuan pembangunan sanitasi akan menumbuhkan spirit "*Shared Purposes*" guna menyatukan kepentingan bersama dalam rangka mencapaitujuan tersebut. Apabila sudah tumbuh spirit "*Shared Purposes*" maka diharapkan "*ego sektoral*" yang kadang muncul dapat diminimalisir.

Strategi sangat penting dalam sebuah dokumen perencanaan karena pilihan strategi yang tepat akan membantu dalam menetapkan program dan kegiatan yang sesuai dan tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumusan stratetgi perlu didiskusikan dan disepakati bersama Pokja dan dikonsultasikan dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bab ini menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyakarat miskin). Strategi dapat disusun menggunakan analisis *gap* yaitu suatu metoda pengukuran untuk mengetahui kesenjangan (*gap*) antara kinerja suatu variabel dengan target atau harapan dari variabel tersebut. Dalam hal penyusunan SSK ini, analisis gap menggunakan instrumen SSK.



Komponen untuk analisis ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Karakteristik dari situasi saat ini (Kondisi Eksisting)
2. Hal-hal yang diperlukan di masa mendatang untuk memenuhi tujuan (Target)
3. Hal-hal yang menyebabkan kesenjangan. (Permasalahan)

Dalam hal ini analisis gap digunakan untuk mengidentifikasi setiap tindakan yang harus dilakukan agar bisa mengatasi permasalahan. Di samping itu juga untuk memperkirakan berapa waktu, biaya dan sumberdaya untuk mencapai keadaan yang diharapkan di masa mendatang.

4.1. STRATEGI AIR LIMBAH DOMESTIK

Strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan permasalahan yang mendasar dan isu strategi yang ada saat ini sebagaimana yang dirinci pada bab II adalah sebagai berikut;

- **Strategi 1 : Menyusun Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik** Yang disesuaikan dengan komponen Standar Pelayanan Minimum sektor Air Limbah Domestik

Strategi penyusunan perda berupa Peraturan tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ini bertujuan sebagai payung hukum bagi penyelenggara sektor air limbah domestik dalam menjalankan program air limbah domestik nantinya kedepan.

Tujuan : menyediakan pedoman/acuan yang sah dalam pengelolaan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan sistem pengelolaan air limbah di Kota Payakumbuh

Sasaran : tersedianya Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik

- **Strategi 2 : Meningkatkan Alokasi Pendanaan Pada Sektor Air Limbah Domestik**

Strategi meningkatkan alokasi pendanaan pada sektor air limbah domestik adalah sebagai bentuk dukungan kegiatan yang bersumber dari APBN, Belanja Kementerian, DAK Sanitasi, APBD Provinsi, dana CSR dan Partisipasi Masyarakat.

4.



Tujuan : Memberikan pelayanan maksimal terhadap pengelolaan air limbah domestik pada masyarakat

Sasaran : Pada tahun 2024, 100% rumah tangga sudah memiliki akses layak, dimana 26,8% memiliki Sistem Pengolahan Air Limbah Domesti (SPALD) dengan Kategori Aman

➤ **Strategi 3 : Optimalisasi Sarana dan Prasarana IPLT**

Strategi mengoptimalkan sarana dan prasarana IPLT adalah bentuk upaya memberikan pelayanan kepada rumah tangga yang menggunakan tangki septik individual (SPALD-S Individual dan Komunal.

Tujuan : Memberikan pelayanan pengelolaan lumpur tinja untuk rumah tangga yang menggunakan sistem *on-site* (setempat)

Sasaran : Meningkatkan akses layanan pengelolaan lumpur tinja di IPLT

➤ **Strategi 4 : Menambah Sarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)**

Strategi program pembangunan sarana sistem pengolahan air limbah domestik individual, untuk meningkatkan layanan 100% rumah tangga yang sudah dalam kategori akses layak.

Tujuan : Meningkatkan sarana sistem pengolahan air limbah domestik untuk memberikan layanan maksimal ditengah masyarakat serta pencapaian target SPM.

Sasaran : Tercapainya target layanan air limbah domestik 100 % layak tahun 2024 dan Penjaminan Kualitas Air Baku Mutu Air Limbah Domestik hasil Pengolahan IPLT (Permen LHK No. P.68/2016)



- **Strategi 5 : Meningkatkan penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat melalui Kampanye PHBS dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait**

Strategi meningkatkan penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat adalah sebagai upaya memicu semangat masyarakat dalam pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik yang aman terhadap lingkungan

Tujuan : Memicu semangat masyarakat dalam sistem pengolahan air limbah domestik/rumah tangga

Sasaran : Meningkatkan dan mengembangkan pemicuan dalam penyelenggaraan sistem air limbah domestik yang berbasis masyarakat

- **Strategi 6 : Meningkatkan dan mencari sumber alternatif pembiayaan peningkatan kepemilikan jamban sehat (Pokok Pikiran Dewan, CSR, Baznas dll)**

Strategi meningkatkan sumber pendanaan alternatif dalam penyediaan jamban sehat di masyarakat

Tujuan : Mendapatkan sumber pendanaan lainnya dalam meningkatkan akses terhadap kepemilikan jamban sehat.

Sasaran : Meningkatkan dan meningkatkan kualitas jamban

4.



- **Strategi 7 : Mempertahankan pengelolaan air limbah domestik dari hulu ke hilir dengan kampanye, edukasi serta kegiatan yang melibatkan masyarakat secara masif dan berkelanjutan**

Strategi mempertahankan pengelolaan air limbah domestik secara berkelanjutan bagi aparat pemda, dunia usaha dan masyarakat.

Tujuan : Mendapatkan semangat dan etos kerja yang terus menerus dalam pengelolaan air limbah domestik skala kota.

Sasaran : Terwujudnya iklim yang sehat bagi aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

4.2. STRATEGI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Strategi pengembangan persampahan untuk 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis dan permasalahan mendasar yang ada saat ini adalah sebagai berikut;

- **Strategi 1 : Mengoptimalkan instansi pengelolaan persampahan dalam melakukan pengelolaan sampah**

Strategi mengoptimalkan instansi pengelola sampah dalam melakukan pengelolaan sampah adalah upaya untuk mencapai target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui Jakstranas.

Tujuan : Meningkatkan kebersihan jalan-jalan umum, lingkungan umum dan permukiman

Sasaran : Memberikan pelayanan maksimal terhadap pengelolaan persampahan skala kota.



➤ **Strategi 2 : Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/persampahan**

Strategi meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam pengelolaan kebersihan/sampah adalah sebagai upaya melakukan pengurangan sampah yang saat ini baru sebesar 9,4% (Instrumen SSK 2022)

- Tujuan : ■ Mengembangkan lembaga/organisasi masyarakat yang terlibat dalam penanganan sampah khususnya di dalam kawasan permukiman penduduk
- Meningkatkan praktek pemilahan sampah dari sumber dalam mengembangkan potensi nilai ekonomis sampah

Sasaran : Tercapainya target pengurangan sampah rumah tangga 20% pada tahun 2024

➤ **Strategi 3 : Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah rumah tangga**

Strategi meningkatkan alokasi anggaran dalam pengelolaan persampahan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN Murni, belanja Kementerian, DAK Sanitasi maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat. Selain hal tersebut, strategi ini juga dilakukan untuk mengatasi kondisi kurang tertariknya sektor swasta dalam melakukan investasi di bidang pengelolaan sampah.

- Tujuan : ■ Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana persampahan
- Meningkatkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Sasaran : ■ 100% sampah terkelola di Kota Payakumbuh pada akhir Tahun 2024

■ 80% sampah tertangani ke pemrosesan akhir sampah di wilayah perkotaan yang ada di Kota Payakumbuh.



➤ **Strategi 4 : Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan**

Strategi meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan.

Tujuan :

- meningkatkan peran masyarakat dalam penanganan sampah
- meningkatkan peran swasta dalam pengadaan sarana persampahan

Sasaran :

- Meningkatnya peran masyarakat dalam penanganan sampah
- Meningkatnya peran swasta dalam pengadaan sarana persampahan melalui alokasi dana CSR untuk persampahan
- Terjadinya pengurangan sampah dari sumbernya sebesar 13,5% pada akhir Tahun 2024

➤ **Strategi 5 : Menambah sarana dan prasarana sistem persampahan di lingkungan permukiman penduduk**

Strategi menambah sarana dan prasarana sistem persampahan di lingkungan permukiman dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan rumah tangga yang memperlakukan sampah dengan cara tidak benar seperti dibakar, dibuang ke sungai/laut, di buang ke lahan kosong/kebun/hutan dan sebagainya

Tujuan : Mengurangi kebiasaan rumah tangga yang memperlakukan sampah dengan cara tidak benar

Sasaran :

- 0,00% sampah rumah tangga tidak dikelola di wilayah perkotaan pada akhir Tahun 2024
- Meningkatkan kebersihan lingkungan permukiman penduduk

➤ **Strategi 6 : Meningkatkan sosialisasi dan kampanye pengelolaan persampahan**

Strategi meningkatkan sosialisasi dan kampanye terkait pengelolaan persampahan dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi dan kampanye pengelolaan persampahan



mengingat media komunikasi yang terlibat dalam mempromosikan pengelolaan persampahan masih sangat terbatas

Tujuan : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pemicuan dengan pola STBM)

Sasaran : Tersosialisasikannya program pengelolaan persampahan

PPSP

Perencanaan
Pengembangan
Santitas
Pemukim



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

BAB 5

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI





BAB 5

PROGRAM, KEGIATAN

DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Umum

Program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi dijabarkan dalam bentuk tabulasi program dan kegiatan pengelolaan sanitasi yang akan menjadi prioritas pembangunan sanitasi di Kota Payakumbuh periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Program dan kegiatan ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sub sektor air limbah dan persampahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan daerah Kota Payakumbuh.

Kebutuhan pendanaan disusun berdasarkan hasil evaluasi dan prediksi atas kebutuhan pembangunan sanitasi setiap tahun. Program dan kegiatan ini dijabarkan dalam porsi pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Payakumbuh, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, DAK (Dana Alokasi Khusus), Swasta/CSR serta bersumber dari Masyarakat.

Untuk mendapatkan menjabarkan secara rinci dan lengkap terkait program, kegiatan, indikasi biaya dan sumber pendanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memahami strategi yang telah disusun sebelumnya

Sebelum memulai menyusun Program dan Kegiatan pengembangan sanitasi, Pokja memahami kembali Strategi yang telah disusun.

4.



2. Merumuskan Program pembangunan sanitasi yang perlu dilakukan

- Berdasarkan permasalahan mendesak yang dihadapi dan hasil Instrumen SSK, ditetapkan urutan prioritas.
- menyusun program pembangunan sanitasi berdasarkan rumusan strategi dengan menggunakan Instrumen SSK sebagai dasar untuk menentukan jenis program/kegiatan yang disarankan.
- Selanjutnya, menetapkan urutan prioritas Program yang dilakukan berdasarkan indikasi masyarakat yang terkena dampak dari pelaksanaan program (penerima manfaat).

3. Menetapkan Program / Kegiatan Prioritas

- Prioritasi program dilakukan karena keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah dan keterbatasan waktu pelaksanaan (5 tahun) untuk pengembangan sanitasi permukiman.
- Mendiskusikan dan menyepakati bobot untuk masing-masing kriteria.
- Memasukkan kegiatan utama yang diambil dari hasil KKL, untuk kegiatan infrastruktur seperti: Pembangunan TPS 3R, SPALD-S, IPLT dan sebagainya serta non-infrastruktur yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan infrastruktur seperti: penyusunan Rencana Induk, penyusunan Perda, pengadaan alat angkut sampah.
- Memasukkan dan mengurutkan program sesuai prioritas dan dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan pendukungnya.
- Kegiatan pendukung dari kegiatan utama infrastruktur secara otomatis memiliki prioritas yang sama dengan kegiatan utamanya.
- Melakukan prioritasi untuk setiap komponen (Air Limbah dan Persampahan)
- Melakukan pembahasan hasil prioritasi program /kegiatan di tingkat Pokja.

4.



4. Merumuskan rangkaian tahapan Sub Kegiatan untuk masing-masing Program/Kegiatan pengembangan sanitasi
 - Merumuskan rangkaian sub kegiatan untuk Program yang disusun dengan memperhatikan tahapan SIDLACOM (*Survey, Investigation, Land Aquisition, Construction, Operational and Maintenance*) untuk setiap rangkaian sub kegiatan (khususnya untuk kegiatan pengembangan infrastruktur).
 - Menetapkan prioritas sub-sub kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan tahapan SIDLACOM. Tahapan awal mendapat prioritas lebih tinggi untuk dilakukan dibandingkan tahapan selanjutnya.
 - Memeriksa ulang status usulan sub kegiatan yang telah disusun di apakah sudah dilakukan atau belum di tahun-tahun sebelumnya.
 - Memperbaharui daftar rangkaian sub kegiatan.
 - Mensinkronisasikan daftar kegiatan yang telah disusun dengan daftar kegiatan tahun (n+1) yang sudah direncanakan.
5. Memeriksa alur logis untuk melihat hubungan antara permasalahan sanitasi dan penanganan yang akan dilakukan dengan mengacu pada instrumen KKL.
6. Mendiskusikan dan merumuskan jadwal pelaksanaan, indikasi kebutuhan biaya, dan indikasi sumber pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-masing kegiatan/sub kegiatan
7. Periksa kebutuhan pendanaan tersebut dengan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan yang diambil dalam pendanaan sanitasi
8. Internalisasi hasil penyusunan program, kegiatan dan indikasi pendanaan.
9. Eksternalisasi hasil penyusunan program/kegiatan dengan Pemangku Kepentingan.

4.



5.2. Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun

Hasil rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota Payakumbuh, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, DAK (Dana Alokasi Khusus), Swasta/CSR maupun penganggaran yang bersumber dari masyarakat untuk sektor air limbah domestik dan persampahan.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI BIAYA (Juta Rp.)					
		TAHUN ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	AIR LIMBAH DOMESTIK	16.470	18.000	22.200	18.350	17.750	92.770
2	PERSAMPAHAN	16.857	29.528	24.298	30.663	20.605	121.951
Jumlah (a)		33.327	47.528	46.498	49.013	38.355	214.721

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, total indikasi kebutuhan biaya pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun mendatang sebesar **Rp. 214.721.000.000,-** (Dua Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dengan masing-masing sub sektor yaitu Air Limbah Domestik sebesar **Rp. 92.770.000.000,-** (Sembilan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Persampahan sebesar **Rp. 121.951.000.000,-** (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah)



Tabel 5.2.
Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun
(dalam juta Rp.)

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI BIAYA (Juta Rp.)					
		TAHUN ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	KEBUTUHAN PENDANAAN	33.327.000.000	47.528.100.000	46.498.410.000	49.013.251.000	38.354.576.100	214.721.337.100
2	KEMAMPUAN PENDANAAN	29.242.533.280	29.243.422.170	29.244.311.087	29.245.200.030	29.246.089.001	146.221.555.568
3	SELISIH (Rp.)	4.084.466.720	18.284.677.830	17.254.098.913	19.768.050.970	9.108.487.099	68.499.781.532
4	SELISIH (%)	12%	38%	37%	40%	24%	32%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dalam proses penganggaran terjadi kesenjangan pendanaan (*funding gap*) antara kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi dengan perkiraan kemampuan pendanaan oleh APBD Murni untuk sanitasi yaitu senilai minus Rp. 68.499.781.532,- (Enam Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau 32%.

Untuk rekapitulasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi berdasarkan sumber sumber APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR/LSM/ZISWAF dan sumber kontribusi dari masyarakat disajikan pada tabel 5.3. di bawah ini.



Tabel 5.3
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan
(dalam juta Rp.)

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
A	Pemerintah						
1	APBD Kota	12.427	17.553	21.548	16.913	18.555	86.996
2	APBD Provinsi	10.250	20.800	10.250	10.300	10.350	61.950
3	APBN	10.500	9.025	14.550	21.650	9.300	65.025
	Jumlah A	33.177	47.378	46.348	48.863	38.205	213.971
	Daftar Tunggu	-	-	-	-	-	-
B	Non-Pemerintah						
1	Swasta/ CSR/ZISWAF	150	150	150	150	150	750
2	Masyarakat						
	Jumlah B	150	150	150	150	150	750
	Total A + B	33.327	47.528	46.498	49.013	38.355	214.721

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel 5.3 di atas tergambar total indikasi kebutuhan pembiayaan pembangunan sanitasi Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebesar Rp. 214.721.000.000,- (Dua ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dimana indikasi pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah senilai Rp. 213.971.000.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dan indikasi pembiayaan yang bersumber dari Non-Pemerintah senilai Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).



5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Rekapitulasi total indikasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan sumber anggaran pemerintah yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN akan diuraikan di bawah ini.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan
Dengan Sumber Pendanaan APBD Kota

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI BIAYA (Juta Rp.)					
		TAHUN ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	AIR LIMBAH DOMESTIK	5.670	8.550	8.200	7.850	7.950	38.220
2	PERSAMPAHAN	6.757	9.003	13.348	9.063	10.605	48.776
Jumlah (a)		12.427	17.553	21.548	16.913	18.555	86.996

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel 5.4 di atas tergambar indikasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebesar Rp. 86.996.000.000,- (Delapan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan rincian indikasi pendanaan pada sektor Air Limbah Domestik sebesar Rp. 38.220.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan sektor Persampahan sebesar Rp. 48.776.000.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).



Tabel 5.5
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan
Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI BIAYA (Juta Rp.)					
		TAHUN ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	AIR LIMBAH DOMESTIK	150	300	250	300	350	1.350
2	PERSAMPAHAN	10.100	20.500	10.000	10.000	10.000	60.600
Jumlah (a)		10.250	20.800	10.250	10.300	10.350	61.950

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel 5.5 di atas tergambar indikasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebesar Rp. 61.950.000.000,- (Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian indikasi pendanaan pada sektor Air Limbah Domestik sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sektor Persampahan sebesar Rp. 60.600.000.000,- (Enam Puluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).



Tabel 5.6
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan
Dengan Sumber Pendanaan APBN

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI BIAYA (Juta Rp.)					
		TAHUN ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	AIR LIMBAH DOMESTIK	10.500	9.000	13.600	10.050	9.300	52.450
2	PERSAMPAHAN	0	25	950	11.600	0	12.575
Jumlah (a)		10.500	9.025	14.550	21.650	9.300	65.025

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel 5.6 di atas tergambar indikasi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat atau melalui sumber pendanaan APBN untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebesar Rp. 65.025.000.000,- (Enam Puluh Lima Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian indikasi pendanaan pada sektor Air Limbah Domestik sebesar Rp. 52.450.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan sektor Persampahan sebesar Rp. 12.575.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).



5.4. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berikut ini rekapitulasi total indikasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2023 sampai dengan tahun 2027) berdasarkan sumber pendanaan non-pemerintah yaitu Swasta/CSR/LSM/ZISWAF.

Tabel 5.7
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun per Sumber Pendanaan
Dengan Sumber Pendanaan Swasta/CSR/LSM/ZISWAF

NO	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI BIAYA (Juta Rp.)					
		TAHUN ANGGARAN					TOTAL ANGGARAN
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	AIR LIMBAH DOMESTIK	150	150	150	150	150	750
2	PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	0
Jumlah (a)		150	150	150	150	150	750

Sumber : Analisa Pokja PKP Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel 5.7 di atas tergambar indikasi anggaran yang dialokasikan oleh Swasta/CSR/LSM/ZISWAF untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian indikasi pendanaan pada sektor Air Limbah Domestik sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan tidak ada pendanaan oleh Swasta/CSR/LSM/ZISWAF untuk sektor Persampahan.



BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK





BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian sebagai upaya mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Monitoring atau pemantauan berfungsi untuk mempermudah dalam mengamati terus-menerus kejadian dan masalah, sehingga pengelolaan berjalan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, namun juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula yang kemudian memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah.

Disamping itu, monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan sebaik mungkin dan juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan.

Hasil monitoring adalah kesimpulan tentang ketepatan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

4.



Hasil evaluasi adalah kesimpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui perbandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumber daya melalui perbandingan realisasi pemanfaatan sumber daya dengan rencana pemanfaatan sumber daya.

Secara umum metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sanitasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu;

1. Metode Langsung

Metode ini berupa kunjungan langsung lapangan yang dilaksanakan secara berkala pada saat program/kegiatan sedang berjalan. Metode ini lebih bersifat pemeriksaan fisik.

2. Metode Pelaporan

Metode ini dilakukan melalui dokumen pelaporan realisasi fisik dan keuangan masing-masing kegiatan secara periodik.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan pengecekan dan validasi data terhadap dokumen kegiatan dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan survei ke masyarakat sebagai responden mengenai tanggapan dan opini mereka terhadap kegiatan sedang dilakukan.

Data yang dihimpun pada saat monitoring menjadi dasar dalam melakukan analisa evaluasi, termasuk identifikasi dampak program/kegiatan bagi masyarakat yang menjadi sasarannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana perlu disusun kerangka logis perencanaan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal mengenai tujuan, sasaran, indikator, target dan rencana pembiayaan. Data ini nantinya digunakan sebagai basis data yang akan dipergunakan dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Berikut disajikan matriks Monitoring dan Evaluasi Implementasi Dan Mekanisme Monitoring Evaluasi Implementasi SSK di Kota Payakumbuh untuk 5 (Lima) tahun Kedepan.

4.



Tabel 6.1
Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Tahun 2023

No	Objek Pemantauan	Rencana Monitoring Evaluasi												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Penerima Pelaporan
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data & Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		
1	Input Capaian Strategis													Pokja PKP	Pokja PKP	Pokja PKP	3 Bulan	Pokja PKP
2	Input Menu Investasi													Pokja PKP	Pokja PKP	Pokja PKP	3 Bulan	Pokja PKP
3	Input Menu Akses													Pokja PKP	Pokja PKP	Pokja PKP	3 Bulan	Pokja PKP
4	Input Menu Infrastruktur													Pokja PKP	Pokja PKP	Pokja PKP	3 Bulan	Pokja PKP
5	Input Menu Progres													Pokja PKP	Pokja PKP	Pokja PKP	3 Bulan	Pokja PKP
6	Pelatihan Nawasis													Pokja PKP	Pokja PKP	Pokja PKP	1 Minggu	Pokja PKP



Implementasi dari perencanaan kegiatan pengelolaan sanitasi dalam bentuk percontohan skala terbatas/quick win tahun 2022 dari masing-masing sektor diantaranya sebagai berikut :

- 1. Percontohan dan Kegiatan Monev skala terbatas pengelolaan Air Limbah Domestik
 - a. Pembangunan Tanki Septik Individual, Persampahan Sosialisasi Akses Layak
- Implementasi ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dan Dinas Kesehatan dalam rangka peningkatan capaian akses layak dan aman.

Dokumentasi kegiatan Qick Win Implementasi SSK Kota Payakumbuh 2022

		
Quick win dan serah terima Tangki Septik Individual oleh Pj . Walikota Payakumbuh	Penanada tangenan komitmen bersama payakumbuh sehat melalui stop BABS berkelanjutan oleh seluruh Stakeholder	Pemasangan Tanki Septik Individual
		
Penyerahan Tangki Septik Individual oleh Pj . Walikota Payakumbuh	Penyerahan Tangki Septik Individual oleh Pj . Walikota Payakumbuh	Monitoring dan Evaluasi Quick Win Pokja Provinsi kegiatan pembangunan Tangki septik
		
Monitoring dan Evaluasi Quick Win Pokja Provinsi kegiatan pembangunan Tangki septik dan IPLT Kota Payakumbuh	Monitoring dan Evaluasi Quick Win Pokja Provinsi kegiatan pembangunan Tangki septik dan IPLT Kota Payakumbuh	Quick Win pencanangan pengelolaan sampah dengan pendekatan pekonomi sirkular mella optimalisasi bank sampah dan maggot
		
Studi Tiru Bank Sampah Kota Payakumbuh ke Bank Sampah induk Kota Pekanbaru	Studi Tiru Bank Sampah Kota Payakumbuh ke Bank Sampah induk Kota Pekanbaru	Monitoring dan Evaluasi Quick Win Pokja Provinsi kegiatan pembangunan Tangki septik



Tabel 6.2 Capaian Startegis Air Limbah Domestik

Tujuan : Tercapainya akses layak dan aman di sektor Air Limbah Domestik di Kota Payakumbuh						
Tahun 2022						
Rencana				Realisasi		
Output	Belanja	Outcome		Output	Belanja	Outcome
No	Sasaran : Sampai dengan 2027 1. Menurunkan akses Belum layak dari 9,33% ditahun 2022 menjadi 0% ditahun 2023 2. Meningkatkan akses layak sector air limbah domestic 90,67% ditahun 2022 menjadi 100% ditahun 2027. 3. Meningkatkan akses aman sector air limbah domestic 13,38% ditahun 2022 menjadi 24% ditahun 2027					
	Kegiatan Percontohan Skala Terbatas (Quick Win) Air Limbah domestik ditahun 2022					
1	Pembangunan tanki Septick Individu	3.150	Tersedianya 360 Unit tangki septik individual yang layak bagi masyarakat	Pembangunan tanki Septick Individu	3.150	Tersedianya 360 Unit tangki septik individual yang layak bagi masyarakat
2	Pemicuan SIUDA SERASI (Siap Upayakan Daerah Sanitasi Aman dan Bersih)	5	Terpicunya Minset Masyarakat akan Pentingnya Sanitasi layak	Pemicuan SIUDA SERASI (Siap Upayakan Daerah Sanitasi Aman dan Bersih)	5	Terpicunya Minset Masyarakat akan Pentingnya Sanitasi layak

Tabel 6.3 Capaian Startegis Persampahan

Tujuan : Tercapainya akses layak dan aman di sektor Persampahan di Kota Payakumbuh						
Tahun 2022						
Rencana				Realisasi		
Output	Belanja	Outcome		Output	Belanja	Outcome
No	Sasaran : Sampai dengan 2027 1. Penanganan Sampah Perkotaan dari 76,8% ditahun 2022 menjadi 80% ditahun 2027 2. Pengurangan Sampah Perkotaan dari 9,4% ditahun 2022 menjadi 20% ditahun 2027. Kegiatan Percontohan Skala Terbatas (Quick Win) Persampahan ditahun 2022					
1	Studi Tiru Pengelolaan Bank Sampah	24	Perbandingan Sebagai Evaluasi dan Perbaikan kekurangan guna mendukung kegiatan di Daerah	Studi Tiru Pengelolaan Bank Sampah	24	Perbandingan Sebagai Evaluasi dan Perbaikan kekurangan guna mendukung kegiatan di Daerah
2	Pengembangan Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot	25	Bertambahnya Volume Pengolahan Sampah dengan sistem Maggot	Pengembangan Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot	25	Bertambahnya Volume Pengolahan Sampah dengan sistem Maggot



Laporan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3) Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022		
Tabel 6.4 Monev M3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemicuan STBM, PHBS, dan Stop BABS		
No	Item Pemantauan	Realisasi
1	Nama Kegiatan	: Gerakan Stop Buang Air Besar Semabarangan
2	Deskripsi Kegiatan	: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis, dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)	
	Inovasi yang dilakukan	Pemicuan SIUDA SERASI (Siap Upayakan Daerah Sanitasi Aman dan Bersih)
3	Lokasi Kegiatan	: Nagari yang beresiko Tinggi Air Limbah Domestik
	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan	Lokasi Area Beresiko Tinggi Air Limbah Domestik
4	Waktu Pelaksanaan	: November- Desember tahun 2022
5	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	: 630 kk
6	Kebutuhan Dana (Rp.)	: Rp. 5.000.000
7	Sumber Dana	: DAK dan DAU
8	Nama OPD Penanggung Jawab	: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
9	Pihak-pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll), sebutkan	:
10	Peran keterlibatan pihak lain	:
a	Swasta :	:
b	NGO :	:
c	Masyarakat / KSM/ .. :	:
d	Lainnya :	: Puskesmas dan DINKES
11	Output Kegiatan	: Terpicionya Masyarakat terhadap Jamban Sehat
12	Analisis dan Evaluasi Multi Aspek	:
a	Regulasi	:
b	Kelembagaan	:
c	Teknis	:
d	Pendanaan	: DAK



Laporan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3) Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022		
Tabel 6.4.1 Monev M3 Kegiatan Gerakan Jamban Sehat Melalui Pembangunan Tanki Septik Individual		
No	Item Pemantauan	Realisasi
1	Nama Kegiatan	: Gerakan Jamban Sehat
2	Deskripsi Kegiatan	: Pembangunan/Penyediaan sub system Pengolahan Setempat
	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis, dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)	
	Inovasi yang dilakukan	Pembangunan Tanki Septik Individual
3	Lokasi Kegiatan	: Nagari yang beresiko Tinggi Air Limbah Domestik
	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan	Lokasi Area Beresiko Tinggi Air Limbah Domestik
4	Waktu Pelaksanaan	: November- Desember tahun 2022
5	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	: 3.150 Jiwa
6	Kebutuhan Dana (Rp.)	: Rp. 3.150.000.000
7	Sumber Dana	: DAK dan DAU
8	Nama OPD Penanggung Jawab	: Dinas PKP Kota Payakumbuh
9	Pihak-pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll), sebutkan	:
10	Peran keterlibatan pihak lain	:
a	Swasta :	:
b	NGO :	:
c	Masyarakat / KSM/ .. :	:
d	Lainnya :	: Puskesmas dan DINKES
11	Output Kegiatan	: Terbangunannya Tanki Septik Individual yang Sehat
12	Analisis dan Evaluasi Multi Aspek	:
a	Regulasi	:
b	Kelembagaan	:
c	Teknis	:
d	Pendanaan	: DAK dan DAU

4.



Laporan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3) Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022			
Tabel 6.4.2 Monev M3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengurangan masuk ke TPA			
No	Item Pemantauan	Realisasi	
1	Nama Kegiatan	:	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2	Deskripsi Kegiatan	:	Studi Triu Pengelolaan Bank Sampah
	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis, dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)		
	Inovasi yang dilakukan		Optimalisasi Bank Sampah
3	Lokasi Kegiatan	:	Kelurahan Payobasung, Balai Jariang, Padang Tinggi Piliang, subarang Batuang dan Bulakan Balai Kandi
	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan		Lokasi Area Beresiko Tinggi Persampahan
4	Waktu Pelaksanaan	:	November- Desember tahun 2022
5	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	:	1.500 Jiwa
6	Kebutuhan Dana (Rp.)	:	Rp. 24.000.000
7	Sumber Dana	:	DAK
8	Nama OPD Penanggung Jawab	:	Dinas PKP Kota Payakumbuh
9	Pihak-pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll), sebutkan	:	
10	Peran keterlibatan pihak lain	:	
a	Swasta :	:	
b	NGO :	:	
c	Masyarakat / KSM/ .. :	:	
d	Lainnya :	:	Puskesmas dan DINKES
11	Output Kegiatan	:	Optimalisasi Bank Sampah
12	Analisis dan Evaluasi Multi Aspek	:	
a	Regulasi	:	
b	Kelembagaan	:	
c	Teknis	:	
d	Pendanaan	:	



Laporan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3) Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022			
Tabel 6.4.3 Monev M3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengurangan masuk ke TPA			
No	Item Pemantauan	Realisasi	
1	Nama Kegiatan	:	Kewirausahaan Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Ekonomi Sirkular
2	Deskripsi Kegiatan	:	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis, dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)		
	Inovasi yang dilakukan		Pengembangan Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot
3	Lokasi Kegiatan	:	Kelurahan Tiakar
	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan		Lokasi Area Beresiko Tinggi Persampahan
4	Waktu Pelaksanaan	:	November- Desember tahun 2022
5	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	:	300 Jiwa
6	Kebutuhan Dana (Rp.)	:	Rp. 25.000.000
7	Sumber Dana	:	DAK
8	Nama OPD Penanggung Jawab	:	Dinas PKP Kota Payakumbuh
9	Pihak-pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll), sebutkan	:	
10	Peran keterlibatan pihak lain	:	
a	Swasta :	:	
b	NGO :	:	
c	Masyarakat / KSM/ .. :	:	
d	Lainnya :	:	Puskesmas dan DINKES
11	Output Kegiatan	:	Optimalisasi Bank Sampah
12	Analisis dan Evaluasi Multi Aspek	:	
a	Regulasi	:	
b	Kelembagaan	:	
c	Teknis	:	
d	Pendanaan	:	

4.



Tabel 6.5 Kerangka Kerja Logis

No	Sektor	Isu Strategis	Strategi	Permasalahan Mendesak	Tujuan	Sasaran	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
A.	Air Limbah	Masih terdapat akses Tidak Layak sebesar 9,33%	Meniadakan Akses tidak Layak menjadi Layak	Masih terdapat akses Tidak Layak sebesar 9,33%	Meniadakan Akses tidak Layak menjadi Layak ditahun 2023	Menurunkan angka Akses tidak layak menjadi 0% di tahun 2023	Sosialisasi ke Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah
		Capaian Akses Layak diangka 90,67%	Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik layak berkelanjutan	Capaian Akses Layak diangka 90,67%	Tercapaiannya akses layak di sektor air limbah domestik Tahun 2023	Meningkatkan akses layak sektor air limbah domestik 90,67% menjadi 100% di tahun 2023	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Pembangunan Tangki septik Individual
		Capaian Akses Layak yang aman diangka 13,38%	Meningkatkan cakupan layanan air limbah domestik layakdan aman berkelanjutan	Capaian Akses Layak yang aman diangka 13,38%	Tercapaiannya akses layak dan aman sebesar 24% ditahun 2027	Meningkatkan akses aman dari 13,38% menjadi 22,6% di tahun 2023 dan 24% ditahun 2027	Dilakukan Penyedotan Tanki septik terjadwal	Sosialisasi tentang Pentingnya Penyedotan tinja
		Belum optimalnya operasional Instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Pembuatan Perda Retribusi dan perda kelembagaan pengelola IPLT	Belum optimalnya pengoperasian Pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Tercapaiannya akses aman di sektor air limbah domestik	meningkatkan akses aman sektor air limbah domestik dari 13,38% menjadi 24% di tahun 2027	Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengoperasian IPLT secara maksimal



No	Sektor	Isu Strategis	Strategi	Permasalahan Mendesak	Tujuan	Sasaran	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
B.	Persampahan	Bank Sampah dan TPS3R yang belum berfungsi optimal dalam mereduksi sampah sebelum dibawa ke TPA	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah	Bank Sampah dan TPS 3R yang belum berfungsi optimal dalam mereduksi sampah sebelum dibawa ke TPA	Tercapaiannya layanan pengurangan sampah perkotaan	Meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan dari 9,4% menjadi 20% di tahun 2027	Pengurangan Sampah dengan Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengadaan/perbaikan peralatan daur ulang sampah TPS 3R Pembangunan Bank Sampah / TPS 3Rbaru
		Sulitnya pemasaran hasil daur ulang sampah	Memfasilitasi kemitraan dalam pengelolaan persampahan	Sulitnya pemasaran hasil daur ulang sampah	Tercapaiannya layanan pengurangan sampah perkotaan	Meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan dari 9,4% menjadi 20% di tahun 2027	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Optimalisasi Bank Sampah & TPS 3R, Pembelian Kompos untuk Pengembangan pertanian organik, taman kota dan penghijauan, Pameran dan Pemasaran Hasil Daur Ulang Sampah
		Kurangnya sarana dan prasarana pengumpulan, pewadahan, pengolahan dan pengangkutan sampah	Menyediakan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah	Kurangnya sarana dan prasarana pengumpulan, pewadahan, pengolahan dan pengangkutan sampah	Tercapaiannya layanan penanganan sampah perkotaan	Meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan dari 76,8% menjadi 80% di tahun 2027	Optimalisasi Sarana Pengumpulan dan pengangkutan sampah	Pengadaan Motor Sampah Pengadaan DumpTruk Pengadaan Amroll Truk



LAMPIRAN 1

Ringkasan Eksekutif Kajian EHRA



RINGKASAN EKSEKUTIF (RE) EHRA

Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) atau studi penilaian risiko kesehatan lingkungan merupakan salah satu dari beberapa studi primer yang harus dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) PKP/sanitasi Kota Payakumbuh. Untuk menyusun potret/kondisi capaian eksisting sanitasi dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) berdasarkan pendekatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahun 2022 dilakukan berbagai penyesuaian terhadap studi EHRA terdahulu. Dimana Kota Payakumbuh telah melaksanakan Studi EHRA sebelumnya pada Tahun 2013 (pemilihan area studi dengan sistem klaster) dan Tahun 2017. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksanaan studi EHRA sebelumnya dan mengikuti perkembangan program PPSP terkini.

Secara substansi hasil studi EHRA memberikan data ilmiah dan faktual tentang ketersediaan layanan sanitasi ditingkat rumah tangga dalam skala kota. Komponen sanitasi yang menjadi objek studi meliputi praktik Buang Air Besar (BAB) anggota keluarga dan kepemilikan sarana jamban serta kelengkapan dari bangunan jamban itu sendiri, pengelolaan sampah rumah tangga dan drainase lingkungan serta perilaku higiene. Muatan pertanyaan telah diarahkan sesuai dengan 5 (lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

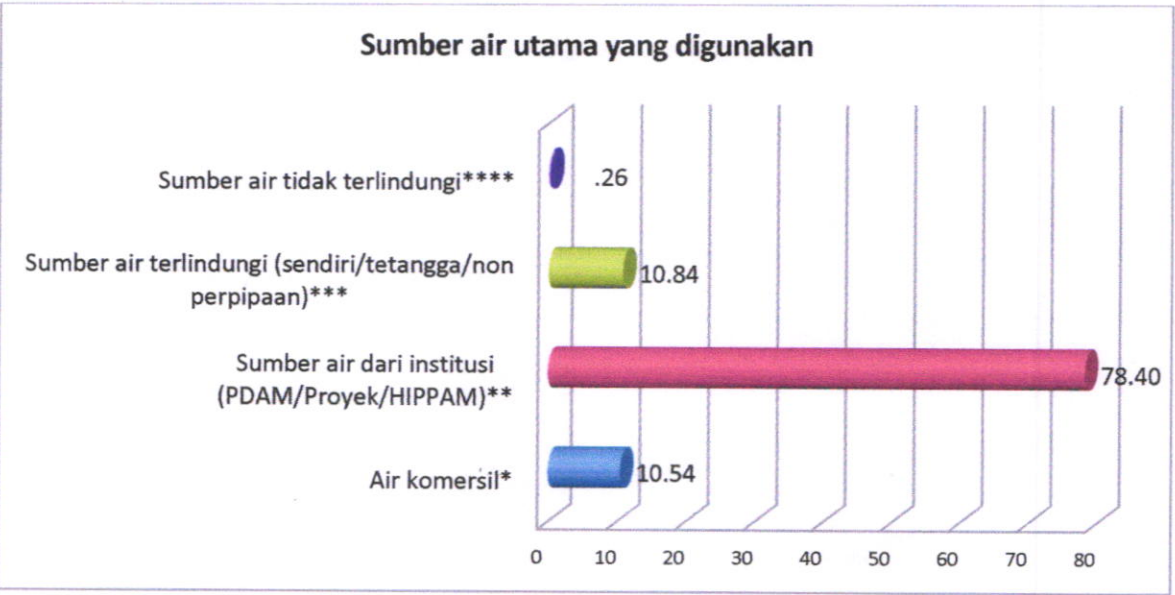
Awal kegiatan ini dilakukan dengan membentuk tim pelaksana studi EHRA yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, setelah itu tim bersama Pokja (termasuk Badan Pusat Statistik/BPS Kota Payakumbuh) yang didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bersama tenaga ahli, melakukan perhitungan jumlah sampel sesuai dengan ketersediaan pendanaan yang telah dialokasikan melalui APBD Kota Payakumbuh. Proses berikutnya tim dengan pendampingan dinas provinsi melatih Sanitarian, supervisor dan koordinator beserta anggota pokja yang masuk dalam tim survey bersama-sama menyamakan visi dan misi dalam metode pelaksanaan pengambilan data yang dilaksanakan pada metode partisipatif wawancara. Setelah data terkumpul, data tersebut diinputkan dan dientrykan oleh tim entry data, dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (*buku petunjuk teknis pelaksanaan studi EHRA Tahun 2021*). Hasil telah dicapai. Untuk data survey EHRA telah diolah dengan beberapa komponen sanitasi di Kota Payakumbuh dapat terbaca dengan baik. Hasilnya adalah;

4.

A. Komponen Penggunaan Sumber Air Utama Masyarakat di Kota Payakumbuh

Data informasi tentang penggunaan sumber air utama masyarakat di Kota Payakumbuh, fariabel pertanyaan survey dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, penggunaan untuk minum, memasak dan gosok gigi, serta penggunaan untuk keperluan gosok gigi, mandi dan mencuci. Dan sumber utama yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.

Adapun penggunaan sumber air utama untuk keperluan minum, memasak dan menggosok gigi sebagian besar masyarakat Kota Payakumbuh sebagian besar memanfaatkan sumber air dari sumber yang dikelola oleh PDAM/Proyek/HIPPAM baik dari layanan perpipaan maupun non perpipaan sebesar 78,40%, 10,84% rumah tangga yang ada memanfaatkan sumber air terlindungi baik milik sendiri maupun milik tetangga dan 10,54% dengan cara membeli air isi ulang ataupun air kemasan bermerek lainnya. Adapun 0,3% masyarakat yang secara relatif memiliki kemampuan, untuk memenuhi kebutuhan air juga memanfaatkan air yang disediakan oleh usaha air bersih (air komersil/air galon/air dengan kemasan tertentu).

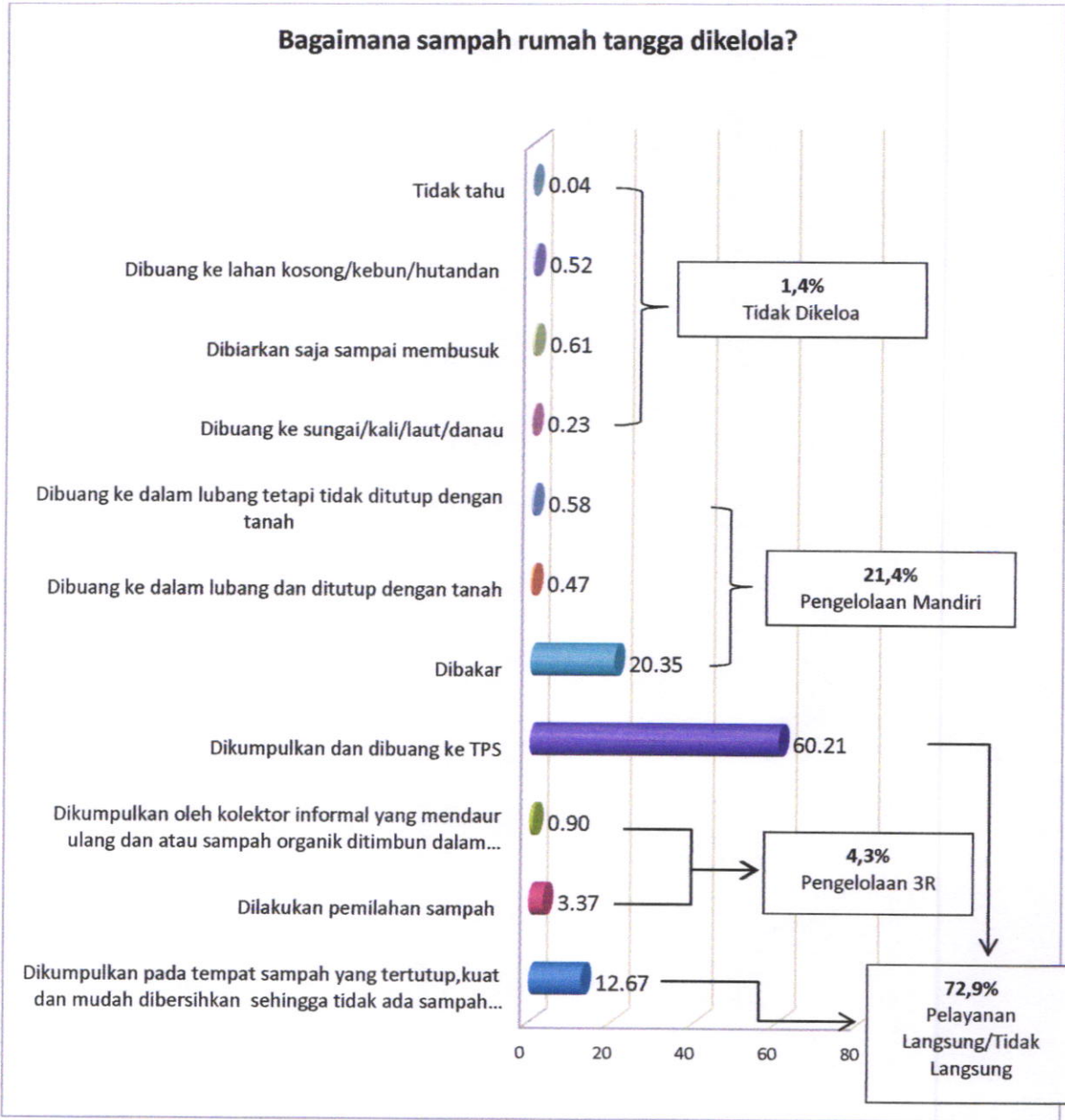


Sumber : Studi EHRA Kota Payakumbuh Tahun 2022

B. Komponen Pengelolaan Persampahan (sampah rumah tangga)

Kebiasaan dalam mengelola sampah rumah tangga oleh masyarakat di Kota Payakumbuh juga masih menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan permukiman. Dari persentase data yang didapat dari studi EHRA masih terdapat 1,4% timbunan sampah rumah tangga yang ada tidak dilakukan pengelolaan oleh masyarakat Kota Payakumbuh.

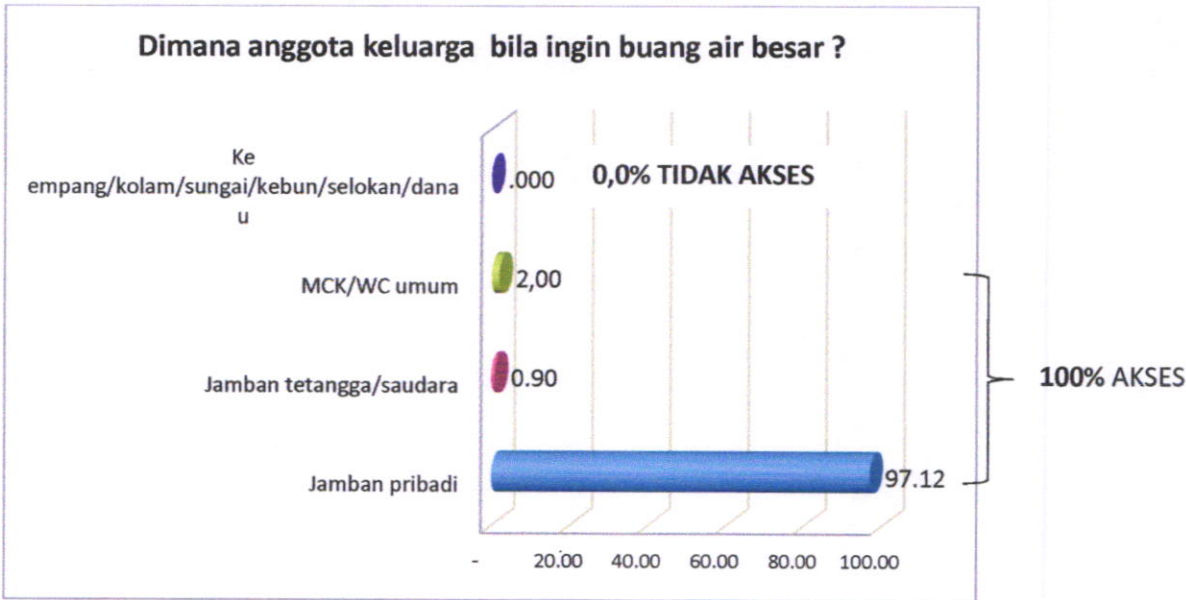
Adapun sampah rumah tangga yang dikelola mandiri oleh masyarakat yaitu sebesar 21,4%. Dan 72,9% timbunan sampah rumah tangga sudah terlayani oleh sistem pelayanan persampahan yang dimana sampah tersebut diangkut baik secara langsung maupun tidak langsung ke TPA. Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya dapat dilihat selengkapnya pada grafik berikut:



C. Komponen Air Limbah Domestik

Kondisi air limbah domestik di Kota Payakumbuh dapat di ilustrasikan kebiasaan praktik Buang Air Besar (BAB) dan kondisi kepemilikan sarana jamban yang terdapat pada setiap rumah tangga di Kota Payakumbuh, mulai dari bangunan atas jamban (pribadi atau MCK/ WC Umum), bangunan tengah jamban (sistem kloset leher angsa atau non leher angsa), sampai dengan tempat penyaluran limbah tinja (tangki septik, cubluk atau tidak memilikinya).

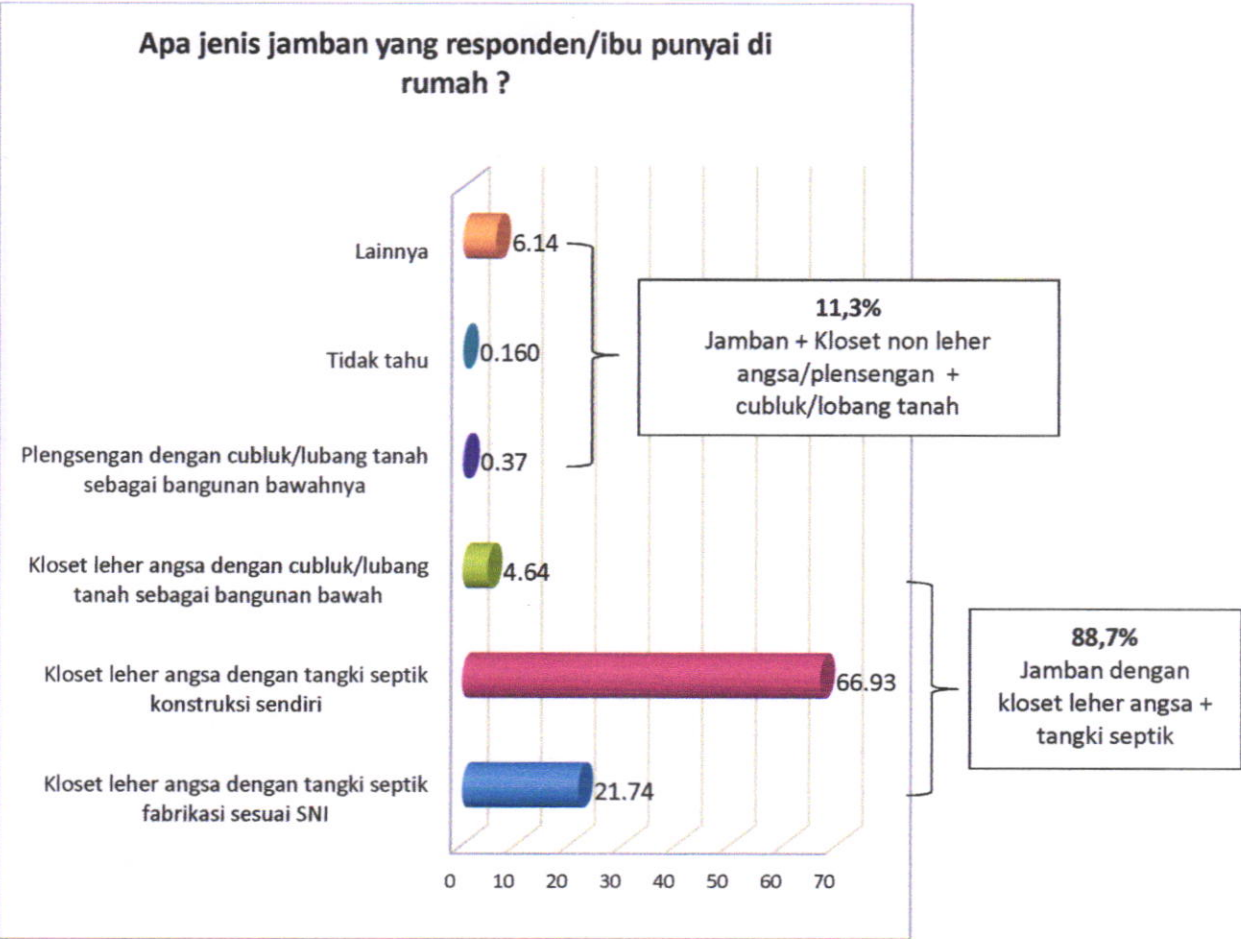
Dari hasil survey di Kota Payakumbuh diperoleh data, untuk kebiasaan anggota keluarga masyarakat di Kota Payakumbuh **100% masyarakat Kota Payakumbuh sudah memiliki akses jamban** dimana 97,12% akses dengan kepemilikan jamban primbadi, 0,9 mempergunakan jamban tetangga atau saudara dan 2,0% akses dengan mempergunakan fasilitas umum (MCK/wc umum). Dengan arti lain sudah tidak terdapat lagi masyarakat di Kota Payakumbuh yang melakukan praktik **BAB ditempat-tempat terbuka (Buang Air Besar Sembarangan/BABS)**. Detail fariabel data dapat dilihat pada gambar sebagai berikut;



Sumber : Survey ehra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari kepemilikan jamban rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh survey EHRA juga mengidentifikasi jenis kloset dan sarana pengelolaan air limbah domestik/tinja yang ada pada masing-maisng rumah tangga yang ada dimana **88,7% jamban yang terdapat pada rumah tangga yang ada di Kota Payakumbuh sudah memiliki kloset leher angsa dan sistem pengelolaan air**

limbah tinjanya. Adapun 11,3% jamban rumah tangga belum memiliki sistem jamban yang lengkap (tidak memiliki kloset standart ataupun tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah tinja (termasuk dalam kategori BABS Tertutup)

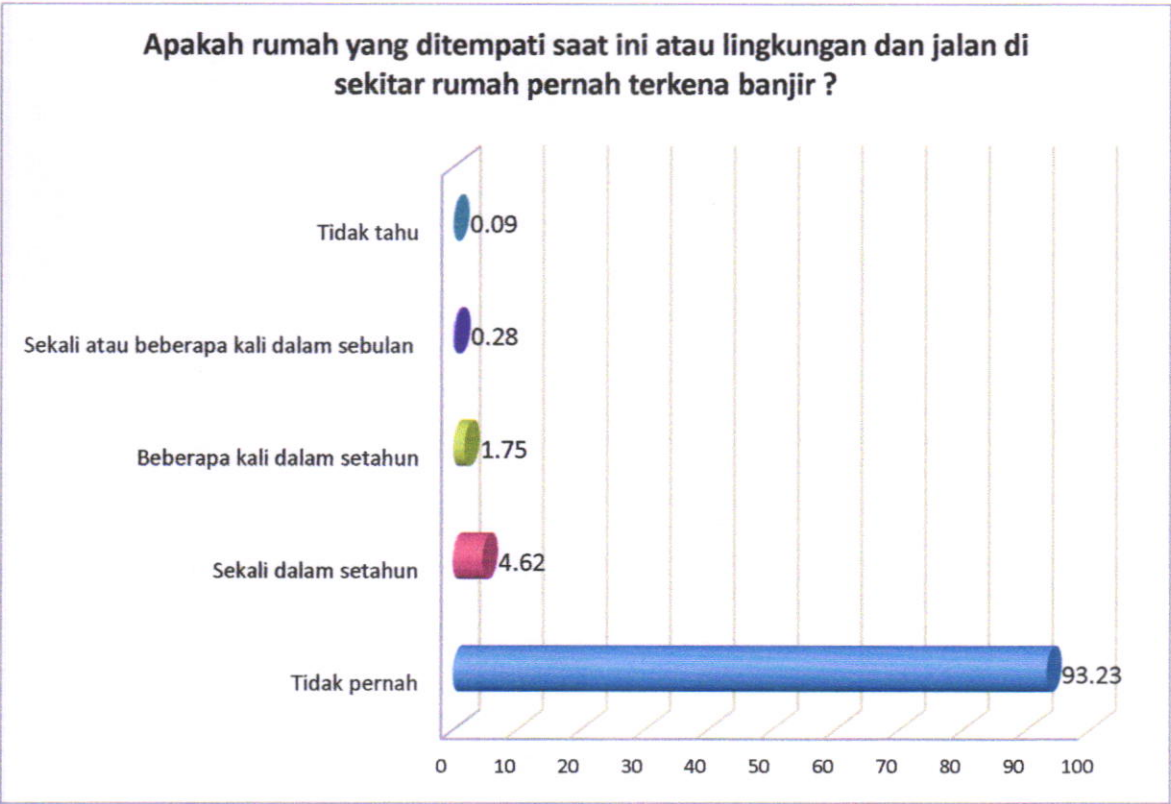


Sumber : Studi EHRA Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari komponen data air limbah tersebut diatas nantinya akan dilakukan analisis (Instrumen SSK pada penyusunan dokumen SSK), yang nantinya akan menentukan kategori akses rumah tangga yang terdapat di Kota Payakumbuh, apakah sarana jamban dan perilaku masyarakat Kota Payakumbuh termasuk kedalam kelompok akses aman, akses layak, akses dasar ataupun tidak memiliki akses (BABS).

D. Komponen Banjir/ Genangan

Kota Payakumbuh dilihat dari kondisi geografis yang berinterfal relatif memiliki kemiringan, memiliki saluran drainase yang relatif lancar, hampir dipastikan tidak pernah mengalami kejadian banjir yang disebabkan oleh air hujan, ini dilihat dari jawaban dari responden studi EHRA, 93,23% tidak pernah mengalami kejadian banjir.



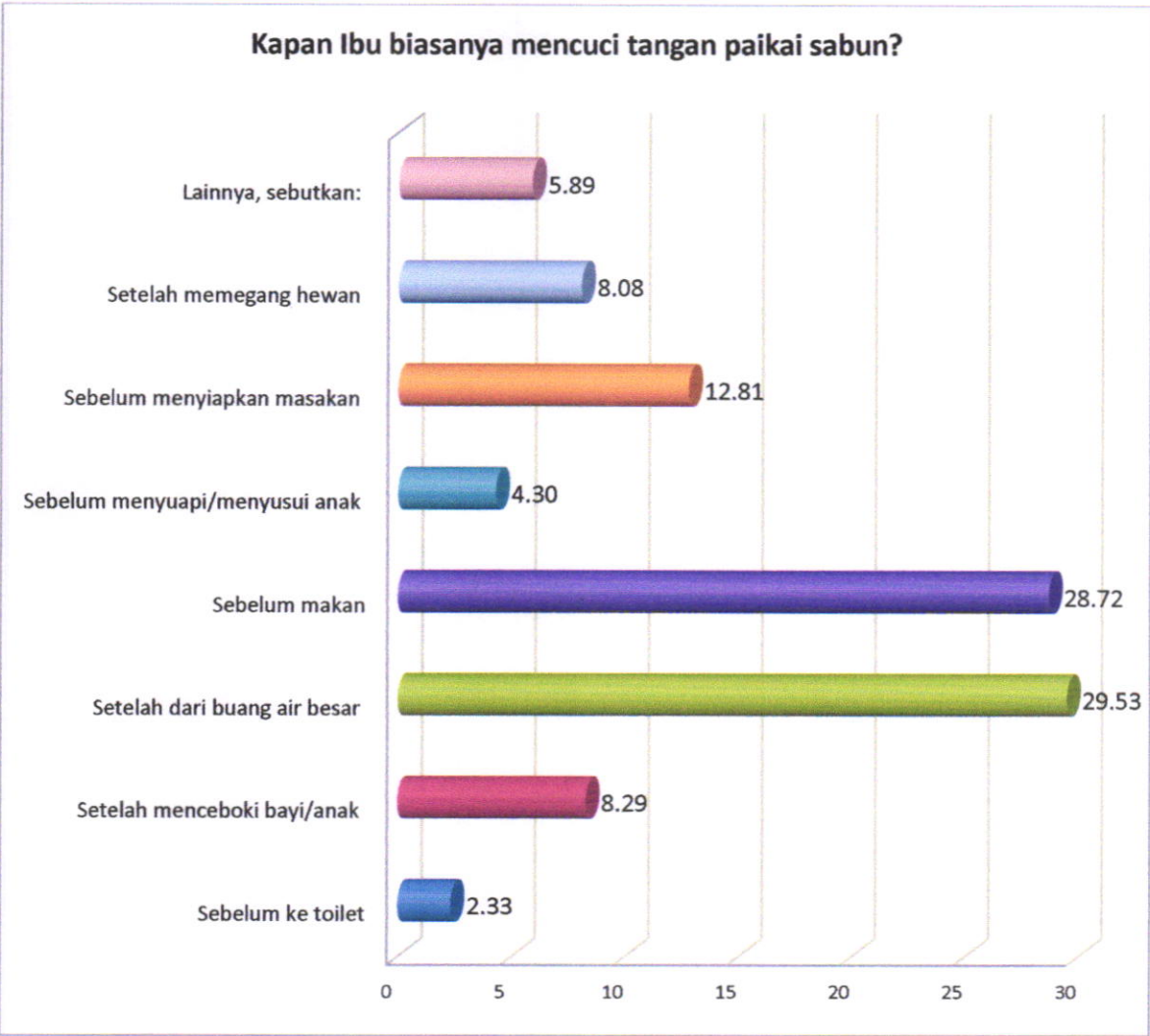
Sumber : Survey ehra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022

Adapun yang menjawab pernah terjadi banjir beberapa kali dalam satu bulan yaitu sebesar 0,3%, 1,8% terjadi beberapa kali dalam satu tahun dan 4,6% terjadi satu kali dalam satu tahun.

E. Komponen Perilaku Hdigup Bersih dan Sehta/Higiene (PHBS)

Perilaku higiene masyarakat di Kota Payakumbuh dipotret dengan fariabel pertanyaan kuesioner EHRA yang meliputi kebiasaan masyarakat dalam melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5 (lima) waktu penting. Dimana 29,53% mencuci tangan pakai sabun pada saat setelah melakukan buang air besar, 28,72% melakukannya pada saat sebelum makan serta 12,81% melakukannya sebelum menyiapkan masakan dan seterusnya, seperti data yang terlihat pada gambar berikut;

4.



Sumber : Survey ehra Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari data 5 (lima) komponen sanitasi tersebut diatas setelah dilakukan analisis penentuan nilai Indeks Risiko Sanitasi (IRS), nantinya nilai tersebut akan menjadi data dasar (imput data Instrumen SSK) dalam penentuan tingkatan kondisi risiko sanitasi pada satu kelurahan terhadap kelurahan lainnya yang ada pada wilayah administrasi Kota Payakumbuh (output Instrumen SSK) dan menjadi gambaran/ potret eksisting dari masing-masing komponen sanitasi Kota Payakumbuh

6.

PPSP

Perencanaan
Pengembangan
Lingkungan
Pemukiman



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAMPIRAN 2

Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah



Rekapitulasi Realisasi APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	Realisasi Anggaran	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
A	PENDAPATAN (a.1 + a.2 + a.3)	738.94	708.49	763.77	678.83	108.92	0.13%
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	116.57	94.27	104.05	116.00	90.26	-0.13%
a.1.1	Pajak Daerah	14.04	16.09	17.65	17.07	20.35	
a.1.2	Retribusi Daerah	6.72	7.28	7.39	4.36	5.44	
a.1.3	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.82	5.94	7.02	7.05	7.69	
a.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	86.99	64.96	71.99	87.52	56.78	
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	596.05	565.24	609.57	517.67	0.00	-0.29%
a.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	13.37	12.03	9.18	10.69	0.00	
a.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA						
a.2.3	Dana Alokasi Umum	437.69	437.69	468.54	421.05	0.00	
a.2.4	Dana Alokasi Khusus	94.21	99.02	131.85	85.93	0.00	
a.3.1	Dana Penyesuaian Pemerintah Pusat						
a.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	50.78	16.50	0.00	0.00	0.00	
a.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Provinsi						
a.3.4	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi						
a.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	26.32	48.98	50.15	45.16	18.66	0.55%
a.3.1	Pendapatan Hibah	0.81	22.42	19.80	18.44	18.66	
a.3.2	Pendapatan Dana Darurat						
a.3.4	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi	25.51	26.56	30.35	26.72	0.00	
B	BELANJA (b1 + b2)	694.57	716.81	1,857.75	1,353.57	0.00	0.68%
b.1	Belanja Operasi	480.48	552.41	1,194.40	1,194.39	0.00	0.53%
b.1.1	Belanja Pegawai	268.61	303.28	318.91	308.79	0.00	
b.1.2	Belanja Barang	204.06	238.57	272.40	223.58	0.00	
b.1.3	Bunga						
b.1.4	Subsidi						
b.1.5	Hibah	7.32	4.86	8.46	6.80	0.00	
b.1.6	Bantuan Sosial	0.00	4.63	4.72	3.91	0.00	
b.1.7	Bantuang Keuangan	0.49	1.07	589.91	651.31	0.00	
b.2	Belanja Modal	214.09	164.40	663.35	159.18	0.00	0.15%
b.2.1	Belanja Tanah						
b.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	176.63	149.44	182.21	119.99	0.00	

4.

b.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan						
b.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
b.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	37.46	14.51	18.61	18.56	0.00	
b.2.6	Belanja Tak Terduga	0.00	0.45	462.53	20.63	0.00	
C	TRANSFER (Bagi Hasil Ke Desa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c.1	Bagi Hasil Pajak						
c.2	Bagi Hasil Retribusi						
c.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya						
c.4	Bantuan Keuangan						
	Surplus/Desfisit Anggaran	44.37	(8.32)	(1,093.98)	(674.74)	108.92	#DIV/0!

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2017 s/d 2021

Rekapitulasi Realisasi Belanja Sanitasi OPD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2021

No	SKPD	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dinas PUPR	13,348,263,355	13,348,263,355	16,177,672,211	17,120,043,939	8,704,236,933	0.04%
1.a	Investasi	12,134,784,868	12,134,784,868	14,706,974,737	15,563,676,308	7,912,942,666	
1.b	Operasional/Pemeliharaan (OM)	1,213,478,487	1,213,478,487	1,470,697,474	1,556,367,631	791,294,267	
2	Dinas Lingkungan Hidup	1,814,857,220	3,521,552,832	9,227,211,949	7,461,204,265	8,072,582,103	2.90%
2.a	Investasi	1,649,870,200	3,201,411,665	8,388,374,499	6,782,912,968	7,338,711,003	
2.b	Operasional/Pemeliharaan (OM)	164,987,020	320,141,167	838,837,450	678,291,297	733,871,100	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	182,158,803	216,363,011	37,786,595	11,796,384	17,615,235	-0.61%
3.a	Investasi	165,598,912	196,693,646	34,351,450	10,723,985	16,013,850	
3.b	Operasional/Pemeliharaan (OM)	16,559,891	19,669,365	3,435,145	1,072,399	1,601,385	
4	Dinas Kesehatan	469,424,472	477,288,206	327,636,080	114,283,400	788,680,530	-0.09%
4.a	Investasi	426,749,520	433,898,369	297,850,982	103,894,000	716,982,300	
4.b	Operasional/Pemeliharaan (OM)	42,674,952	43,389,837	29,785,098	10,389,400	71,698,230	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5,136,320,473	4,730,799,036	5,312,749,921	5,761,754,244	4,035,797,645	-0.03%
5.a	Investasi	4,669,382,248	4,300,726,396	4,829,772,655	5,237,958,404	3,668,906,950	
5.b	Operasional/Pemeliharaan (OM)	466,938,225	430,072,640	482,977,266	523,795,840	366,890,695	
5	Belanja Sanitasi	20,951,024,323	22,294,266,438	31,083,056,755	30,469,082,232	21,618,912,446	0.26%
6	Pendanaan Investasi Sanitasi Total^(1.a+2.a+3.a+...)	19,046,385,748	20,267,514,944	28,257,324,323	27,699,165,665	19,653,556,769	0.26%
7	Pendanaan OM^(1.b+2.b+3.b+...)	1,904,638,575	2,026,751,494	2,825,732,432	2,769,916,567	1,965,355,677	-0.08%
8	Belanja Langsung	413,784,951,357	431,015,029,009	516,598,869,240	479,600,086,704	731,041,110,447	0.30%
9	Proporsi Belanja Sanitasi - Belanja Langsung^(9/11)	5.06%	5.17%	6.02%	6.35%	2.96%	6.39%
10	Proporsi Investasi Sanitasi - Total Belanja Sanitasi^(9/10)	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	1.14
11	Proporsi OM Sanitasi - Total Belanja Sanitasi^(10/9)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11

4.

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2017 s/d 2021

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan Sanitasi Oleh APBD Kota Payakumbuh

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi ^(1.1+1.2+1.3+1.4)	18,802,970,252	8,297,773,023	14,029,204,510	11,629,838,741	21,801,311,247	-0.26%
1.1	Air Limbah Domestik	4,943,174,334	4,662,462,989	5,342,979,029	4,743,031,773	3,668,906,950	
1.2	Persampahan	1,649,870,200	3,201,411,665	8,388,374,499	6,782,912,968	7,338,711,003	
1.3	Drainase Lingkungan	11,783,176,198	0	0	0	10,076,710,994	
1.4	PHBS	426,749,520	433,898,369	297,850,982	103,894,000	716,982,300	
2	Dana Alokasi Khusus ^(2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0	0	0.00%
2.1	DAK Sanitasi						
2.2	DAK Lingkungan Hidup						
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman						
Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi ⁽¹⁻²⁾		18,802,970,252	8,297,773,023	14,029,204,510	11,629,838,741	21,801,311,247	-0.26%
Total Belanja Modal		413,784,951,357	431,015,029,009	516,598,869,240	479,600,086,704	731,041,110,447	0.30%
% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung		4.54%	1.93%	2.72%	2.42%	2.98%	3.65%
Komitmen Pendanaan APBD Untuk Pendanaan Sanitasi Ke Depan (% Terhadap Belanja Langsung Ataupun Nilai Absolut)							4.00%

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2017 s/d 2021

Belanja Sanitasi Perkapita Kota Payakumbuh

No	Deskripsi	Tahun					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Total Belanja Sanitasi Kota Payakumbuh	18,802,970,252	8,297,773,023	14,029,204,510	11,629,838,741	21,801,311,247	18,640,274,443
2	Jumlah Penduduk	131,819	133,703	135,573	139,576	141,184	
Belanja Sanitasi Perkapita ^(1/2)		142,642	62,061	103,481	83,323	154,418	136,481

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2017 s/d 2021

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Payakumbuh untuk Sanitasi Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2026

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Perkiraan Belanja Modal	731,063,332,012	731,085,554,252	731,107,777,167	731,130,000,758	731,152,225,025	3,655,538,889,213
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	21,800,747,350	21,800,183,468	21,799,619,601	21,799,055,748	21,798,491,909	108,998,098,076
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	29,242,533,280	29,243,422,170	29,244,311,087	29,245,200,030	29,246,089,001	146,221,555,569

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Payakumbuh Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

6.

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi	20,683,267,277	9,127,550,325	15,432,124,961	12,792,822,615	23,981,442,372	-0.26%
1.1	Air Limbah Domestik	4,943,174,334	4,662,462,989	5,342,979,029	4,743,031,773	3,668,906,950	-0.07%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Air Limbah Domestik</i>	494,317,433	466,246,299	534,297,903	474,303,177	366,890,695	
1.2	Sampah Rumah Tangga	1,649,870,200	3,201,411,665	8,388,374,499	6,782,912,968	7,338,711,003	2.90%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Sampah Rumah Tangga</i>	164,987,020	320,141,167	838,837,450	678,291,297	733,871,100	
1.3	Drainase Perkotaan	11,783,176,198	0	0	0	10,076,710,994	-0.79%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) Drainase Lingkungan</i>	1,178,317,620	0	0	0	1,007,671,099	
1.4	PHBS/Dokumen Sanitasi	426,749,520	433,898,369	297,850,982	103,894,000	716,982,300	0.05%
	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified) PHBS</i>	42,674,952	43,389,837	29,785,098	10,389,400	71,698,230	

Belanja Sanitasi	-0.56%	-0.25%	-0.38%	0.16%	-1.03%
Air Limbah Domestik	-0.06%	0.08%	-0.04%	-0.26%	-0.27%
Sampah rumah tangga	0.94%	4.08%	3.11%	3.45%	11.58%
Drainase lingkungan	-1.00%	-1.00%	-1.00%	-0.14%	-3.14%
PHBS/Dokumen Sanitasi	0.02%	-0.15%	-0.38%	0.70%	0.19%
					0.05%

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Payakumbuh untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2027

No	Uraian	Tahun					Total pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	2,193,243,880	2,207,034,584	2,221,520,569	2,221,520,569	2,221,520,569	11,064,840,171
1.1	Air Limbah Domestik	3,666,392,103	3,663,878,980	3,661,367,580	3,661,367,580	3,661,367,580	18,314,373,823
1.1.1	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	366,639,210	366,387,898	366,136,758	366,136,758	366,136,758	1,831,437,382
1.2	Sampah Rumah Tangga	7,551,238,216	7,769,920,163	7,994,935,084	7,994,935,084	7,994,935,084	39,305,963,631
1.2.	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	755,123,822	776,992,016	799,493,508	799,493,508	799,493,508	3,930,596,363
1.3	Drainase Lingkungan	9,997,487,334	9,918,886,534	9,840,903,698	9,840,903,698	9,840,903,698	49,439,084,962
1.3.1	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	999,748,733	991,888,653	984,090,370	984,090,370	984,090,370	4,943,908,496
1.4	PHBS	717,321,150	717,660,159	717,999,329	717,999,329	717,999,329	3,588,979,297
1.4.1	<i>Biaya operasional / pemeliharaan (justified)</i>	71,732,115	71,766,016	71,799,933	71,799,933	71,799,933	358,897,930

4.

Perkiraan Kemampuan APBD Kota Payakumbuh dalam Mendanai Program/kegiatan SSK

No	Uraian	Tahun					Total pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasi/Pemeliharaaa	2,193,243,880	2,207,034,584	2,221,520,569	2,221,520,569	2,221,520,569	11,064,840,171
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	21,800,747,350	21,800,183,468	21,799,619,601	21,799,055,748	21,798,491,909	108,998,098,076
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	29,242,533,280	29,243,422,170	29,244,311,087	29,245,200,030	29,246,089,001	146,221,555,568
4	Perkiraan Mendanai SSK (APBD Murni) ²⁻¹	19,607,503,470	19,593,148,884	19,578,099,031	19,577,535,178	19,576,971,340	97,933,257,905
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) ³⁻¹	27,049,289,400	27,036,387,586	27,022,790,518	27,023,679,461	27,024,568,432	135,156,715,397

PPSP

Perencanaan
Pengembangan
Sistem
Perencanaan



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAMPIRAN 3

Lembar Kerja Analisis Area Berisiko Menggunakan Instrumen SSK



Nama Kelurahan/Desa	IRS-EHRA			BAPPEDA			DINKES			DPUPR			DLH			DPRKP			Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)	Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)
	Genangan Air	Persampahan	Air Limbah Domestik	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan	Air Limbah Domestik	Sampah	Drainase Lingkungan	Air Limbah Domestik	Persampahan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	
Pakan Sinayan Kubu Gadang Bulakan Balai Kandi Tanjung Pauah Ibua Labuah Basilang Parak Batuang Pari Rantang Payolanksek Subarang Batuang Koto Tangah Talang Nunang Daya Bangun Padang Tinggi Pilang Padang Tongah Bala Manduo Tanjung Godang Sungaipinago Tanah Mati Balai Panjang Limlukan Padang Karambia Kototuo Limokampung Kapalo Koto Ampangan Sawahpadang Aua Kunang Padang Tangah Payobada Balai Jaring Payobasung Koto Panjang Koto Baru Padang Alai Bodi Padang Tinkar Sicincin Tiakar Napar Ompang Tanah Sirah Taratak Padang Kampuang Tigo Koto Dibaruah Tigo Koto Diate Kapalo Koto Dibalai Kotokocak Kubu Tapakrajo Balai Tongah Koto Ikua Koto Dibalai Koto Panjang Padang Koto Panjang Dalam Parambahan Padang Sikabu Pari Muko Aie Pungai Durian	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	Penjelasan	
	12.50	38.75	72.50	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1.0	1.0	1.0
	67.50	68.75	87.50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.0	3.0	3.0
	15.00	32.50	76.67	3	3	1	3	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1.0	1.0	1.0
	30.00	33.75	71.67	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1.0	1.0	1.0
	15.00	29.38	77.50	3	3	1	3	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1.0	1.0	1.0
	10.00	27.50	67.50	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1.0	1.0	1.0
	20.00	25.00	73.33	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1.0	1.0	1.0
	73.33	78.33	89.00	3	3	1	3	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1.0	1.0	1.0
	28.75	80.00	90.00	3	3	1	3	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1.0	1.0	1.0
	0.00	51.25	89.17	4	4	3	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4.0	4.0	4.0
	17.50	35.00	84.17	3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	12.50	33.13	72.50	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1.0	1.0	1.0
	12.50	39.38	80.83	3	3	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	7.50	40.63	77.50	3	3	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	28.75	69.17	89.17	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1.0	1.0	1.0
	31.88	79.17	91.67	3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	22.50	83.33	93.33	3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	0.00	35.63	75.83	3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	17.50	36.88	85.00	3	3	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	0.00	35.00	85.83	3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	15.00	27.50	85.83	3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	5.00	35.63	91.67	4	4	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	1.0	1.0	1.0
	0.00	32.50	93.33	4	4	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	1.0	1.0	1.0
	2.50	33.13	83.33	3	3	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	17.50	54.38	75.83	3	3	2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	1.0	1.0	1.0
	20.00	62.50	77.50	3	3	4	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	1.0	1.0	1.0
	3.50	50.63	86.67	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3.0	3.0	3.0
	22.50	30.00	90.00	4	4	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	1.0	1.0	1.0
	17.50	38.75	50.83	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1.0	1.0	1.0
5.00	63.13	83.33	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	1.0	1.0	1.0	
2.50	53.75	92.50	4	3	1	4	4	3	1	4	4	3	1	4	4	3	1	1.0	1.0	1.0	
55.00	60.00	93.33	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3.0	3.0	3.0	
40.00	46.25	95.83	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3.0	3.0	3.0	
5.00	30.63	85.83	3	1	1	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1.0	1.0	1.0	
45.00	48.13	80.83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0	3.0	
5.00	46.88	81.67	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	1.0	1.0	1.0	
22.50	48.75	86.67	4	3	4	3	4	2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3.0	3.0	3.0	
45.00	38.13	93.33	4	4	2	4	4	2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3.0	3.0	3.0	
27.50	38.75	75.83	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	1.0	1.0	1.0	
2.50	40.00	92.50	4	2	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	1.0	1.0	1.0	
7.50	28.75	79.17	3	1	1	1	3	2	1	3	1	3	2	1	3	1	1	1.0	1.0	1.0	
7.50	30.00	76.67	3	1	1	1	3	2	1	3	1	3	2	1	3	1	1	1.0	1.0	1.0	
17.50	48.13	93.33	4	3	2	3	4	2	3	4	3	4	2	3	4	3	3	3.0	3.0	3.0	
5.00	68.75	81.67	3	4	1	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	3.0	3.0	3.0	
12.50	48.75	85.00	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3.0	3.0	3.0	
27.50	48.75	74.17	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3.0	3.0	3.0	
25.00	53.13	85.83	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3.0	3.0	3.0	

6



LAMPIRAN 4

Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
REKAPITULASI

Kota : Payakumbuh
Provinsi : Sumatera Barat
Tahun : 2022

Halamandari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah	KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/ CSR/ LSM /ZISWAF	MASYARAKAT
						2023	2024	2025	2026	2027												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	AIR LIMBAH																					
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																					
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat																					
	1) Pembangunan Tangki Septik Individual	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi (37 Kelurahan) Keluarahan Parik Rantang, Nunag Daya Bangun, Kubu Gadang, Tanjung Pauh,Ibuah, Labuah basiliang Parak Batuang, Payolansek, Talang, Padang Tongah Balai nan Duo, Tanah Mati, Balai Panjang, Limbukan, Koto Tuo Limo Kampuang, Kapalo Koto Ampangan, Sawah ppadang aua kuniang Padang tengah payo bada, balai jaring, payo basuang, koto panjang, Padang alai bodi, Padang tiakar, Tiakar, napar, Ompang tanah sirah, taratak padang kamuang, tigo koto dibaruah, Tigo Koto diateh, Kapalo Koto dibalai, Koto Kociak Kubu tapak rajo, Balai Tongah Koto, Ikua koto dibalai, koto nanian	25,000	8,332	Unit	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	8,000	8,200	8,200	8,500	8,500	41,400	28,500	-	12,900		-
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota																					
	1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	2) Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket				1		1	-	-	-	750	-	750	-	-	750	-	-
10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																					
	1) Operasional dan Pemeliharaan IPLT	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Ls	1	1	1	1	1	5	700	750	800	850	900	4,000	4,000	-	-	-	-
14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																					
	1) Operasional Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Ls	1	1	1	1	1	5	445	500	550	600	650	2,745	2,745	-	-	-	-
	2) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	1	1	1	4	-	300	300	300	300	1,200	300	-	900	-	-
07	Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik																					

4.

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah	KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/ CSR/ LSM /ZISWAF	MASYARA KAT
						2023	2024	2025	2026	2027												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1) Penyusunan Data Base Sanitasi Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500	1,500	-	-	-	-
	2) Penyusunan dan Verifikasi Data capaian SPM Air Limbah Domestik Skala Kota	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket		1	1	1	1	4		75	75	75	75	300	300	-	-	-	-
	3) Peningkatan Kapasitas IPLT (dari 15 m3 menjadi 30 m3)																					
	a) Penyusunan Review DED Peningkatan Kapasitas IPLT	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Paket	-	1	-	-	-	1	-	200	-	-	-	200	200	-	-	-	-
	4) Penyediaan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik																					
	a) Sosialisasi Perda Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1		-	-	1	-	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	b) Penyusunan Peraturan Pendukung Perda Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	50	-	-	50	50	-	-	-	-
16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																					
	1) Peningkatan Kapasitas IPLT (dari 15 m3 menjadi 30 m3)	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Paket	-	-	1			1	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-
	2) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPLT	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Paket	-	-	-	1	-	1	-	200	-	-	-	200	200	-	-	-	-
17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																					
	1) Pengawasan Teknis Peningkatan Kapasitas IPLT (dari 15 m3 menjadi 30 m3)	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Paket			1			1			300	-	-	300	-	-	300	-	-
09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik																					
	1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	100	-	-	-	-
	3 Rapat Koordinasi Pokja PKP Bidang Sanitasi	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	125	-	-	-	-
	4 Pembentukan UPTD Pengelola SPALD	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	300	-	-	300	300	-	-	-	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																					
2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi (5 Kecamatan di Payakumbuh)	11,877	198.35	Paket	1	1	1	1	1	5	150	200	250	300	350	1,250	-	1,250	-	-	-
	- Pembangunan Tangki Septik Individual Pola Kemitraan	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi (5 Kecamatan di Payakumbuh)	250		Unit	10	10	10	10	10	50	150	150	150	150	150	750	-	-	-	750	-
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah Domestik											9,770	11,200	15,400	11,850	11,250	59,470	38,520	1,350	18,850	750	-
B	PERSAMPAHAN																					
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																					
2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																					
03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																					
	1) Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	5000		Paket	-	-	1	2	-	3	-	-	500	1,000	-	1,500	-	-	1,500	-	-
	2) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan	11,877	198	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-	-
	3) Pembangunan TPA Regional Payakumbuh (Peningkatan)	Kecamatan Payakumbuh Selatan	141,184	198.35	Paket	-	1	-	-	-	1	-	10,000	-	-	-	10,000		10,000			
02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota																					

4.

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh										Indikasi Biaya (juta rupiah)							Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			Jml. Penduduk terlayani (Jlwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah	KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/ CSR/LSM /ZISWAF	MASYARA KAT				
						2023	2024	2025	2026	2027																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	1) Pengawasan Teknis Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi Tlopo Naoori	-	-	Paket	-	-	1	1	-	2	-	25	50	-	-	75	-	-	75	-	-				
	2) Pengawasan Teknis Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan	141,184	8,043	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	600	-	600	-	-	600	-	-				
	3) Pengawasan Teknis Pembangunan TPA (Peningkatan)	Kecamatan Payakumbuh Selatan	141,184	198,35	Paket	-	-	1	-	-	1	-	500	-	-	-	500	-	500	-	-	-				
07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																									
	1) Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi Tlopo Naoori	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	50	-	-	-	-				
	a) Studi Kelayakan TPS3R		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-				
	b) Pengadaan Lahan TPS3R		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	c) Penyusunan Studi Lingkungan TPS3R		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	50	-	-	50	50	-	-	-	-				
	d) Penyusunan DED TPS3R		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	100	-	-	-	-				
	2) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	a) Studi Pemilihan Lokasi Pusat Daur Ulang Sampah/TPST		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-				
	b) Penyusunan Dokumen Lingkungan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-				
	c) Pengadaan Lahan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST 20.000 m2		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	5,000	-	-	5,000	5,000	-	-	-	-				
	d) Penyusunan DED Pusat Daur Ulang Sampah/TPST		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	400	-	-	400	-	-	400	-	-				
	e) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST beserta Pengadaan Sarana Prasarana kapasitas 15 ton/hari (conveyor, gribik, hot extruder, biopon maggot, pyrolysis)	Kota Payakumbuh	24,194		Paket	-	-	-	1	-	-	-	-	-	300	-	300	300	-	-	-	-				
	3) DED Pembangunan TPA Regional Payakumbuh (Peningkatan)	Kecamatan Payakumbuh Selatan	-	-	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-				
	4) Pendataan kebutuhan lahan untuk pembangunan TPST/Bank Sampah		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	50	-	-	-	-				
	5) Penyusunan dan Verifikasi Data Capaian Persampahan Skala Kota	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	1	1	1	1	1	4	-	75	75	75	75	300	300	-	-	-	-				
	6) Peningkatan Kapasitas Pengelola Sampah	Kota Payakumbuh	141,184	198,35	Paket	-	1	1	1	1	4	-	100	100	100	100	400	400	-	-	-	-				
	7) Penyusunan Perikada Implementasi Perda Persampahan	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-				
	8) Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	1	-	-	-	-	1	70	-	-	-	-	70	70	-	-	-	-				
	9) Pengadaan mesin pyrolysis utk pemrosesan akhir sampah		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	a) Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengolahan sampah secara	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	1	1	-	-	-	1	150	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-				
	b) Pengadaan bangunan untuk pemrosesan akhir sampah	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	400	400	-	-	-	-				
	c) Pengadaan sarpra pemrosesan akhir sampah kapasitas 60 ton/hari (pyrolysis kap 50 ton/hari, conveyor, hopper&bag opener, mesin pre shredder, gribik, pengaman kelistrain, monitoring, pengiriman, pelatihan, uji commissioning, biopon maggot)	Kota Payakumbuh	96,774		Paket	-	1	-	-	-	1	-	4000	-	-	-	4000	4000	-	-	-	-				
08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPAT/PTST/PAIT/PS3R/TPS																									
	1) Sosialisasi Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi Tlopo Naoori	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	50	-	-	-	-				
	2) Sosialisasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	50	-	-	-	-				
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																									
2.01	Pengelolaan Sampah																									
02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemfaatan Kembali																									
	1) Operasional dan Pemeliharaan Bank sampah dan TPS3R				Paket	1	1	1	1	1	5	100	100	100	100	100	500	500	-	-	-	-				
	2) Operasional dan Pemeliharaan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan			Paket	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	800	800	800	-	-	-	-				
	3) Panenan, Pemasaran Hasil daur ulang sampah				Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	100	-	-	-	-				
03	Pengangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPAT/PTST/SPA Kabupaten/Kota																									
	1) Biaya operasional Pengelolaan Sampah Skala Kota	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	6,321	6,953	7,648	8,413	9,255	38,590	38,590	-	-	-	-				
	2) Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Regional		141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	10,000	10,000	10,000	#####	10,000	50,000	50,000	-	50,000	-	-				
	Penyediaan Saana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPAT/PTST/SPA Kab/Kota																									
	1) Pengadaan Tong Sampah	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Unit	2968	-	-	-	-	2968	1,131	-	-	-	-	1,131	1,131	-	-	-	-				
	2) pengadaan alat Alat Processing pengolahan sampah yakni Mesin IPI AWS 50 kapasitas 10 ton/hari dan alat pengelolaan sampah lainnya	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Unit	-	5	-	-	-	5	-	1,562	-	-	-	1,562	1,562	-	-	-	-				
04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																									

7

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)				
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah	KOTA	PROV.	APBN	SWASTA/ CSR/ LSM /ZISWAF	MASYARAKAT
						2023	2024	2025	2026	2027												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.11.08 2.01 03	1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan Sampah	-	-	-	Paket	1	1	1	1	1	5	266	275	275	275	275	1,366	1,366	-	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN																					
	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup																					
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Payakumbuh			Paket		1				1		281,5				281,5					
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											18,138	35,772	24,298	30,963	20,605	124,644	56,601	80,600	12,575	0	0
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN											27,908	46,972	39,698	42,813	31,855	184,114	95,121	81,950	31,425	750	0

Payakumbuh, Desember 2022
Telah dibahas oleh:
Pokja PKP
Kota Payakumbuh
Ketua,

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001

Catatan:
Kolom 1 : Nomor Urut
Kolom 2 : diisi detail uraian pekerjaan dikelompokkan berdasarkan jenis Program/Kegiatan/ Output/Sub output/Komponen
Kolom 4 dan 5 : diisi prakiraan outcome yang akan dicapai , misal jumlah penduduk pemanfaat (jiwa), luas wilayah kawasan tertangan/terlayani (Ha)
Kolom 6 : diisi satuan volume, misalnya: unit, meter, kilometer, hektar, kawasan dsb.
Kolom 7 s/d 11 : diisi rincian volume yang tiap tahun yang akan dilaksanakan.
Kolom 12 : diisi total volume yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran.
Kolom 13 s/d 17 : diisi rincian rencana pembiayaan tahunan setiap kegiatan dan jumlah total biaya untuk mencapai output yang direncanakan
Kolom 18 : diisi jumlah kolom 13 sampai dengan kolom 17
Kolom 19 s/d 23 : diisi rincian indikasi sumber pembiayaan dan besaran biaya yang diindikasikan dari sumber-sumber pendanaan/pembiayaan untuk mencapai output yang direncanakan.

4.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD KOTA

Kota : Payakumbuh
Provinsi : Sumatera Barat
Tahun : 2022

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jlwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD KOTA					Jumlah		
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH																		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat																		
	1) Pembangunan Tangki Septik Individual	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi (37 Kelurahan) Kelurahan Parik Rantang, Nunag Daya Bangun, Kubu Gadang, Tanjung Pauh,Ibua, Labuah basiliang Parak Batuang, Payolansek, Talang, Padang Tongah Balai nan Duo, Tanah Mati, Balai Panjang, Limbukan, Koto Tuo Limo Kampuang, Kapalo Koto Ampangan, Sawah ppadang aua kuniang Padang tengah payo bada, balai jariah, payo basuang, koto panjang, Padang alai bodi, Padang tiakar, Tiakar, naper, Ompang tanah sirah, taratak padang kamuang, tigo koto dibaruah, Tigo Koto diateh, Kapalo Koto dibalai, Koto Kociak Kubu tapak rajo, Balai Tongah Koto, Ikua koto dibalai, koto panjang padang, Koto panjang dalam, Parambahan, Padang	9,500	6,332	Unit	300	400	400	400	400	1,900	2,400	3,280	3,280	3,400	3,400	15,780	Dinas PKP	
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	1) Operasional dan Pemeliharaan IPLT	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Ls	1	1	1	1	1	5	700	750	800	850	900	4,000	Dinas PKP	
14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
	1) Operasional Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Ls	1	1	1	1	1	5	445	500	550	600	650	2,745	Dinas PKP	
	2) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	-	-	-	1	-	300	-	-	-	300	Dinas PKP	

4.

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh								Sumber Pembiayaan (Juta rupiah)							OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jlwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD KOTA									
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
07	Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik																				
	1) Penyusunan Data Base Sanitasi Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500	Dinas PKP/DKK			
	2) Penyusunan dan Verifikasi Data capaian SPW Air Limbah Domestik Skala Kota	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket		1	1	1	1	4		75	75	75	75	300	Dinas PKP			
	3) Peningkatan Kapasitas IPLT (dari 15 m3 menjadi 30 m3)																				
	a) Penyusunan Review DED Peningkatan Kapasitas IPLT	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Negeri	141,184	8,043	Paket	-	1	-	-	-	1	-	200	-	-	-	200	Dinas PKP			
	4) Penyediaan Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik																				
	a) Sosialisasi Perda Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1		-	-	1	-	100	-	-	-	100	Dinas PKP			
	b) Penyusunan Peraturan Pendukung Perda Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	50	-	-	50	Dinas PKP			
16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																				
	1) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPLT	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Negeri	141,184	8,043	Paket	-	-	-	1	-	1	-	200	-	-	-	200	Dinas PKP			
17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																				
	1) Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	Dinas PKP			
	2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	Dinas PKP			
	3) Rapat Koordinasi Pokja PKP Bidang Sanitasi	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	25	25	25	25	25	125	Dinas PKP			
	4) Pembentukan UPTD Pengelola SPALD	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	300	-	-	300	Dinas PKP			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah Domestik											3,870	5,830	5,480	5,250	5,350	25,780				

7

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		SATUAN	Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Sumber Pembiayaan (Juta rupiah)						OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jlwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)		2023	2024	2025	2026	2027	Total Volume	APBD KOTA					Jumlah		
												2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	PERSAMPAHAN																		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																		
	1) Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi Tigo Naon	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	Dinas LH	
	a) Studi Kelayakan TPS3R		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	1.000	-	-	-	1.000	Dinas LH	
	b) Pengadaan Lahan TPS3R		-	-	Paket	-	-	1	-	-	-	-	-	50	-	-	50	Dinas LH	
	c) Penyusunan Studi Lingkungan TPS3R		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	Dinas LH	
	d) Penyusunan DED TPS3R		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas LH	
	2) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan																	
	a) Studi Pemilihan Lokasi Pusat Daur Ulang Sampah/TPST		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	Dinas LH	
	b) Penyusunan Dokumen Lingkungan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	Dinas LH	
	c) Pengadaan Lahan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST 20.000 m2		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	5.000	-	-	5.000	Dinas LH	
	d) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST beserta Pengadaan Sarana Prasarana kapasitas 15 ton/hari (conveyor, Gbrik, hot extruder, Blower maggot, pyrolysis)	Kota Payakumbuh	24.184		Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3.000	-	3.000	Dinas LH	
	3) Pendataan kebutuhan lahan untuk pembangunan TPST/Bank Sampah		-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	Dinas LH	
	4) Penyusunan dan Verifikasi Data Capaian Persampahan Skala Kota	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	-	1	1	1	1	4	-	75	75	75	75	300	Dinas LH	
	5) Peningkatan Kapasitas Pengelola Sampah	Kota Payakumbuh	141.184	196.35	Paket	1	1	1	1	1	4	-	100	100	100	100	400	Dinas LH	
	6) Penyusunan Perkada Implementasi Perda Persampahan	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	Dinas LH	
	7) Penyusunan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	1	-	-	-	-	1	-	70	-	-	-	70	Dinas LH	
	8) Pengadaan mesin pyrolysis utk pemrosesan akhir sampah																		
	a) Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengolahan sampah secara thermal (Pyrolysis)	Kota Payakumbuh			Paket	1						150							
	b) Pengadaan bangunan untuk pemrosesan akhir sampah	Kota Payakumbuh			Paket		1						400						
	c) Pengadaan sarpra pemrosesan akhir sampah kapasitas 60 ton/hari (pyrolysis kap 50 ton/hari, conveyor, hopper&bag opener, mesin pre shredder, gbrik, pengaman kelistrikan, monitoring, pengiriman, pelatihan, uji komisioning, blower, maggot)	Kota Payakumbuh	96.774		Paket		1						4000						
08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/ISPA/TPS3R/TPS																		
	1) Sosialisasi Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi Tigo Naon	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	Dinas LH	
	2) Sosialisasi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan	-	-	Paket	-	1	-	-	-	1	-	50	-	-	-	50	Dinas LH	

7

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD KOTA					Jumlah		
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																		
2.01	Pengelolaan Sampah																		
02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali																		
	1) Operasional dan Pemeliharaan Bank sampah dan TPS3R	-			Paket	1	-	1	1	1	4	100	-	100	100	100	400	Dinas LH	
	2) Operasional dan Pemeliharaan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan			Paket	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	800	800	Dinas LH	
	3) Pameran, Pemasaran Hasil daur ulang sampah	-			Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	100	-	100	Dinas LH	
03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
	1) Biaya operasional Pengelolaan Sampah Skala Kota	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	6,321	6,953	7,648	8,413	9,255	38,590	Dinas LH	
	Penyediaan Saana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota																		
	1) Pengadaan Tong Sampah	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Unit	2996	-	-	-	-	2996	1,131	-	-	-	-	1,131	Dinas LH	
	2) pengadaan alat Alat Processing pengelolaan sampah yakni Mesin IPI AWS 50 kapasitas 10 ton/hari dan alat alat pengelolaan sampah lainnya.	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Unit	-	5	-	-	-	5	-	1,562	-	-	-	1,562	Dinas LH	
04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
	1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pengelolaan Sampah	Kota Payakumbuh	-	-	Paket	1	-	1	1	1	4	266	-	275	275	275	1,091	Dinas LH	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP																		
2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup																		
03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Payakumbuh			Paket		1				1		281.5					Dinas LH	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											8,038	14,872	13,348	12,063	10,605	54,094		
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN											11,908	20,702	18,828	17,313	15,955	79,874		

Payakumbuh, Desember 2022
Telah di bahas oleh
Pokja PKP Kota Payakumbuh
Ketua

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001

4.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI**

Kota : Payakumbuh
Provinsi : Sumatera Barat
Tahun : 2022

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi					Jumlah		
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH																		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
	1) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	-	-	-	1	-	100	-	-	-	100	Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat	
14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan , Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi	11,677	196.35	Paket	1	1	1	1	1	5	150	200	250	300	350	1,250	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barta	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah Domestik											150	300	250	300	350	1,350		
B	PERSAMPAHAN																		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																		
2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
	1) Pembangunan TPA Regional Payakumbuh (Peningkatan)	Kecamatan Payakumbuh Selatan	141,184	196.35	Paket	-	1	-	-	-	1	-	10,000	-	-	-	10,000	Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat	UPTD Persampahan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat
02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	1) Pengawasan Teknis Pembangunan TPA (Peningkatan)	Kecamatan Payakumbuh Selatan	141,184	196.35	Paket	-	-	1	-	-	1	-	500	-	-	-	500	Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat	
07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																		
	1) DED Pembangunan TPA Regional Payakumbuh (Peningkatan)	Kecamatan Payakumbuh Selatan	-	-	Paket	1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	100	Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat	

4

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh								Sumber Pembiayaan (juta rupiah)							OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jlwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	APBD Provinsi					Jumlah				
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																				
2.01	Pengelolaan Sampah																				
03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1) Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Regional	-	141,184	8,043	Paket	1	1	1	1	1	5	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	UPTD Persampahan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											10,100	20,500	10,000	10,000	10,000	60,600				
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN																				
												10,250	20,800	10,250	10,300	10,350	61,950				

Telah dibuat oleh :
Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat
Ketua

Payakumbuh, Oktober 2023
Telah di bahas oleh
Pokja PKP Kota Payakumbuh
Ketua

Drs HANSASTRI, MM
NIP. 19641013 199103 1 001

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001

7.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN APBN

Kota : Payakumbuh
Provinsi : Sumatera Barat
Tahun : 2022

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Sumber Pembiayaan (juta rupiah)						OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelota Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN					Jumlah		
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	AIR LIMBAH																		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																		
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																		Dinas PKP
06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat																		
	1) Pembangunan Tangki Septik Individual	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi (37 Kelurahan)	15,500	6,332	Unit	700	600	600	600	600	3,100	10,500	9,000	9,000	9,000	9,000	46,500		
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota																		Dinas PKP
	2) Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket				1		1	-	-	-	750	-	750		
14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
	2) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	1	1	1	4	-	-	300	300	300	900		
16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																		Dinas PKP
	1) Peningkatan Kapasitas IPLT (dari 15 m3 menjadi 30 m3)	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Paket	-	-	1			1	-	-	4,000	-	-	4,000		
17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																		Dinas PKP
	1) Pengawasan Teknis Peningkatan Kapasitas IPLT (dari 15 m3 menjadi 30 m3)	Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	141,184	8,043	Paket			1			1			300	-	-	300		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah Domestik											10,500	9,000	13,600	10,050	9,300	52,450		

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh								Sumber Pembiayaan (Juta rupiah)						OPD Penanggung Jawab Pelaksanaan	OPD/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jlwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	APBN					Jumlah			
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
B	PERSAMPAHAN																			
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																			
2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																			
03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
	1) Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi	5000		Paket	-	-	1	2	-	3	-	-	500	1.000	-	1.500			
	2) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan	11,677	196	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10.000	-	10.000			
02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota																		Dinas LH	
	1) Pengawasan Teknis Pembangunan TPS 3R	Kecamatan Lamposi	-	-	Paket	-	-	1	1	-	2	-	25	50	-	-	75			
	2) Pengawasan Teknis Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan	141,184	8,043	Paket	-	-	-	1	-	1	-	-	-	600	-	600			
07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																		Dinas LH	
	2) Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah/TPST	Kecamatan Payakumbuh Selatan																		
	d) Penyusunan DED Pusat Daur Ulang Sampah/TPST		-	-	Paket	-	-	1	-	-	1	-	-	400	-	-	400			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											0	25	950	11.600	0	12.575			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											10,500	9,025	14,550	21,650	9,300	65,025			

Telah dibahas oleh :
1. Kepala BPPW

(1).....

Payakumbuh, Oktober 2023
Telah di bahas oleh
Pokja PKP Kota Payakumbuh
Ketua

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001

7

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN JANGKA MENENGAH
SUMBER PENDANAAN SWASTA - CSR - LSM - ZISWAF

Kota : Payakumbuh
Provinsi : Sumatera Barat
Tahun : 2022

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Sumber Pembiayaan (Juta rupiah)							Nama CSR/Swasta	KSM/Lembaga Pengelola Pasca Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani (Jiwa)	Luas Wilayah terlayani (Ha)	SATUAN	Volume					Total Volume	SWASTA-CSR-LSM-ZISWaf					Jumlah			
						2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A.	AIR LIMBAH																			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																			
2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
	- Pembangunan Tangki Septik Individual Pola Kemitraan	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi di 5 Kecamatan	250		Unit	10	10	10	10	10	50	150	150	150	150	150	750			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah Domestik											150	150	150	150	150	750			
B	PERSAMPAHAN																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan											0	0	0	0	0	0			
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN											150	150	150	150	150	750			

Payakumbuh, Oktober 2023
Telah di bahas oleh
Pokja PKP Kota Payakumbuh
Ketua

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001

Catatan:
Kolom 1 : Nomer Urut
Kolom 2 : diisi detail uraian pekerjaan dikelompokkan berdasarkan jenis Program/Kegiatan/ Output/Sub output/Komponen
Kolom 4 dan 5 : diisi prakiraan outcome yang akan dicapai . misal jumlah penduduk pemanfaat (jiwa), luas wilayah kawasan tertanoani/terlayani (Ha)
Kolom 6 : diisi satuan volume, misalnya: unit, meter, kilometer, hektar, kawasan dsb.
Kolom 7 s/d 11 : diisi rincian volume yang tiap tahun yang akan dilaksanakan.
Kolom 12 : diisi total volume yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran.
Kolom 13 s/d 17 : diisi rincian rencana pembiayaan tahunan setiap kegiatan dan jumlah total biaya untuk mencapai output yang direncanakan
Kolom 18 : diisi jumlah kolom 13 sampai dengan kolom 17
Kolom 19 s/d 23 : diisi rincian indikasi sumber pembiayaan dan besaran biaya yang diindikasikan dari sumber-sumber-sumber pendanaan/pembiayaan untuk mencapai output yang direncanakan.

4.

RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN SANITASI JANGKA MENENGAH
DAFTAR TUNGGU (YANG BELUM ADA SUMBER PENDANAAN)

Kabupaten : Kota Payakumbuh
Provinsi : Sumatera Barat
Tahun : 2022

Halamandari.....

NOMOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan/volume							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Indikasi Sumber Pendanaan Potensial	Ketersediaan Proposal / Project Digest	Pengelola Paska Konstruksi
			Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATUAN	Volume					Total Volume	Daftar Tunggu					Jumlah			
						20xx	20xx	20xx	20xx	20xx		20xx	20xx	20xx	20xx					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	AIR LIMBAH DOMESTIK																			
1.03.0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN																			
2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																			
06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan																			
	1) Pembangunan Tangki Septik Individual	Area Beresiko Air Limbah Domestik Sangat Tinggi, dan Tinggi (37 Kelurahan) Keluarahan Parik Rantang, Nunag Daya Bangun, Kubu Gadang, Tanjung Pauh,Ibuah, Labuah basiliang Parak Batuang, Payolansek, Talang, Padang Tongah Balai nan Duo, Tanah Mati, Balai Panjang, Limbukan, Koto Tuo Limo Kampuang, Kapalo Koto Ampangan, Sawah ppadang aua kuniang Padang tengah payo bada, balai jaring, payo basuang, koto panjang, Padang	15,500	6,332	Unit	700	600	600	600	600	3,100	10,500	9,000	9,000	9,000	9,000	46,500	APBN	v	Dinas PKP Kota Payakumbuh
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis																			
	2) Penyusunan Rencana Induk Air Limbah Domestik	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket				1		1	-	-	-	750	-	750			
14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																			
	2) Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Payakumbuh	141,184	8,043	Paket	-	1	1	1	1	4	-	-	300	300	300	900			
16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT																			
	1) Peningkatan Kapasitas IPLT (dari 15 m3 menjadi 30	Sungai Durian	141,184	8,043	Paket	-	-	1			1	-	-	4,000	-	-	4,000			
17	Supervisi																			
	1) Pengawasan Teknis Peningkatan Kapasitas IPLT	Sungai Durian	141,184	8,043	Paket			1			1			300	-	-	300			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah																			

4.

